

- RIZAL SUKMA, Transformasi Peranan Strategis RRC: Menuju Skenario "Dominant Power"?
- RONALD NANGOI, Implikasi Eropa 1992 Terhadap Persaingan Bisnis Global

Dokumen:

- SUDIBYO, YOYOK ARIESSUSANTO & F. ANDREA, Ringkasan Peristiwa ASEAN

No. 4/1991: Informasi Global

- DAOED JOESOEF, Satu Kebudayaan di Abad IPTEK
- BACHTIAR ALY, Dampak Globalisasi Bagi Transformasi Masyarakat
- A.M.W. PRANARKA, Dimensi Ideologi dan Politik
- A. MUIS, Kecenderungan Globalisasi Media Massa
- PUGUH SUHARSO, Sistem Pengawasan dan Pengamanan Wilayah Perairan Indonesia
- SUKARDI RINAKIT, Inovasi Teknologi "Remote Sensing": Mengangkat Kembali Prestasi Agro-Industri

Dokumen:

- SUDIBYO, YOYOK ARIESSUSANTO & F. ANDREA, Ringkasan Peristiwa ASEAN

Timbangan Buku:

- SUKARDI RINAKIT, Katalisator Pembangunan Nasional

No. 5/1991: Pemilu 1992 dan Kedaulatan Rakyat

- WAHONO, Golkar dan Pemilu 1992
- ISMAL HASAN METAREUM, Program Perjuangan PPP dalam kampanye Pemilu 1992
- SOERJADI, Kampanye dan Perjuangan PDI dalam Pemilu 1992
- SOEMITRO, Pemilu 1992 Serta Implikasinya Terhadap OPP
- SLAMET SUTRISNO, Bung Hatta dan Kedaulatan Rakyat: Sebuah Pemikiran
- H. ANTON DJAWAMAKU, Batas-batas Kemampuan Hukum di Indonesia
- DARMAWAN SALMAN, Pergeseran Ketenagakerjaan di Pedesaan

No. 6/1991: Asia Tenggara dan KTT ASEAN IV

- JUSUF WANANDI, Menuju Orde Internasional Baru
- RIZAL SUKMA, Pengaturan Keamanan di Asia Tenggara: Agenda Rumit KTT ASEAN IV
- ASNANI USMAN, Menilai Kerja Sama Politik ASEAN
- BANTARTO BANDORO, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN IV: Kontribusi Lembaga Studi Strategi dan Internasional
- MOCHTAR KUSUMA-ATMADJA, Beberapa Pemikiran Mengenai Kerja Sama Keamanan ASEAN: Suatu Perspektif Indonesia
- C.P.F. LUHULIMA, ASEAN dan Hubungan Intra Asia Tenggara Pasca Konflik Kamboja
- STEPANUS DJUWENG, Gejolak di Sabah dan Sarawak, Serta Implikasinya Terhadap Indonesia

Dokumen:

- SUDIBYO, YOYOK ARIESSUSANTO & F. ANDREA, Ringkasan Peristiwa ASEAN

ANALISIS CSIS

Perkembangan Sosial Budaya Awal Abad XXI

- Abad XXI Sebagai Era Aufklärung II
- Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Martabat dan Kualitas Manusia di dalam Persaingan Global
- Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat dalam Ilmu Hukum
- Demokrasi dalam Kehidupan Budaya
- Masyarakat Kecil dalam Ekonomi Global: Perspektif Energi, Sosiobudaya dan Gaya Hidup Abad XXI
- Pendidikan Rakyat dalam Organisasi-organisasi Non-Pemerintah: Pendidikan untuk Mobilisasi Sosial?
- Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN
- Timbangan Buku: Dekat di Mata Tapi Jauh di Hati



Analisis CSIS

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tulisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sendiri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang dimuat dalam ANALISIS sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis masing-masing.

Logo CSIS



Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: *Nalar Ajar Terusan Budi*. Logo berbentuk sebuah piringan cekung berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka beralaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelanjangan gambar orang di tengah piringan melambangkan keterbukaan budi -- tiadanya sikap a priori -- pada warga CSIS, seperti pada para analis umumnya, dalam kegiatan studinya. Gambar ini menunjukkan kegiatan belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Kalimat *Nalar Ajar Terusan Budi* yang tertera pada lingkaran piringan adalah *surya sengkala*: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekaligus mengemukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai itu. *Nalar* menurut tradisi Jawa itu berwatak 1, *Ajar* berwatak 7, *Terusan* berwatak 9, dan *Budi* berwatak 1. Sebagaimana lazimnya sengkala dibaca dalam urutan terbalik: 1971, tahun CSIS berdiri. *Nalar Ajar Terusan Budi* juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS sebagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas individu, pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya menganalisa kebenaran tetapi juga terpenggil untuk menunaikan kewajiban sosialnya. Makna *Nalar Ajar Terusan Budi* adalah bahwa bagi CSIS, bernalar, belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dari budi yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G. Sidharta.

Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab

Rufinus LAHUR

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF, A.M.W. PRANARKA, J. Soedjati DJIWANDONO,
M. Hadi SOEASTRO, Harry TJAN SILALAH, Jusuf WANANDI,
Clara JOEWONO, Djisman S. SIMANDJUNTAK, Onny S. PRIJONO,
Bantarto BANDORO

Redaksi Pelaksana

Bambang WALGITO, Sunarto NDARU MURSITO, Medelina K. HENDYTIO

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

ANALISIS CSIS

TAHUN XX, NO. 1, JANUARI-FEBRUARI 1991

Daftar Isi

• Pengantar Redaksi	2
• Abad XXI Sebagai Era Aufklärung II <i>A.M.W. PRANARKA</i>	4
• Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Martabat dan Kualitas Manusia di dalam Persaingan Global <i>Ginandjar KARTASASMITA</i>	10
• Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat dalam Ilmu Hukum <i>Satjipto RAHARDJO</i>	20
• Demokrasi dalam Kehidupan Budaya <i>Usman PELLY</i>	28
• Masyarakat Kecil dalam Ekonomi Global: Perspektif Energi, Sosiobudaya dan Gaya Hidup Abad XXI <i>Ali M.A. RACHMAN</i>	36
• Pendidikan Rakyat dalam Organisasi-organisasi Non-Pemerintah: Pendidikan untuk Mobilisasi Sosial? <i>Salomon MAGENDZO</i>	45
• Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN <i>SUDIBYO, Yoyok ARIESSUSANTO & F. ANDREA</i>	59
• Timbangan Buku: Dekat di Mata Tapi Jauh di Hati <i>Ikrar NUSA BHAKTI</i>	68

Pengantar Redaksi

SEJARAH peradaban modern dewasa ini menurut *A.M.W. Pranarka* merupakan hasil perkembangan era Aufklärung yang lahir di Eropa pada abad XVII. Akan tetapi sesudah Perang Dunia II, peradaban modern ini dirasakan mencapai kejenuhannya, di samping memecah-mecah dan menghancurkan manusia atau kemanusiaan; maka digugat untuk diubah orientasinya demi mengaktualisasikan peningkatan kualitas sejarah semesta yang lebih bermakna. Karena itu, harus diupayakan agar corak peradaban modern yang selama ini berpola dikhotomi, kompetisi dan dominasi dapat digantikan dengan yang berpola kerjasama, komunikasi dan kebersamaan.

Dalam membahas martabat manusia Indonesia *Ginandjar Kartasasmita* mendasarkan pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan pembangunan negara-negara di dunia semakin terintegrasi dalam persaingan global. Bangsa yang tidak mampu memanfaatkan arus globalisasi ini untuk pembangunannya akan tertinggal dan terhempas martabatnya. Dalam arus ini bangsa Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alamnya yang dapat habis, tetapi harus mengutamakan pengembangan mutu manusianya. Maka tidak cukuplah hanya melaksanakan revolusi teknologi, melainkan juga harus revolusi budaya, kalau dalam persaingan global bangsa Indonesia ingin setara dengan bangsa-bangsa maju dan mendapatkan kemerdekaannya yang sejati.

Tata hukum dapat menjadi rekayasa sosial untuk membangun kualitas manusia dan masyarakat. Demi perwujudan peranan hukum ini dikemukakan oleh *Satjipto Rahardjo*, sistem hukum modern Republik Indonesia yang berlatar belakang Eurosentris perlu dipribumisasikan dalam data sosial budaya kita. Karena itu, pandangan dasar bangsa yaitu Pancasila harus dijabarkan ke dalam postulat hukum dan semua kekayaan intelektual yang berkembang diintegrasikan ke dalam sistem hukum itu.

Pembangunan kebudayaan nasional Indonesia oleh *Usman Pelly* diartikan sebagai rekayasa kebudayaan tradisional dan pengaruh peradaban maju di dalam kebebasan yang dikontrol oleh nilai-nilai dan cita-cita dasar nasional. Sebab itu, demokratisasi dalam kebudayaan tradisional diperlukan untuk pematangan dan pengayaan budaya daerah-daerah, sehingga menimbulkan suasana gairah maupun kompetisi yang terbuka dan saling mengisi demi tampilnya puncak-puncak kebudayaan daerah sebagai modal kebudayaan nasional. Proses demokrasi budaya ini dapat mendorong transformasi sosial lebih cepat, namun

haruslah ada konsep dan kebijakan yang terintegrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

Kompleksitas sosiobudaya menurut *Ali M.A. Rachman* terjadi melalui proses evolusi penggunaan energi, karena struktur masyarakat yang menuntut status dan peran baru lebih banyak mengkonsumsi energi guna memelihara sistem sosial. Di masa mendatang konsumsi energi di Indonesia secara tak terelakkan menyangkut perspektif globalisasi. Secara khusus *Ali M.A. Rachman* menguraikan bagaimana sebaiknya bentuk gaya hidup masyarakat kecil dalam ekonomi global agar pertukaran energi antar negara bisa terjadi dan arusnya pun perlu mendapat perhatian bangsa Indonesia dalam pembangunan 25 tahun yang akan datang.

Kebijakan pendidikan Chili dalam penilaian *Salomon Magendzo* hanya mempunyai hasil minimal bagi orang-orang miskin untuk mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Sistem pendidikan tidak mengarah pada tindakan, di samping hanya menyiapkan pemecahan masalah masyarakat elite, dan bahkan media massa telah merusak aktivisme sosial jenis mana pun. Karena itu, perlu dikembangkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menggalakkan perubahan sosial partisipatoris melalui peningkatan kualitas kehidupan keluarga, penyegaran organisasi-organisasi masyarakat, dan pembangunan kembali struktur sosial.

Berbagai tantangan akibat perkembangan baru yang mewarnai situasi politik dan ekonomi dunia, menuntut peningkatan kemauan politik dalam rangka kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama baru menghadapi era pasca Kamboja serta peningkatan perbaikan akses barang-barang ASEAN ke pasaran negara-negara mitra dialog merupakan tema penting dalam rangka persiapan KTT ASEAN ke-14, sehingga diharapkan dapat menetapkan strategi dan arahan baru bagi kerjasama ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN lainnya yaitu kerjasama Ekonomi, Perdagangan, Industri Mineral dan Energi dan kerjasama Non-Ekonomi, Non-Pemerintahan serta hubungan ASEAN dengan mitra dialognya dapat diikuti dalam Ringkasan Peristiwa ASEAN bulan Desember 1990 sampai dengan Januari 1991 yang disusun oleh *Sudibyo* (Editor), *Yoyok Ariessusanto* dan *F. Andrea* sebagai anggotanya.

Abad XXI Sebagai Era *Aufklärung* II

A.M.W. PRANARKA

Pendahuluan

GLOBALISASI yang makin menggelombang mewarnai akhir abad XX tampaknya membawa petunjuk bahwa pada abad yang akan datang dunia akan mengalami transformasi yang sifatnya mendasar. Gejala-gejala yang terjadi menyertai gelombang globalisasi membawa tanda-tanda kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan kualitatif maupun struktural di dalam perkembangan sejarah dunia di abad XXI yang akan datang nanti. Motivasi dominasi disertai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang makin menyatu dengan ekonomi merupakan arus utama yang amat kuat mewarnai perubahan-perubahan diakhir abad ini.

Di dalam konteks seperti itu mungkin kita dapat berbicara mengenai abad XX sebagai bagian dari gelombang sejarah besar di masa yang lampau dan bagian awal yang menguak gelombang sejarah berikutnya di abad XXI dan selanjutnya. Gelombang apa-

kah yang bakal mewarnai abad XXI itu? Kemanakah arah sejarah? Hal-hal ini kiranya dapat menjadi bahan permenungan, agar keterlibatan kita dengan proses sejarah dunia ini didukung pula dengan wawasan kesejarahan yang besar.

Gelombang globalisasi yang amat diwarnai oleh motivasi dominasi seperti dengan ilmu dan teknologi yang makin menyatu dengan ekonomi, jelaslah dapat dipandang sebagai bagian gelombang era *Aufklärung* yang terjadi pada abad ke-17 dan 18 dan berjalan terus hingga dewasa ini. Dengan mengingat posisi abad XX sebagai bagian dari gelombang *Aufklärung* yang membuka kemungkinan tahapan terjadinya era baru dengan perubahan kualitatif maupun struktural di tingkat sejarah dunia di abad-abad yang akan datang, mungkin kita dapat berbicara mengenai abad XX sebagai akhir dari gelombang *Aufklärung I* dan abad XXI sebagai gelombang awal dari era *Aufklärung II*. Sebagai kelanjutan dari gelombang *Aufklärung I* yang membawa gelombang besar globalisasi yang dimotivasikan oleh kekuat-

an aspirasi dominasi yang didukung dengan perkembangan ekonomi, ilmu dan teknologi, maka dapatlah kita bertanya-tanya: pola apakah yang akan terjadi di abad-abad yang akan datang nanti. Sekurang-kurangnya kita dapat mengharapkan pola apa yang seyogyanya mewarnai gelombang sejarah di masa yang akan datang itu, sehingga manusia dapat mengatasi dampak-dampak sampingan yang dibawa oleh puncaknya gelombang *Aufklärung I*, sehingga era *Aufklärung II* tersebut walaupun tetap akan membawa kuatnya arus dominasi, ilmu, ekonomi dan teknologi, akan dapat ditempatkan ke dalam wawasan yang lebih membawa makna bagi perkembangan umat manusia.

Dari renungan ulang terhadap keseluruhan perjalanan abad XX sebagai satu *lakon*, dan juga sebagai ancang-ancang memasuki abad XXI, dapat dikatakan bahwa ditinjau dari segi jalannya sejarah kebudayaan, pada saat ini umat manusia atau kita semua sedang berada dalam ambang berakhirnya era *Aufklärung I* dan ambang diawalnya era *Aufklärung II*.

Aufklärung adalah zaman pencerahan di Eropa Modern yang terjadi sejak abad XVII. Dengan membuat *Aufklärung* sebagai tonggak acuan gelombang sejarah, tidaklah berarti mengemukakan wawasan yang sepenuhnya Eropasentris. *Aufklärung* memang lahir di Eropa, namun arus gelombangnya bagaimanapun berdampak luas, ke seluruh dunia, bahkan dalam bentangan waktu yang cukup panjang hingga saat ini.

Aufklärung I yang berkembang dalam abad XVIII, arus gelombangnya terus membawa hempasan sepanjang abad XIX dan abad XX. Abad XX adalah kontinuitas dari era *Aufklärung*, namun mungkin juga akan merupakan saat titik jenuhnya getaran ge-

lombang *Aufklärung I* tersebut. Dewasa ini terjadi gugatan-gugatan mendasar terhadap beberapa hasil yang dibuahnya, di samping gelombang arus globalisasi awal dari *Aufklärung II*. Gugatan-gugatan tersebut meminta terjadinya era sejarah baru umat manusia yang masih merupakan kesinambungan, namun dengan peningkatan kualitas serta perubahan struktural dengan orientasi agar teraktualkan peningkatan gradasi kualitas sejarah semesta yang lebih bermakna.

Abad XX

Perjalanan abad XX sebagai jalannya sejarah kebudayaan, mungkin dapat dibagi menjadi dua: zaman sebelum tahun 1945 dan zaman sesudah tahun 1945. Pembagian ini bukan karena kebetulan Indonesia modern lahir pada kurun waktu itu, melainkan karena pada tahun itu berakhir Perang Dunia II. Dengan demikian, pembagian menjadi dua babak tersebut lebih didasarkan atas acuan peristiwa perang dunia yang terjadi dalam abad XX.

Abad XX sebelum tahun 1945 merupakan kontinuitas yang amat kuat dari gelombang *Aufklärung* abad XVIII dan XIX. Inti utama dari *Aufklärung* adalah adanya keyakinan bahwa lepas dari agama dan lepas dari Tuhan, manusia melalui kekuatan pengetahuannya akan dapat membangun dunianya sendiri. Dengan perkataan lain, *Aufklärung* adalah suatu era yang ditentukan secara dogmatik oleh dominasi pengetahuan manusia.

Aufklärung ini tentu saja adalah kelanjutan dari *Renaissance*, yang merupakan reaksi yang menggugat kejenuhan Abad Per-

tengahan Eropa. Abad Pertengahan diwarnai oleh dominasi keagamaan, yang digugat oleh zaman modern. Kedaulatan atau supremasi keagamaan digantikan dengan kedaulatan dan kepercayaan terhadap supremasi kodrat, supremasi manusia, dan khususnya supremasi pengetahuan manusia. Bila dalam Abad Pertengahan, *religion* menjadi *über alles*, maka dalam era *Aufklärung* itu pengetahuan (*knowledge*) menjadi *über alles*.

Gelombang optimisme *Aufklärung* memang amat dahsyat sehingga memacu berkembangturnya cabang-cabang pengetahuan, baik dalam bentuk filsafat, ilmu, ideologi maupun teknologi. Sekularisme *Aufklärung* telah memacu gelombang modernisasi dan kemajuan peradaban (*progress*). Situasi yang digambarkan di dalam Gelombang Ketiga dan Megatrend misalnya, adalah muara dari arusnya *Aufklärung*. Yang perlu dicatat adalah bahwa masing-masing cabang tersebut tumbuh dan berkembang dengan pretensi menjadi pemegang "kedaulatan tertinggi" dan "penguasa tunggal". Dengan perkataan lain terjadilah suatu suasana yang dipenuhi oleh sikap yang beraspirasi kepada dominasi dan pandangan determinisme satu dimensional. Walaupun masing-masing sesungguhnya hanya menyentuh salah satu bagian dari kenyataan dan totalitas, akan tetapi cenderung membuat klaim kemutlakan sebagai satu-satunya penentu.

Suasana *Aufklärung* memang suasana yang penuh semangat kompetisi dan mengarah kepada perebutan dominasi. Misalnya saja dalam dunia ilmu, suatu teori dianggap mempunyai nilai tinggi apabila teori tersebut dapat menjatuhkan teori yang lama atau yang sedang berlaku. Ini terjadi pula di dunia politik dan ekonomi.

Maka, terjadilah perebutan kedaulatan ataupun perang merebut legitimasi mutlak antara filsafat dengan ilmu dan kemudian dengan teknologi dan ideologi. Bahkan di dalam masing-masing cabang utama, seperti filsafat, ilmu, ideologi dan kemudian juga theologi, terjadi perpecahan-perpecahan lagi, dan semuanya pun berada dalam suasana kompetisi dan perebutan dominasi.

Bagian pertama abad XX merupakan zaman di mana *Aufklärung* bermuara pada suasana seperti itu. Bukan hanya dalam bidang pengetahuan melainkan juga dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Berlangsunglah dalam abad XX suatu proses transformasi progresif yang besar, cepat dan menyeluruh, yang menyentuh hampir segala segi kekuasaan dan kehidupan.

Perkembangan yang amat kaya dan cepat tersebut tampaknya membawa dampak yang berat bagi manusia. Sejarah menjadi terpecah-pecah. Dikotomi dan antagonisme adalah ciri utama. Dominasi, hegemoni, supremasi merupakan medan perebutan. Dan terjadilah Perang Dunia II, yang dapat dipandang sebagai medan diperagakannya kekuatan-kekuatan yang dihasilkan oleh *Aufklärung* tersebut, yang memecah, menghancurkan manusia dan kemanusiaan.

Maka sesudah Perang Dunia II, terjadilah arus balik yang menggejala di dalam aliran-aliran anti intelektualisme berupa gerakan anti sistem intelektual dan anti sistem sosial ataupun politikal. Ini terjadi di tahun 1950an, tahun 1960an, sampai tahun 1980an, antara lain dalam bentuk aliran Eksistensialisme dan kemudian Neo-Marxisme. Walaupun demikian semangat *Aufklärung* masih menjadi cirinya, karena aliran-aliran itu masih berupaya merebut "dominasi" dalam pretensinya mewujudkan suatu masyarakat yang sempurna, final dan total.

Sementara itu gelombang *Aufklärung* berjalan terus: ilmu maupun teknologi makin berkaitan dengan ekonomi, politik, dan persenjataan. Dengan perkataan lain, buah hasil arus-arus gelombang *Aufklärung* makin dipadu menjadi satu di dalam bentuk kekuasaan (*power*). Dan kualitas kekuasaan tersebut amatlah ditentukan oleh kualitas ilmu dan teknologi, kualitas ekonomi, industri dan terutama sistem moneterinya. Gelombang ini membawa tekanan-tekanan kepada pusat-pusat kekuatan dunia baik di Timur maupun di Barat. Sebelum Perang Dunia II, Eropa merupakan satu-satunya centrum mondial. Tetapi sesudah Perang Dunia II terjadi sentrifikasi baru yaitu sentrifikasi bipolar antara AS dan US. Namun desakan ilmu, teknologi dan ekonomi, terutama sistem moneter, tampaknya membuat pusat bipolar itu pun memudar menjadi multipolar. Gelombang tersebut juga terasa hembasanya terhadap Negara-negara Dunia Ketiga.

Suasana pada tahun 1960an, 1970an, dan 1980an, dapatlah dipandang sebagai suasana perjalanan sejarah di mana umat manusia berada di persimpangan jalan. Ada kesadaran akan ancaman-ancaman destruktif, ada keinginan untuk memacu langkah yang konstruktif. Akan tetapi masih dalam suasana serba bimbang dan ragu, karena berbagai risiko masih harus diperhitungkan.

Suasana ini merupakan momentum yang menyadarkan sifat terbatasnya segala sistem. Menjadi konsensus dan kesadaran bersama bahwa tidak ada satu sistem pun yang terbukti merupakan sistem yang final, total serba tunggal, dalam menjawab masalah-masalah dunia dan manusia baik itu berupa falsafah, ilmu, teknologi, ideologi maupun theologi. Kesadaran akan keterbatasan demikian ternyata merupakan pemacu terjadinya keterbukaan dan desakan untuk mencari

pola baru: bukan lagi pola kompetisi, dominasi, dikotomi, melainkan pola kerjasama, komunikasi, persatuan, kebersamaan. Kiranya memang tidak keliru bahwa dalam keberadaannya di persimpangan jalan sejarah ini, manusia sadar bahwa ia berada dalam situasi *in search of new creative synthesis*. *Aufklärung I* melahirkan pluralisme kekuatan sejarah. Masalahnya adalah dapatkah dibangun suatu persatuan atas dasar pluralisme kekuatan-kekuatan sejarah itu.

Aufklärung II

Sejarah akan dan harus berjalan terus. Ini telah menjadi kesadaran bersama. Desakan sejarah itu menyebabkan umat manusia tidak dapat tinggal berlama-lama dalam *cross-road of history*. Ia harus mengadakan *breakthrough*, agar dapat melanjutkan perjalanan sejarahnya.

Kalau kita mengamati perkembangan yang terjadi, maka kekeliruan mendasar di masa lampau (walaupun telah menghasilkan buah-buah peradaban secara kaya dan menakjubkan) adalah suasana kompetisi, dominasi, suasana determinisme satu dimensional, yang saling berebut kekuasaan, apakah itu dalam wujud falsafah, agama, ilmu, ideologi ataupun teknologi, dalam wujud kekuasaan politik ataupun ekonomi.

Namun kalau kita bertanya: semua itu secara radikal (kalau kita cari akarnya) dari manakah datangnya? Jawaban tampaknya telah menjadi konsensus bersama pula: dari manusia sendiri. Filsafat, ilmu, theologi, ideologi, ilmu dan teknologi, sistem politik dan ekonomi, yang telah tumbuh menjadi sistem kekuatan dan kekuasaan progresif dan multiplikatif, semua itu akarnya terletak pada eksistensi manusia ini di dalam sejarah

semesta. Manusia sendirilah, yang dalam era *Aufklärung* pertama-tama telah menempatkan pengetahuan sebagai kekuatan di luar manusia, bahkan manusia terperangkap ke dalam dalil: manusia untuk pengetahuan. Dan di sini sebenarnya pertanyaan mendasar muncul: Manusia untuk ilmu? Manusia untuk falsafah? Manusia untuk agama dan theologi? Manusia untuk teknologi? Manusia untuk sistem politik dan ekonomi? Ataukah sebaliknya: bahwa semua itu adalah dari manusia oleh manusia dan untuk manusia serta kemajuan semesta.

Di sini kiranya dapat ditarik satu kesimpulan, dalam rangka membangun synthesis kreatif, bahwa konsentrasi perlu dipusatkan pada manusia; pemahaman mendasar mengenai eksistensi manusia, dengan segala dimensinya, dengan segala masalah, kemungkinan dan perkembangannya untuk menjadi potensi destruktif atau potensi konstruktif, perlu diletakkan sebagai landasan suasana mendasar bersama. Manusia yang di masa lampau menjadi sumber suasana yang serba kompetisi, perebutan dominasi, serba dikotomi dan karena itu berjalan secara satu dimensional dalam langkah dialektika negatif, sesungguhnya dapat menjadi manusia yang membangun suasana yang serba kebersamaan, keterjalinan, komunikasi, dan tidak dalam rangka perebutan dominasi, melainkan saling memberi sehingga dapat berjalan dalam suasana pluri-dimensional dan dalam langkah dialektika positif.

Itulah mungkin salah satu kesimpulan yang dapat kita tarik dari refleksi kita atas perjalanan abad XX sebagai perjalanan kebudayaan.

Dalam rangka itu, maka kita mungkin perlu mengakhiri gelombang era *Aufklärung*

I dan menyambunginya dengan gelombang era *Aufklärung II*. Bila *Aufklärung I* dilandaskan pada motivasi perebutan dominasi pada pengetahuan, ilmu, teknologi, politik dan ekonomi maka dalam *Aufklärung II* umat manusia kiranya dapat membangun suatu zaman yang makin dilandasi oleh kesadaran akan eksistensinya sebagai manusia. Ini tidak berarti kita akan berhenti mengembangkan pengetahuan: berhenti mengembangkan filsafat, ilmu, theologi, ideologi dan teknologi; berhenti membangun sistem politik, ekonomi, masyarakat, dan kemajuan. Tetapi pengembangan semua itu dalam konteks manusia dan kemanusiaan.

Apabila menempatkan segala sesuatunya dalam konteks aktualisasi manusia dan kemanusiaan (yang merupakan eksistensi yang evolutif, dialektikal dan kreatif) berarti menempatkan segala sesuatunya dalam konteks kebudayaan, maka era *Aufklärung II*, yang diharapkan akan mewarnai abad XXI dan seterusnya, semogalah menjadi *the Era of Culture*: Era Kebudayaan. Untuk membantu gerak gelombang *Aufklärung II* ini, dunia falsafah dapat memberikan sumbangan mendasar. Antara lain dengan usaha mengembangkan Epistemologi Baru dan Ontologi Baru (yang kreatif, dinamis, terbuka) berdasarkan atas pemahaman mendasar terhadap eksistensi manusia. Atas dasar Epistemologi dan Ontologi yang basisnya adalah pemahaman mendasar kreatif terhadap eksistensi manusia, maka dapat dibangun Etika Pribadi maupun Etika Sosial. Dengan demikian pemahaman mendasar mengenai manusia dan kemanusiaan itu dapat tumbuh tidak saja sebagai pemikiran melainkan juga menemukan wujud-wujud strukturalnya.

Dalam rangka ini pula, apabila salah satu permasalahan yang digerakkan oleh gelombang *Aufklärung I* itu adalah kekuasaan

(*forces powers*), maka dalam *Aufklärung II* tugas umat manusia adalah bergumul untuk membudayakan berbagai kekuatan dan kekuasaan alam, sejarah maupun masyarakat. Proses ini dapat didukung dengan usaha komunikasi interdisipliner, pertemuan kefilosofatan secara aktual, serta pengembangan *comparative-philosophy*. Hal ini dapat membantu menciptakan iklim di mana umat manusia membangun konsensus-konsensusnya. Inilah langkah yang kiranya perlu ditempuh oleh umat manusia. Kegagalan da-

lam hal ini akan berarti kembali atau tetap berada di dalam suasana *Aufklärung I*, yang salah satu muaranya adalah benturan-benturan, permusuhan, pertarungan, dan perang skala besar. Saya tidak tahu apakah umat manusia masih memerlukan pengalaman yang lebih dahsyat lagi daripada Perang Dunia II, untuk dapat melangkah bersama secara teguh menaiki tangga gradasi evolusi kultural menuju kualitas kemanusiaan yang lebih tinggi lagi dengan melahirkan wujud-wujudnya secara struktural pula.

Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Martabat dan Kualitas Manusia di dalam Persaingan Global

Ginandjar KARTASASMITA

Pendahuluan: Teknologi Pembawa Perubahan

KITA menyaksikan dunia sedang dilanda arus perubahan besar, yang telah dan akan membuat konsep-konsep lama mengenai tata hubungan antar bangsa menjadi usang di samping akan berkembang pandangan-pandangan baru. Arus ini didorong oleh kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat dalam abad ke-20 yang segera akan kita lalui.

Banyak orang menyimpulkan bahwa suatu era segera akan selesai dilalui, yaitu era industri, dan manusia sekarang sedang memasuki era baru, yaitu era informasi. Proses perubahan yang sekarang berlangsung dikatakan sebagai proses transformasi masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, yaitu suatu masyarakat yang kehi-

dupan dan kemajuannya sangat dipengaruhi oleh penguasaan atas informasi.

Sejarah manusia mencatat evolusi teknologi yang mengubah peradaban manusia dari satu zaman ke zaman lainnya. Evolusi teknologi melahirkan evolusi kebudayaan dan peradaban, dari manusia gua ke masyarakat pemburu yang mengembara, ke masyarakat agraris dan akhirnya ke masyarakat industri.

Perkembangan teknologi di abad ke-20 ini tampaknya sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai evolusi, karena yang terjadi adalah lompatan-lompatan besar jauh ke muka dalam tempo yang dalam konteks sejarah peradaban manusia adalah sangat singkat. Beberapa terobosan (*breakthrough*) teknologi telah membawa manusia melaju ke suatu masa depan yang manusia sendiri belum dapat menggambarkan secara pasti arah dan batasan-batasannya, karena demikian luasnya kemungkinan-kemungkinan yang terbuka.

Kemampuan manusia menghasilkan dan mengendalikan energi telah mengubah jang-

Makalah ini telah disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPHIS) tanggal 16-21 Juli 1990 di Yogyakarta.

kauan manusia atas apa yang mampu dilakukannya. Misalnya, teknologi nuklir dan teknologi yang menghasilkan daya dorong yang mampu menembus perangkap gravitasi sehingga membuka cakrawala baru bagi umat manusia.

Teknologi pertanian telah menghasilkan revolusi hijau dan membuat usang konsep keterbatasan lahan, sehingga masalah pangan tidak lagi menjadi kekhawatiran dunia.

Teknologi material memungkinkan manusia membuat bahan yang tahan tekanan, tahan suhu (panas atau dingin) yang memungkinkan manusia melangkah lebih maju lagi dalam teknologi transportasi maupun industri. Di sini dapat disebutkan pula kemajuan besar dalam membuat logam-logam paduan, bahan-bahan sintetik, dan teknologi optik.

Teknologi biologi (bio teknologi) menunjang upaya manusia untuk tidak tergantung pada ruang sebagai kendala kehidupannya, membuat produksi pangan lebih mudah dan murah, membuat orang berumur panjang, bahkan mungkin akan dapat merekayasa manusia masa depan kalau itu dikehendaki.

Namun dari kesemuanya itu, yang berdampak sangat luas dan menjadi pendorong transformasi budaya yang kuat serta sekarang sedang berlangsung adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang memanfaatkan terobosan di berbagai disiplin ilmu dan teknologi, tetapi terutama ditunjang oleh perkembangan teknologi elektronika dan informatika.

Dengan tidak mengabaikan berbagai faktor lainnya, dapat dikatakan revolusi informasi dan komunikasi yang terutama terjadi dalam belahan kedua abad ke-20 inilah, yang mempengaruhi kecenderungan perubahan mendasar dalam kehidupan manusia

yang salah satu aspek di antaranya adalah kecenderungan globalisasi.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka dunia menjadi sempit, ruang dan waktu menjadi sangat relatif, dan dalam banyak hal batas-batas negara sering menjadi kabur bahkan mulai tidak relevan. Tirai-tirai yang membatasi satu bangsa dengan bangsa lain mulai tersingkap bahkan mulai terhanyut oleh perubahan.

Proses ini masih berlangsung terus. Kita belum tahu sampai di mana dan setelah itu apa. Namun pasti tidak ada manusia yang luput dari pengaruhnya. Kalau ia pandai memanfaatkan kesempatan dan ikut melaju dalam arus ini, ia akan dapat ikut menikmati. Kalau tidak, maka akan ditinggal atau bahkan akan terhempas, sehingga baginya arus perubahan ini bukan membawa kemanfaatan tetapi malah kehancuran. Sebab itu sungguh baik kalau kita pun mengikuti perkembangan ini dengan seksama, supaya yang kita peroleh adalah faedah dan bukan musibahnya.

Indikasi Era Global

Revolusi teknologi seperti telah dikemukakan telah membangkitkan kekuatan besar yang mendorong terjadinya perubahan mendasar. Dalam tata-hubungan antar bangsa, antara lain merangsang terjadinya kecenderungan globalisasi.

Bagaimanakah kita bisa melihat tanda-tanda sedang berlangsungnya proses itu? Atau melalui gejala-gejala apakah proses globalisasi itu terwujud?

Meredanya ketegangan dunia merupakan salah satu hasil dari perkembangan tersebut. Perkembangan keadaan ini diakibatkan oleh berbagai hal, antara lain:

- Kemajuan teknologi persenjataan telah menghasilkan senjata-senjata penghancur yang melebihi kebutuhan untuk hanya menghancurkan musuh, dan akan membawa akibat hancurnya diri sendiri. Maka semua pihak tidak menghendaki terjadinya Perang Dunia III, yang akan mengakhiri peradaban manusia seperti yang kita kenal sekarang.
- Kemajuan ekonomi yang dihasilkan kemajuan teknologi di negara-negara Barat dan kegagalan sistem komunisme untuk mengembangkan inisiatif yang dapat menghasilkan inovasi teknologi dan kreativitas usaha, membawa kebangkrutan ideologi komunisme dan membuat mereka berpaling pada sistem yang telah terbukti berhasil. Karena komunis Rusia mempelopori gerakan ini, maka negara komunis lain tidak berdaya menahannya.
- Gejala terakhir ini didorong oleh dahsyatnya arus informasi yang tidak bisa dibendung oleh dinding-dinding penghalang yang dibangun untuk mencegah masuknya pengaruh luar. Negara-negara komunis tidak dapat menutup mata atas kenikmatan hidup hasil kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara Barat. Manakala sistem komunis tumbang di satu negara, negara komunis lain bagaimanapun tidak berdaya mencegah masuknya informasi mengenai apa yang terjadi di negara lain itu.

Sebagai akibatnya, ideologi tidak lagi menjadi relevan sebagai tolok ukur utama hubungan satu negara dengan negara lainnya. Ukuran yang menjadi paling menonjol adalah ekonomi, yaitu apa hasil nyata yang akan diperoleh dari hubungan itu.

Di lain pihak, kesadaran politik baru telah muncul menggantikan dogma-dogma ideologi dan mempengaruhi sikap politik

orang atau negara kepada orang atau negara lainnya. Misalnya masalah hak-hak asasi manusia. Orang atau negara Barat sama sekali tidak akan ragu-ragu mengecam negara lain apabila terjadi apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, apakah itu negara komunis atau negara yang dalam konstelasi lama adalah sahabat atau teman sekubunya.

Dambaan akan kebebasan dan hal-hal individu serta keinginan untuk menegakkan demokrasi memacu perubahan politik di banyak negara. Rezim-rezim otoriter apa pun warna politiknya tumbang satu per satu dilanda arus perubahan ini.

Dampak yang sangat besar pula akan terjadi dalam kehidupan sosial budaya manusia. Arus informasi dan komunikasi telah membuat makin globalnya berbagai nilai budaya. Contoh sederhana: celana *jean*, *mickey mouse*, musik *jazz* dan *rock*, dan *coca cola* sudah menjadi "budaya dunia". Sedang tumbuh "budaya lain" baru seperti *chopstick*, *kentucky fried chicken*, *sushi*, *noodle*, yang tadinya jenis makanan yang sangat lokal (atau nasional) sekarang telah menjadi internasional. Bayangkan saja ratusan juta manusia di seluruh dunia pada saat yang sama berada di muka layar televisi untuk melihat pertandingan sepak bola. Dari satu medium saja bisa kita bayangkan betapa makin mendekatnya manusia satu sama lain.

Secara lebih mendalam kita saksikan betapa telah terjadi interaksi dan intrusi budaya yang sangat intensif yang menjurus ke arah terciptanya nilai budaya universal di atas yang secara tradisional kita kenal. Saat ini sedang tercipta sistem-sistem nilai global yang berlaku di mana-mana.

Keterbukaan juga membawa akibat ne-

gatif dari membiarkannya dengan leluasa berbagai penyakit sosial, seperti masalah narkoba yang semula merupakan masalah lokal telah menjadi masalah internasional.

Dalam hiruk pikuknya teknologi maka individu yang selama ini, dengan etos kerja industri, menjadi tersedot ke belakang, telah muncul kembali. Di banyak negara maju, orang sudah tidak mau lagi bekerja melebihi yang diperlukan. Kerja lembur selalu ingin dihindari. Hari libur makin panjang. Pesawat-pesawat terbang penuh mengangkut wisatawan, dan pariwisata sudah tidak pakai musim lagi, karena memang musimnya sudah seluruh tahun.

Manusia tidak ingin lagi disebut sebagai makhluk ekonomi. Ia ingin mencari identitas. Ia mendambakan kualitas. Kesadaran yang meluas akan lingkungan dilahirkan oleh semangat yang baru ini. Orang mulai bertanya apakah semuanya itu seimbang dengan pengorbanannya.

Teknologi memungkinkan terjadinya proses perubahan dalam sikap manusia itu. Persoalannya bukan lagi menyediakan peralatan produksi yang lebih efisien bagi manusia, tetapi menggantikan secara progresif pekerjaan manusia dalam industri dengan mesin-mesin yang mampu memberi informasi, yang kemudian akan mampu memproduksi dengan lebih cepat dan lebih murah, dan yang juga mampu membuat pekerjaan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh manusia. Perubahan ini membawa pergeseran kepada bentuk pekerjaan manusia. Walaupun keterlibatan manusia dalam produksi menjadi kecil, revolusi teknologi melahirkan berbagai lapangan kerja baru, yang mendukung teknologi yang dilandasi informasi.

Transformasi besar ini jelas membawa

perubahan pada pola hidup manusia. Cara kerja manusia akan berubah. Manusia akan lebih aktif dalam memanfaatkan, menanam dan memperdalam kapasitas individunya. Ia makin ingin menampilkan nilai-nilai manusiawi dan identitas budayanya. Manusia lebih punya banyak waktu untuk dirinya sendiri.

Akhirnya, tidak dapat kita hindari untuk menyimpulkan bahwa berbagai kecenderungan itu berawal dan berujung di bidang ekonomi. Kecenderungan-kecenderungan globalisasi dalam bidang ekonomi tercermin atau berdampak sekurang-kurangnya pada tiga aspek: (a) Keterbukaan; (b) Persaingan; dan (c) Pendekatan (integrasi).

Derasnya arus informasi dan lancarnya komunikasi yang mengantarkan manusia, barang, jasa dan data, telah menyebabkan makin terbukanya ekonomi dunia. Keterbukaan ini memperlancar arus perdagangan, investasi, informasi dan teknologi yang membawa keuntungan bagi yang terlibat di dalamnya. Kemajuan ekonomi dunia tercatat paling cepat adalah di negara-negara yang ekonominya terbuka. Negara-negara yang ekonominya tertutup justru paling ketinggalan dan tidak menikmati arus perubahan yang membawa berbagai kemungkinan dan kesempatan itu.

Negara-negara sosialis yang sistem ekonominya tertutup akhirnya menyadari hal itu dan sekarang telah membuka ekonominya. Negara-negara yang memproteksi ekonominya secara ketat seperti Jepang dan Korea, juga telah mulai membukanya meskipun prosesnya tidak secepat seperti yang diinginkan banyak orang.

Keterbukaan ini diperhebat lagi oleh peralatan komunikasi dan informasi yang tersedia bagi dunia bisnis yang makin lama

makin canggih. Dengan telpon atau faximile orang bisa mengadakan transaksi kapan saja dan di mana saja. Dengan sistem informasi yang saling tersambung, segala data dapat tersedia bagi siapa pun yang turut andil di dalamnya. Sistem digital yang merupakan perubahan terhadap sistem komunikasi analog membuat arus informasi menjadi lebih lancar. Data dapat diolah dan disimpan dalam mesin-mesin yang makin kecil dan makin berkekuatan tinggi. Perubahan kurs dan perubahan harga komoditas dan harga saham dapat diikuti setiap saat.

Keterbukaan serupa ini membangkitkan persaingan yang makin ketat. Agar suatu bangsa dapat selamat (*survive*) dalam sistem ekonomi yang terbuka, ia harus mampu bersaing. Supaya dapat "survive" orang bukan hanya harus mampu menyediakan barang dan jasa yang mampu bersaing, tetapi juga harus menguasai informasi mengenai pasar, mengenai saingannya, bahan baku, teknologi, transportasi, dan segala aspek yang mempengaruhi daya saingnya.

Dengan demikian persaingan sering dilihat sebagai hantu yang menakutkan. Terutama persaingan antara produsen kecil dengan produsen besar, antara produsen besar dengan perusahaan multinasional, antara negara berkembang dengan negara maju. Memang ada benarnya. Dalam hal seperti itu, apabila yang lebih lemah itu kalah bersaing, maka ia kalau tidak mati umumnya lantas dicaplok atau tunduk kepada yang lebih kuat daya saingnya.

Sebaliknya persaingan tidak selalu harus menakutkan. Di satu pihak, perkembangan teknologi itu sendiri memungkinkan berkembangnya pembagian pekerjaan di antara bangsa-bangsa secara alamiah. Misalnya, negara-negara maju sudah mulai meninggal-

kan industri yang sudah tidak menguntungkan baginya, karena biaya upah yang tinggi, skala ekonomi yang kecil, atau karena biaya pengamanan lingkungan yang terlalu mahal. Pekerjaan serupa ini dapat dilakukan secara lebih ekonomis oleh negara-negara berkembang.

Itu merupakan langkah pertama bagi negara berkembang, yang tujuannya tidak lain adalah untuk selamat dulu dalam suasana persaingan global. Langkah berikutnya barulah melaksanakan kegiatan yang berkeadilan teknologi lebih tinggi, yaitu industri-industri yang bernilai tambah besar. Berikutnya lagi, ia mengejar ketinggalannya untuk makin menyamai negara maju.

Persaingan itu sendiri bagi sebuah negara membawa hikmah. Bangsaanya menjadi harus bekerja lebih keras, harus menguasai teknologi yang lebih maju, harus lebih efisien dan lebih produktif. Maka, persaingan tidak ubahnya sebagai cambuk untuk memajukan diri. Karena tanpa itu, ia tidak bisa keluar dari belenggu keterbelakangan dan kemiskinan.

Keterbukaan dan persaingan melahirkan gejala yang banyak menjadi perhatian dewasa ini, yaitu pendekatan atau pengintegrasian ekonomi yang berlangsung di berbagai bagian dunia. Pengintegrasian ini bertujuan ganda. Pertama, ia ingin lebih membuka dan secara demikian menerima persaingan, yaitu dengan dihilangkannya barikade-barikade seperti bea cukai, perbedaan mata uang dan sebagainya. Di lain pihak, pengintegrasian ini diharapkan dapat melindungi negara-negara tersebut terhadap persaingan dari negara-negara di luar kelompoknya.

Pendekatan seperti ini tampaknya telah menjadi kecenderungan yang melahirkan regionalisme. Yang paling menonjol adalah

Masyarakat Ekonomi Eropa. Juga pendekatan antara Amerika Serikat dengan Kanada. Kita sendiri di ASEAN telah merintisnya. Bahkan sekarang sedang dikembangkan konsep untuk bersama-sama memajukan kawasan Asia-Pasifik.

Kawasan Asia-Pasifik oleh banyak ahli diramalkan sebagai kawasan masa depan. Negara-negara di kawasan telah menunjukkan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis, dan mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi. Kawasan ini mempunyai keuntungan memiliki sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan (*sustainable*) untuk jangka panjang. Dalam konteks sejarah, orang melihat pergeseran pusat-pusat pertumbuhan, dari Asia ke Eropa, dari Eropa ke Atlantik, dan di masa depan diperkirakan akan bergeser ke Asia-Pasifik, sehingga akhirnya bulatlah dunia ini dikitari.

Indonesia merupakan negara yang penting di kawasan ini. Yang menjadi tantangan adalah seberapa jauh kemampuan memanfaatkan berbagai kesempatan itu bagi kepentingan rakyat kita.

Proses globalisasi dan pengelompokan ini tidak hanya terjadi antara negara-negara, tetapi dalam bisnis juga persaingan melahirkan penguasaan atas perusahaan atau bidang usaha lain. *Merger* dan konglomerasi memperkuat daya tahan terhadap fluktuasi pasar. Untuk menghindari proteksionisme baik yang terbuka maupun terselubung banyak perusahaan menanam modal di negara lain. Perusahaan-perusahaan seperti IBM, Shell, British Petroleum, General Motor, ABB, adalah perusahaan multinasional yang kepalanya melintasi batas-batas negara. Honda dan Sony yang dijual di Amerika

adalah buatan Amerika. Sebaliknya Carter Pillar sudah mulai dibuat di Jepang.

Proses Globalisasi dan Pengaruhnya pada Indonesia

Sebagai akibat gelombang perubahan global tersebut dalam dekade 1990an ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan perubahan yang akan besar dampaknya pada kehidupan bangsa kita. Kita telah sepakat untuk menganut sistem politik bebas aktif dan mempunyai komitmen terhadap perdamaian dan keadilan di dunia, dan ber tekad menjadi anggota masyarakat bangsa-bangsa yang terhormat. Sistem politik kita membuat Indonesia menjadi negara yang terbuka. Di bidang ekonomi kita menjalankan model ekonomi terbuka yang antara lain dicirikan oleh perdagangan bebas dan berorientasi pasar, tidak ada pembatasan arus moneter, penanaman modal asing kita terima dan undang secara tulus-ikhlas, dan ciri kebebasan lainnya.

Kita menyaksikan bahwa sistem ekonomi tersebut telah membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Manfaat ini tampak nyata bila prestasi ekonomi sejak Pelita I dibandingkan dengan masa sebelumnya. Namun di samping manfaat yang kita nikmati, sistem ekonomi terbuka juga membawa implikasi bahwa pengaruh luar dapat cepat sekali masuk ke Indonesia. Beberapa pengaruh itu dapat bersifat negatif, misalnya produsen kita harus bersaing dengan produsen luar negeri dan modal mudah sekali berpindah. Dalam ekonomi terbuka, memang kita memperoleh pasar yang lebih luas daripada hanya pasar kita sendiri. Tetapi konsekuensinya pasar kita pun menjadi bagian dari pasar dunia.

Dengan perkembangan teknologi maka sumber daya alam tidak lagi terlalu dominan dalam kehidupan ekonomi. Teknologi daur ulang memungkinkan barang dipakai terus-menerus. Teknologi yang memungkinkan pengembangan barang substitusi apabila barang tersebut harganya menjadi terlalu tinggi, atau dikhawatirkan dikuasai monopoli, atau terancam habis. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang selama ini menjadi modalnya yang paling utama dengan itu tidak dapat lagi mengandalkan diri hanya sebagai produsen sumber daya alam semata-mata.

Lagi pula sumber daya alam yang kita miliki pun tidak terlalu melimpah ruah. Apabila bidang pertanian dan kehutanan tidak dijaga dengan baik, kekayaan alam ini akan terkejar oleh pertambahan penduduk dan kebutuhan yang meningkat. Di bidang pertambangan kita memiliki kekayaan yang cukup, tetapi diperlukan biaya pengembangan yang besar. Bahkan mineral seperti timah yang untuk waktu lama menjadi salah satu tumpuan ekonomi kita dalam waktu 20 tahun mungkin sudah akan habis.

Yang paling menjadi masalah sebenarnya adalah ketersediaan energi. Minyak bumi sebagai sumber energi utama ($\pm 60\%$ dari seluruh kebutuhan energi) tidak akan terlalu lama kita miliki. Bahkan dengan tingkat produksi dan penemuan cadangan baru seperti sekarang, dikhawatirkan dalam waktu 10 tahun kita sudah menjadi pengimpor netto (*net-importer*) minyak bumi. Kita memiliki gas cukup banyak, tetapi itu pun ada batasnya. Batubara merupakan harapan terbesar, cadangan kita bisa memenuhi kebutuhan untuk ratusan tahun. Namun kita juga menyadari bahwa membakar batubara berarti mengeluarkan CO_2 di samping gas pencemar lainnya, yang dapat meng-

ganggu mutu lingkungan. Maka ada ambang batas banyaknya batubara yang bisa kita bakar, sehingga sejak sekarang kita harus menyiapkan diri untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi nuklir.

Persoalan energi yang mendesak bagi kita adalah ketersediaan minyak bumi. Harus diusahakan untuk menunda masa harus mengimpor minyak bumi sejauh mungkin, sampai ekonomi kita cukup kokoh untuk itu. Sebab biaya impor minyak bumi akan sangat membebani ekonomi, apalagi pada saat harga minyak bumi menjadi tinggi karena kelangkaan.

Di samping kemampuan ekonomi untuk memikul biaya impor itu, juga kita harus mengembangkan kemampuan teknologi untuk mengembangkan energi alternatif yang bersumber dari dalam negeri secara bersaing dan efisien.

Tantangan teknologi dan tantangan persaingan merupakan masalah yang harus kita jawab sejak sekarang, kalau kita ingin memajukan bangsa ini setara dengan derajat dan martabatnya. Kalau kita ingin mempertahankan kemerdekaan dalam pengertiannya yang sejati, yaitu kemandirian dan kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi diri kita sendiri.

Martabat dan Mutu Manusia Indonesia dalam Kancah Persaingan Global

Dari berbagai pembahasan di atas tersimpul bahwa bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari gelombang perubahan besar yang sedang melanda dunia. Alternatifnya adalah bangsa kita ikut melaju di atasnya atau tenggelam di dasarnya.

Di atas telah diuraikan pula bahwa sumber daya alam sudah menjadi lebih kecil peranannya sebagai faktor keunggulan untuk persaingan. Yang lebih menonjol adalah teknologi. Dan teknologi adalah hasil akal budi manusia.

Maka jelas faktor manusialah, yang akan paling menentukan berhasil atau tidaknya kita tumbuh dalam persaingan ini sebagai negara yang makin kokoh dan makin maju. Sejak semula memang demikian paham kita, karena 25 tahun yang lalu kita sudah menyatakan bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia. Dan yang membedakan kemampuan satu orang dengan orang lain atau satu bangsa dengan bangsa lain adalah kualitasnya. Jelas pulalah bahwa tema pembangunan kita selanjutnya adalah membangun kualitas manusia Indonesia. Ini pun telah menjadi kesepakatan kita, seperti dicerminkan dalam GBHN 1988.

Sekarang yang menjadi masalah adalah kualitas manusia yang bagaimana dan bagaimana caranya membangun manusia serupa itu. Untuk itu ada baiknya kita meninjau kualitas manusia dan masyarakat kita sekarang ini, khususnya dari segi yang kita anggap merupakan faktor penghambat.

- a. Penduduk Indonesia yang besar jumlahnya, yang seharusnya menjadi modal dasar berharga, belum efektif betul.
- b. Struktur masyarakatnya masih berpola agraris, hanya di daerah perkotaan telah mulai berkembang budaya industri.
- c. Sebagai akibatnya masyarakat banyak masih berpikir tradisional, belum terdorong untuk bekerja terlalu keras, tidak terlalu disiplin, lebih emosional daripada rasional, tidak terdorong untuk berprestasi tinggi.

d. Tingkat pendidikan pada umumnya masih rendah. Pada tahun 1988 survei angkatan kerja menunjukkan bahwa 78,4% penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas berpendidikan maksimum SD, 11,5% SMTP, 8,9% SMTA, dan hanya 1,2% akademi dan perguruan tinggi. Di samping tingkat pendidikan yang masih rendah, sistem pendidikan kita juga belum mengacu pada kebutuhan masa depan. Pendidikan kita belum menyiapkan manusia Indonesia yang bernaluri teknologi.

Maka secara umum tantangan yang kita hadapi adalah tantangan budaya, karena yang harus kita bangun dan rombak adalah budaya. Maka mengimbangi revolusi teknologi perlu ada revolusi budaya.

Kita acap kali berlandung di balik kata-kata "memelihara budaya leluhur kita" dalam mempertahankan *status quo*, karena perubahan sering kali dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita sering mengacaukan sikap santai sebagai sikap hati-hati, atau ketidakmampuan mengambil keputusan sendiri dengan semangat musyawarah, atau sikap mengambil inisiatif sebagai perwujudan individualisme yang merupakan anathema dalam masyarakat kita karena dianggap bertentangan dengan asas kegotongroyongan. Sikap tenggang rasa sering kali dijadikan alasan untuk tidak berani bertindak tegas dan mengambil keputusan yang diperlukan tetapi tidak populer.

Masyarakat yang mempunyai ciri serupa itu jelas akan sulit bertahan, apalagi mampu muncul sebagai pemenang dalam persaingan modern. Sikap-sikap itu harus dirombak, dan harus ditumbuhkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Jelas secara budaya kita tertinggal jauh, dan untuk

mengejanya kita harus melompat-lompat dan mencari jalan pintas.

Di lain pihak, kita juga menyadari perombakan budaya yang ingin kita lakukan tidak perlu bersifat total. Bahkan ada nilai-nilai yang ingin kita pertahankan, yang kita yakini tidak lekang karena panas atau lapuk karena hujan. Kita memiliki nilai-nilai yang bersifat lestari dan tidak mengganggu proses kemajuan dan modernisasi bangsa, nilai-nilai yang mencerminkan martabat manusia yang ingin kita pertahankan dan junjung tinggi. Kita tidak ingin mengikuti kesalahan bangsa lain yang dalam upaya mengejar kemajuan telah mengabaikan aspek kemanusiaan dan menempatkan manusia hanya sebagai bagian dalam proses produksi. Kita tidak ingin martabat manusia Indonesia menjadi merosot, sehingga bangsa ini kehilangan jati dirinya sebagai manusia dan khususnya sebagai manusia Indonesia.

Pasti tidak mudah menemukan takaran yang pas dalam menggerakkan proses perubahan nilai itu. Karena dinamika perubahan keadaan menghasilkan tantangan-tantangan yang terus berubah, maka ukuran-ukuran pun berubah pula. Inilah salah satu tantangan besar yang kita hadapi, terutama para ahli ilmu sosial, yaitu memelihara obor yang cukup terang agar proses perubahan budaya itu berjalan lancar tanpa salah arah.

Sebenarnya pandangan ini sudah lama kita miliki dan kita tetapkan sebagai arah yang kita tempuh. Dalam GBHN dikatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional perlu terus-menerus diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya rasa tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan pembangunan: seperti sikap mandiri

dalam kebersamaan, tenggang rasa, musyawarah untuk mufakat, berwawasan masa depan, kerja keras, jujur dan ksatria, hemat, cermat, sederhana, tertib, menghargai waktu serta penuh pengabdian. Khususnya perlu ditumbuhkan sikap budaya yang mendukung upaya pembaruan, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan pranata-pranata sosial yang dapat mendukung proses pemantapan budaya bangsa.

Tantangan kita adalah bagaimana mewujudkan petunjuk-petunjuk itu. Jelas upaya pendidikan merupakan jalur yang paling penting bagi proses perubahan yang kita inginkan itu. Ini memang pekerjaan yang besar, yang memerlukan wawasan dan juga komitmen. Yang dimaksud pendidikan bukan hanya yang formal melainkan juga yang nonformal. Seluruh masyarakat harus terlibat di dalamnya, baik sebagai penggerak, wahana, media maupun sasaran. Semua lembaga dan daya yang ada di masyarakat harus diikutsertakan, dikerahkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Penutup

Persaingan global yang didorong dan dilandasi oleh kemajuan teknologi, mewajibkan kita untuk menyiapkan bangsa agar mampu memanfaatkan momentumnya dan justru tidak tenggelam oleh karenanya.

Tata hubungan dunia yang baru hasil revolusi teknologi dan kesadaran kemanusiaan secara global harus kita ikuti dengan perubahan sikap dan budaya, yang memungkinkan bangsa Indonesia mempertahankan

martabatnya di antara bangsa-bangsa di dunia.

Kalau disederhanakan ada dua ciri pokok dalam manusia Indonesia masa depan yang ingin kita bangun, yaitu: (a) Manusia yang memiliki idealisme yang kuat; (b) Ma-

nusia profesional yang mampu memberi sumbangan berarti bagi masyarakatnya.

Dengan sendirinya sebagai orang beragama, sesuai dengan asas Pancasila, haruslah pula manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhannya.

Pembangunan Kualitas Manusia dan Masyarakat dalam Ilmu Hukum

Satjipto RAHARDJO

TULISAN berikut mencoba menyusun suatu persepsi dari sudut ilmu sosial terhadap tingkat perkembangan pemikiran mengenai hukum dewasa ini, khususnya dalam hubungan dengan masalah rekayasa kualitas manusia dan masyarakat.

Selama lebih kurang 70 tahun pengusahaan ilmu hukum di negeri ini, yaitu sejak pendirian pendidikan tinggi hukum di masa penjajahan (1922), sampai dengan masa kemerdekaan, analisis yuridis merupakan cara yang dominan dalam studi hukum. Akan tetapi, sejak sekitar tahun 1970an, mulai terjadi pemikiran kembali, dengan munculnya ancangan sosial atau sosiologis dalam studi hukum itu.

Sebetulnya apa yang disebut ancangan sosial tersebut hanya merupakan pintu bagi masuknya berbagai ancangan lebih spesifik, yang bukan bersifat sosiologis semata melainkan juga anthropologis, ekonomis, poli-

tis, psikologis, dan lain-lain. Singkat kata, hukum sebagai institusi penting dalam masyarakat ingin ditempatkan pada kedudukannya yang mendekati keluasan jangkauannya, dan demikian lebih mendekati kebenarannya.

Etnosentrisitas dan Eurosentrisitas Hukum Modern

Apabila kita menengok pada perkembangan pemikiran dalam dan mengenai hukum, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa hukum adalah institusi yang *netral*. Selalu saja kita menyaksikan, betapa hukum itu mengalami *penggunaan* oleh kekuatan dalam masyarakat, untuk tujuan yang satu atau yang lain.

Pada saat bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia, bahwa ia bertekad menjadi bangsa yang merdeka dan mendirikan suatu negara dalam bentuk republik, maka pada saat yang sama pula ia memilih untuk membangun kehidupan baru berdasarkan hu-

Makalah ini telah disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPHIS) tanggal 16-21 Juli 1990 di Yogyakarta.

kum. Pada bulan Agustus, tahun 1945 itu, hukum yang disebut dalam Undang-Undang Dasar sudah berumur ratusan tahun. Secara sepintas lalu ingin saya katakan, bahwa pada saat bangsa kita memutuskan untuk menggunakan sistem kehidupan sosial berdasarkan hukum, sebenarnya pada saat itu acuan kita adalah (*sistem*) *hukum modern*, yaitu suatu tipe hukum yang di belakangnya memiliki sejarah panjang atau lama sekali. Dengan menyusun kehidupannya berdasarkan hukum, bangsa Indonesia tidak sekaligus menciptakan tipe hukumnya sendiri, melainkan (tinggal) memakai saja yang disebut hukum modern itu.

Mengapa Eropa harus menunggu ratusan tahun lamanya sebelum sampai pada hukumnya yang modern tersebut, memberi pelajaran kepada kita, betapa hukum modern itu tidak jatuh dari langit begitu saja, melainkan harus dibangun. Kita mengetahui, misalnya, hukum feodal pada abad XI adalah hukum yang sah dan cocok pula dipakai pada masanya. Hukum yang mengacu pada sistem hak dan kewajiban, yang dikaitkan dengan hubungan tuan dan hambanya serta para penyewa tanah yang kehidupannya tidak mandiri (Berman 1983 : 235; Poggi, 1978 : 16; Unger, 1976 : 147), adalah sistem yang mutakhir serta cocok pula untuk zamannya. Apabila, misalnya, orang pada waktu itu mencoba memakai dan menerapkan hukum modern sekarang ini, maka bisa dipastikan kehadiran hukum tersebut akan menimbulkan gangguan terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, tampak betapa perjalanan pembentukan hukum modern menyita waktu berabad-abad lamanya, yang apabila dimulai dari hukum dan masyarakat feodal saja, terdapat rentang waktu 800 tahun, sebelum sampai pada tipe negara konstitusi di abad XIX dengan sistem hukumnya yang rasional.

Perjalanan penciptaan hukum modern yang panjang demikian sebaiknya senantiasa kita pakai sebagai bahan pelajaran tentang betapa rumit perkaitan antara sistem hukum dengan masyarakatnya. Hukum modern harus menunggu sekian ratus tahun lamanya, sehingga masyarakat siap untuk menggunakannya.

Penggunaan hukum modern di negara-negara baru pada umumnya tidak mengalami tahap-tahap perkembangan yang sama dengan apa yang berlangsung di negara asalnya, yaitu Eropa. Hampir sama dengan pengalaman Indonesia, maka hukum modern merupakan suatu sistem hukum yang dimasukkan, didatangkan, atau dipaksakan dari *luar*. Perkembangan demikian sangat menarik untuk dipelajari, khususnya apabila kita menggunakan ancangan dan metode sosial.

Apabila di muka dikatakan, bahwa penggunaan sistem hukum modern pada masa feodal Eropa akan lebih menimbulkan gangguan daripada mendatangkan ketertiban dan keamanan, maka keadaan tersebut bisa kita saksikan di wilayah Asia Timur. Di Korea, misalnya, penggunaan hukum modern lebih menimbulkan persoalan daripada mengatur dengan baik. Seorang penulis yang mencoba menyuarakan keadaan tersebut mengatakan, bahwa untuk bangsa Korea sistem *Rule of Law* sebaiknya digantikan dengan sistem *Rule of Just Law*, yang berarti *Rule of Law* itu merupakan sistem yang tidak adil untuk bangsa Korea. (Pyong-Choon, 1971 : 211). Saya kutipkan sedikit di sini:

"Can a system of European legal concepts and values engraft itself upon a people with such a historical background? ... If the phrase "the Rule of Law" does not have a happy connotation in the cultural context of this country, we should not go

on repeating it in the hope that through dint of repetition a kind of social order that may be said to be under the Rule of Law will be established. It appears, therefore, that either the phrase or the cultural context must be changed. ..., we might propose the addition of such words as "just" or "truly democratic" before the word "law". Thus, the phrase would read "the Rule of Just Law", or "the Rule of Truly Democratic Law". It is not intended here to settle the phraseology once and for all. It is sufficient to point out the need for making the idea of "the Rule of Law" more meaningful to the ordinary Korean."

("Dapatkah sistem gagasan dan nilai-nilai hukum Eropa ditumbuhkan pada suatu bangsa dengan latar belakang kesejarahan demikian? ... Kalau gagasan "the Rule of Law" tidak mempunyai konotasi yang menyenangkan dalam konteks budaya negeri ini, seharusnya kita jangan terus mengulang-ulangnya dengan harapan bahwa melalui pengulangan maka jenis tata sosial yang dikatakan perwujudan the Rule of Law mungkin akan terbentuk. Oleh karena itu, tampaknya baik gagasan maupun konteks budaya haruslah diubah. ..., mungkin kita menyarankan penambahan kata-kata demikian seperti "just" atau "truly democratic" di depan kata "law". Jadi, gagasannya akan menjadi "the Rule of Just Law", atau "the Rule of Truly Democratic Law". Tidak maksudnya di sini untuk mengatasi masalah pengungkapannya saja. Cukuplah untuk menunjukkan kebutuhan membuat gagasan "the Rule of Law" menjadi lebih bermakna bagi rakyat Korea pada umumnya." Terjemahan dari redaksi.)

Keadaan yang tidak banyak berbeda juga terjadi di sini, pada bangsa kita, yang sejak mendirikan republik ingin membangun negaranya berdasarkan hukum, yang *nota bene* sekali lagi adalah sama dengan berdasarkan hukum modern. Pengalaman hukum yang berbeda dari apa yang "seharusnya" terjadi menurut hukum modern itu (lihat misalnya, Satjipto Rahardjo, "Tentang Perilaku Hukum Indonesia", *Suara Pembaruan*, 2 Februari 1989; juga studi Daniel S. Lev tentang "Kultur Hukum Indonesia yang Terkenal", dalam *Holt* (ed.), 1972).

Apa yang telah diuraikan di atas sebetul-

nya hal lumrah saja, yang juga akan terjadi pada bangsa Barat andaikata pola perjalanan sejarah berbeda, artinya bukan Barat mendominasi Timur melainkan sebaliknya. Juga pada waktu itu bangsa Barat akan bersusah-payah menyesuaikan perilakunya pada sistem hukum yang dipakai, yang *nota bene* datang dari Timur. Secara singkat bisa dikatakan, bahwa terdapat kualitas etnosentris, dalam hal ini *Eurosentrisitas* hukum modern.

Pemribumian dan Pengindonesiaan

Pemaparan di atas tak pelak lagi mendorong dunia ilmu pengetahuan di negara-negara berkembang untuk memberikan perhatian terhadap fenomena tersebut. Memang kalangan akademis telah mencoba menangkap, menjelaskan dan memahami keadaan yang demikian itu (lihat misalnya, Nonet dan Selznick, 1978; Marasinghe dan Conklin, 1984, dan tentu saja Pyong-Choon, 1971 yang telah dikutip di muka).

Suatu usaha menjajagi kemungkinan pengusahaan ilmu hukum yang berkualitas Indonesia pernah dilakukan dalam "Simposium Ilmu Hukum yang Bersifat Indonesia" pada tahun 1987. Dalam simposium yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro tersebut, dikemukakan berbagai masalah yang berhubungan dengan usaha mengisi struktur rasional hukum dengan data Indonesia. Demikianlah, misalnya, pembicaraan mengarah pada pengolahan data Indonesia ke dalam pembangunan hukum Indonesia, baik secara teoritis maupun untuk keperluan praktek hukum (Satjipto Rahardjo, 1987).

Di muka telah disinggung tentang digunakannya ancangan dan metode *sosial* dalam ilmu hukum di Indonesia, yang dimulai sekitar tahun 1970an. Ancangan dan analisis

sosial terhadap hukum ini membuka perspektif untuk melakukan pengkajian hukum secara lebih komprehensif dan dengan demikian memberikan dasar-dasar bagi pengintegrasian data Indonesia ke dalam pemikiran hukum.

Pikiran kritis mulai dilancarkan untuk menggugat universalitas dari konsep dan sistem yang selama ini dipakai. *Eurosentrisitas* konsep, seperti *Rule of Law* dipertanyakan, dan dengan demikian dibuka jalan untuk mengajukan pikiran-pikiran alternatif Indonesia. Dalam hubungan ini ada yang mencoba memberikan dorongan keberanian untuk mengajukan gagasan bahkan yang kurang lazim sekalipun, seperti dengan mengacu contoh yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat kebangkitan hukumnya (Rahardjo, 1987). Sekalipun pada waktu-waktu yang lalu, sampai ke masa Hindia-Belanda, kritik terhadap sistem Barat yang dipakai di negeri ini sudah dilontarkan, namun pikiran-pikiran kritis yang muncul pada masa kemerdekaan ini bisa dikatakan mempunyai arti tersendiri.

Yang dimaksud dengan mempunyai arti tersendiri di sini, adalah percobaan memasukkan atau mengintegrasikan gagasan-gagasan Indonesia ke dalam sistem hukum. Gagasan-gagasan ini bukan berupa pikiran yang masih abstrak, melainkan sudah dirumuskan secara formal ke dalam berbagai bentuk naskah, seperti Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Gagasan Indonesia tersebut kita temukan dalam kata dan ungkapan, seperti "kekeluargaan", "musyawarah-mufakat", "manusia seutuhnya", dan "keserasian-keseimbangan". Apakah data Indonesia seperti itu akan diizinkan berada di luar sistem hukum, ataukah harus kita integrasikan ke dalamnya?

Apabila diputuskan (dan sebaiknya demikian) untuk memasukkan semua itu ke dalam sistem hukum, tentunya diperlukan cukup banyak perubahan yang mendasar sifatnya. Seperti diutarakan di muka, sistem hukum yang disebut modern bukanlah suatu institusi rasional begitu saja, melainkan dibangun juga dari nilai dan asumsi yang bersifat *Eurosentris*. Konfigurasi hak rakyat yang dihadapkan kepada kekuasaan negara, misalnya, tumbuh dari suasana *Standestaat*, pada saat warga kota dihadapkan kepada dewan kota. Dengan demikian, situasi *konflik* mendasari bangunan sistem hukumnya. Tetapi bagaimana halnya apabila orang, misalnya, menggunakan wawasan *integralistik* dalam memandang hubungan antara rakyat dan negara? Saya kira, masalah-masalah seperti ini yang mendorong orang Korea membuat konsep tandingan yang disebutnya sebagai *The Rule of Just Law* itu. Membiarkan adanya "dualisme" dalam tubuh kenegaraan, yaitu sistem hukum di satu pihak dan data sosial di pihak lain, tentunya akan menimbulkan suasana tidak harmonis dalam manajemen hukum dan kenegaraan di Indonesia.

Rekayasa Kualitas Manusia Melalui Hukum

Orang memang layak menaruh kepercayaan kepada hukum dan dengan demikian memakainya untuk mencapai berbagai tujuan sosial. Secara khusus hal itu berlaku bagi bangsa Indonesia yang secara konstitusional menyatakan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah "berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata". Melalui otoritas dan kelengkapan yang ada padanya, hukum memang menjanjikan untuk menjadi sarana

yang terpercaya guna melakukan usaha rekayasa sosial.

Dalam tulisan ini ingin diajukan dua macam gagasan untuk melakukan rekayasa melalui hukum, keduanya mewakili tipe yang berbeda, yaitu:

1. Rekayasa hukum mulai dari sistem nilai sampai ke penjabarannya ke dalam hukum, dan
2. Rekayasa hukum dengan memanfaatkan peraturan hukum yang sudah ada, yaitu UU No. 4/1982 (UU tentang Lingkungan Hidup).

Tugas penting dan berat yang diterima oleh para sarjana hukum, adalah menciptakan masyarakat Indonesia baru yang didasarkan pada *Pancasila* melalui hukum. Suatu usaha besar yang sistematis ke arah itu sampai sekarang belum bisa dikatakan telah selesai. Usaha besar tersebut memang layak disebut rekayasa sosial oleh hukum *in optima forma*. Dikatakan demikian, oleh karena perekayasaan dimulai dari sumber nilai-nilai yang merupakan orientasi tertinggi dalam teknik pengaturan hukum, sehingga perekayasaan di sini dimulai dari pendayagunaan asas yang tertinggi (*ultimate*) dalam masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, *Pancasila* merupakan nilai yang demikian itu.

Salah satu pendapat yang bisa dikemukakan di sini adalah untuk menjabarkan *Pancasila* ke dalam postulat hukum terlebih dahulu, sebagai langkah sistematis memasukkan *Pancasila* ke dalam sistem hukum Indonesia. Mengaitkan *Pancasila* secara langsung kepada sistem hukum, apalagi kepada satu atau lain perundang-undangan, adalah menyederhanakan proses yang sebetulnya cukup panjang. Namun kita patut mengkhawatirkan, kalau dengan demikian prosesnya hanya akan menjadi suatu "upacara" belaka.

Postulat hukum yang diusulkan dan yang didasarkan pada *Pancasila* ini dimulai dengan membuat suatu deskripsi yang lebih jelas atau rinci mengenai bentuk-bentuk hubungan yang diinginkan dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada *Pancasila* itu. Di sini diharapkan, agar bisa lebih mudah menarik kaidah-kaidah hukum (*Rechts-satze*), dengan cara menyiapkan postulat hukum terlebih dahulu. Sekedar contoh, postulat hukum itu bisa berbunyi sebagai berikut (Rahardjo, 1987):

1. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang hendaknya bisa mengharapkan, bahwa orang lain akan memperlakukannya sebagai individu secara penuh.
2. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang bisa mengharapkan, bahwa ia akan menerima bagian dari produksi nasional yang memungkinkannya hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.
3. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang bisa mengharapkan, bahwa dirinya tidak akan diperlakukan secara diskriminatif.
4. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang bisa mengharapkan, bahwa ia tidak akan diganggu dan dihambat dalam penghayatan agamanya.
5. Dalam masyarakat *Pancasila*, setiap orang bisa mengharapkan, bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak diambil dengan mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh pendapat mereka yang akan terkena keputusan tersebut.

Munculnya kekayaan intelektual yang menentang pengintegrasian ke dalam sistem hukum, juga terjadi sebagai bagian dari perkembangan kehidupan sosial dan kenegaraan kita sendiri. Dalam proses perjalanan tersebut kita mulai mampu menghimpun sekian banyak konsep dan gagasan yang me-

miliki nilai penting dalam kehidupan kita mendatang. Sekali lagi menjadi pertanyaan, apakah sistem hukum akan membiarkan sekalian kekayaan itu berkembang begitu saja, tanpa menyadari, bahwa itu semua perlu dimasukkan secara sistematis ke dalam hukum?

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, konsep seperti *Manusia Seutuhnya* (GBHN: Arah Pembangunan Jangka Panjang), sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang bersungguh-sungguh dan diusahakan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum dan teori hukum. Apakah konsep tersebut tidak bisa dipakai untuk mengekspresikan sikap dan pikiran tentang bagaimana seharusnya hukum menghormati dan melindungi manusia sehingga "tetap utuh" itu? Selama ini yang dianggap tradisi hanya peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada setiap tanggal 10 Desember. Mengapa kita hanya memperingati hari dan tanggal tersebut, padahal kita sendiri sebetulnya mengemban tugas yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana menjabarkan konsep manusia seutuhnya ke dalam sistem hukum kita sendiri?

Hak Asasi Manusia memang menjadi pendorong yang penting untuk selalu merenungkan, apakah hukum yang dijalankan ini cukup memperhatikan martabat dan keselamatan manusia secara substansial. Tetapi, konsep manusia seutuhnya menempati kedudukan yang *imperatif-positif* di dalam sistem kehidupan sosial. Dengan demikian, wajib dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka akan terjadi *kesenjangan* antara sistem sosial dan sistem hukum di negeri ini.

Sekarang kita beralih ke masalah yang nyata-nyata bisa dilakukan saat ini juga.

Adapun yang ingin diajukan sebagai sarana *rekayasa* oleh hukum di sini adalah UU No. 4/1982 tentang Lingkungan Hidup. Pada hemat saya, UU tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak peraturan hukum sejak kemerdekaan, yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam hubungan dengan pembangunan *kualitas bangsa*, atau rekayasa kualitas bangsa. Tetapi, menurut pengamatan, sampai sekarang UU No. 4/1982 belum banyak berperanan sesuai kedudukan yang sedemikian itu. UU tentang Lingkungan Hidup tersebut memang masih selalu dilibatkan hanya ke dalam usaha pengamanan dan pelestarian lingkungan hidup saja.

Saya ingin mengajak anda sekalian melihat dan menerima UU No. 4/1982 dalam kapasitasnya tidak hanya untuk menangani lingkungan hidup, melainkan juga untuk merekayasa kualitas manusia Indonesia, yang tentu saja menyangkut aspek manusianya secara individual. Aspek serta dimensi individual UU Lingkungan Hidup itulah yang belum banyak disoroti, sehingga ia terluput dari perhatian kita sebagai sarana untuk melakukan rekayasa kualitas orang Indonesia secara *individual*.

Petunjuk tentang kapasitas UU No. 4/1982 untuk merekayasa kualitas individu dapat dijumpai dalam hal-hal berikut:

1. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup (Pasal 4c)
2. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat [Pasal 5, ayat (1)]
3. Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran [Pasal 5, ayat (2)]
4. Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tang-

gung jawab dengan kewajiban. [Pasal 20 ayat (1)]

Apabila UU tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang masih ditujukan pada pelestarian lingkungan fisik hendak dipakai sebagai sarana rekayasa individu, maka diperlukan cara yang khusus untuk membuatnya berhasil. Dalam hubungan ini ingin diajukan dua hal, yaitu:

1. Melakukan sesuatu yang ingin saya sebut sebagai pengarah kembali UU No. 4/1982, sehingga bisa dipakai sebagai rekayasa individu. *Pengarah kembali* ini diperlukan, oleh karena selama ini sasarannya lebih bersifat manusia-dalam-kelompok, dan bukan sebagai individu.
2. Melakukan *pembudayaan* kaidah-kaidah UU No. 4/1982, oleh karena UU tersebut menyimpan semacam *moralitas* dan etika kehidupan tertentu yang khas.

Sebagai suatu usaha atau gerakan raksa-sa untuk melakukan rekayasa kualitas individual yang demikian itu, ia tidak dapat hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang konvensional saja. Pada hemat saya seluruh kekuatan masyarakat hendaknya diikutsertakan, dan dalam kaitan ini saya terpikir pada peranan *Lembaga Swadaya Masyarakat* (LSM).

Batas-batas Kemampuan Hukum

Studi sosial tentang hukum juga membi-carakan kemampuan-kemampuan hukum untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk keterbatasannya. Permasalahan yang demikian ini muncul, oleh karena studi sosial mengenai hukum memberikan perhatian pada *efektivitas* pengaturan, dan tidak hanya berhenti pada masalah legalitas saja.

Sampai di sini kita tidak bisa mengata-kan secara absolut, seperti dalam teknologi mesin, apakah suatu pengaturan itu mampu mencapai tujuan sosialnya atautah tidak. Dengan singkat ingin dikatakan, bahwa se-perti halnya rekayasa sosial yang lain, reka-yasa melalui hukum pun dihadapkan pada kompleksitas permasalahan (Rahardjo, 1983 : 155-164).

Batas-batas kemampuan hukum ini pen-ting dikenali karena kita tidak bisa secara naif mengatakan, bahwa hukum itu selalu akan mencapai tujuan yang baik disebabkan memang itikad hukum itu adalah "baik". Saya katakan naif karena ditinjau secara so-siologis, hukum yang "bermaksud baik" tersebut dalam konteks sosial tertentu, ma-lah bisa menimbulkan suatu *gangguan* terha-dap ketertiban di situ. Kemungkinan demi-kian menjadi sangat relevan, mengingat be-gitu luasnya wilayah Indonesia yang disertai pula dengan lingkungan etnis yang berbeda-beda, serta tingkat perkembangan sosial yang juga berbeda. Keadaan demikian itu menyebabkan, bahwa keseragaman dalam pengaturan sangat tidak mudah dicapai dan dijalankan. Di pihak lain diketahui, bahwa hukum modern bekerja atas dasar prinsip *uniformitas* dan pengaturan secara abstrak, yang bertentangan dengan keadaan maje-muk tersebut. Oleh karena itu hendak dika-takan, bahwa hukum nasional di Indonesia ini mempunyai *risiko tinggi* untuk mencipta-kan suatu gangguan.

Sejak bangsa kita memang sudah berke-tetapan untuk menggunakan hukum mo-dern, maka analisis sosiologis memberikan peringatan, agar kita bisa bertindak bijak-sana dalam menjalankan hukum di negeri ini. Suatu cara yang *menggampangkan* pe-nyelenggaraan hukum dengan cara penerap-an yang kaku di mana saja (*to the letter of the law*), sebaiknya tidak menjadi tradisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Berman, Harold J., *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- Lev, Daniel S. "Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia." Dalam *Culture and Politics in Indonesia*, ed. Claire Holt, 246-318. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- Marasinghe, M.L. & Conklin, William W. *Essays in Third World Jurisprudence*. Singapore: Malayan Law Journal, 1984.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Law and Society' in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Poggi, Gianfranco. *The Development of the Modern State: A Sociological Introduction*. London: Hutchinson, 1978.
- Pyong-Choon, Hahm. *The Korean Political Tradition and Law, Essays in Korean Law and Legal History*. Seoul: Hollym Corporation, 1971.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- *Sumbangan Pemikiran ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum yang Bersifat Indonesia*, Makalah disampaikan pada Simposium Ilmu Hukum yang Bersifat Indonesia, FH UNDIP, 1987.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. London: The Eree Press.

Demokrasi dalam Kehidupan Budaya

Usman PELLY

DEWASA ini kita menghadapi sebuah kewajiban kembar: yaitu melestarikan warisan budaya bangsa yang kaya dan membangun kebudayaan nasional yang modern. Seharusnya demokratisasi dalam kehidupan budaya diletakkan dalam konteks kewajiban kembar ini. Oleh karena itu, demokratisasi tidak mungkin dilihat sebagai sistem tersendiri yang otonom dan steril, baik dari usaha pelestarian warisan budaya maupun dari pembangunan budaya nasional. Sebab muara dari kedua usaha ini adalah masyarakat modern yang tipikal Indonesia, masyarakat yang tidak hanya mampu membangun dirinya sederajat dengan bangsa modern lainnya, tetapi juga tangguh menghadapi tantangan kemerosotan mutu lingkungan hidup akibat arus ilmu dan teknologi modern maupun menghadapi *trend* global yang membawa daya tarik kuat ke arah pola hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Demikian-

lah, demokratisasi kehidupan budaya berarti kebebasan dalam keterikatan untuk melaksanakan tugas kembar di atas.

Pelestarian warisan *budaya bangsa* adalah bukan obsesi untuk menghantarkan kembali masyarakat kita ke koridor sejarah masa lalu atau menemukan masa silam itu, melainkan usaha untuk menemukan identitas dirinya sendiri. Bahwa dia bukan suatu bangsa yang lahir dari serpihan *kebudayaan manusia*, tetapi dari suatu *muara budaya* yang pernah mengukir sejarah peradaban *bangsa-bangsa* di dunia. Keyakinan historis ini secara psikologis tidak hanya akan memberikan kebanggaan, tetapi juga kesetiaan untuk memelihara dan merekayasa nilai-nilai luhur dan tradisi besar bangsanya.

Itu berarti kebudayaan nasional yang dibangun harus mampu berfungsi sebagai instrumen yang mengakomodasikan masa kini, dan membuka pintu masa depan. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya untuk menggarisbawahi keterkaitan kita dengan warisan budaya masa silam dalam mem-

Makalah ini telah disampaikan pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) tanggal 16-21 Juli 1991 di Yogyakarta.

bangun kebudayaan nasional di masa depan. Dengan kata lain, keterkaitan itu tidak untuk mengembangkan suatu *parochialism* (*kejumutan*), atau *obsolescence* (tembok yang membendung arus informasi dunia), tetapi untuk mendapatkan jati diri dan kearifan masa silam yang diperlukan. Demikianlah, nilai baru yang masuk secara selektif atau kreativitas dan ketajaman intelektual yang muncul dari proses pembudayaan itu akan merupakan unsur inovatif kuat dalam masyarakat yang telah memiliki kepribadian dan identitas *sendiri*. Satu-satunya sistem yang dapat melakukan tugas kembar itu ialah demokratisasi.

Pengertian "demokratisasi" dan "budaya" mungkin merupakan dua pengertian yang paling banyak didefinisikan dan diberi penjelasan dalam ilmu-ilmu sosial. Bukan hanya karena kedua kata itu mengandung konsep yang penting dan vital dalam kehidupan kita, melainkan juga karena hampir semua orang yang merasa diri pakar di bidang atau berkepentingan dengan kedua kata itu terdorong membuat definisi sendiri. Apabila Sutan Takdir Alisyahbana pernah mengeluh, bahwa dalam masyarakat kita tidak ada pengertian yang lebih kacau, atau sekurang-kurangnya lebih kabur dan menggelirukan daripada pengertian kebudayaan (Alisyahbana, 1985:141), maka demikian juga dengan pengertian demokrasi.

Walaupun demokrasi pada dasarnya adalah suatu konsep politik, tetapi dipergunakan juga dalam pengertian filosofis untuk menunjukkan sesuatu yang melekat erat (*inherent*) pada pengertian persamaan, kebebasan untuk mendapatkan manfaat, dan hak-hak azasi manusia (Theodorson, 1969: 107).

Apabila proses demokratis digunakan dalam skala yang lebih luas, seperti dalam

kaitan pembentukan kebudayaan nasional, maka menurut Dahl (1985:1) lembaga-lembaga masyarakat yang otonom pasti terwujud. Menurut sosiolog ini otonomi yang dinikmati di samping merupakan konsekuensi langsung dari proses demokratisasi, juga merupakan bukti penting dari berfungsinya proses demokratisasi itu sendiri. Dengan otonomi tersebut campur tangan dan tekanan dari pemerintah dan pihak luar dapat diperkecil, dan kebebasan untuk menjalankan program yang diinginkan dapat ditingkatkan. Tetapi, kebebasan dan otonomi sebagai buah dari demokratisasi akan memberikan peluang pula untuk melancarkan destruksi, melestarikan egoisme sempit, mengorbankan kepentingan umum, dan mungkin juga menghancurkan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu Dahl mengingatkan kita, bahwa semua bentuk demokrasi akan selalu diancam oleh dilema antara otonomi dan kontrol. Dilema ini dalam negara yang diperintah oleh regim otoriter lebih terlindung ketimbang dalam negara demokratis yang maju.

Pasal 32 UUD '45 menyatakan bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia." Pasal ini mengisyaratkan bahwa masalah kebudayaan nasional merupakan masalah kenegaraan, sehingga perlu ditangani dan dikoordinasikan lewat pemerintah (Subadio, 1988:5). Itu berarti pemerintahan di Indonesia berdasarkan undang-undang, secara legal dan terbuka, memiliki hak kontrol terhadap perkembangan kehidupan budaya bangsa. Itu berarti pula demokratisasi kehidupan budaya di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kedudukan dilematis seperti yang diungkapkan Dahl di atas, yaitu antara otonomi dan kontrol.

Akan tetapi, masalah yang paling relevan dibahas di sini ialah sejauh mana kontrol itu

dilakukan. Apakah hanya oleh pemerintah dalam pengertian yang sempit (para aparat saja), ataukah juga melibatkan masyarakat itu sendiri? Dua pertanyaan yang lebih penting lagi adalah: sistem dan kategori apa yang dipergunakan untuk melakukan kontrol tersebut? Sejauh mana pula sistem dan kategori itu harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap sah serta dihayati bersama, pun merupakan pertanyaan yang cukup menarik.

Seperti disinggung di muka, pengertian kebudayaan yang beraneka ragam itu dapat mendorong kerawanan, apabila tidak didudukkan dalam konteks pembicaraan yang jelas.

Oleh karena itu, suatu pengertian (definisi) budaya yang operasional dibutuhkan untuk memberikan arti dan kaitan yang fungsional terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Untuk maksud tersebut definisi sederhana di bawah ini mungkin memadai. Kebudayaan adalah hasil upaya yang terus-menerus dari manusia di dalam -- *ikat-an* -- masyarakat dalam menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menjawab tantangan kehidupannya (cf. Kayam, 1988:225). Dari segi kognitif, kebudayaan tidak hanya mencakup apa yang dilakukan dan diciptakan manusia, tetapi juga apa yang masih dicita-citakan atau yang masih harus diwujudkan, termasuk norma, pandangan hidup dan sistem nilai. Yang pertama dapat disebut kategori faktisitas dan yang kedua kategori norma (Kleiden, 1988: 233).

Dalam kaitan ini setidaknya ada dua fungsi kebudayaan nasional yang patut dikemukakan. Pertama, sebagai pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat majemuk Indonesia. Kedua, sebagai pedoman dalam pengam-

bilalihan ilmu dan teknologi modern. Dari kedua fungsi tersebut kiranya jelas bahwa secara fungsional kebudayaan itu merupakan *instrument* (alat) dalam kehidupan masyarakat. Namun sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan dapat dianggap sekaligus sebagai alat (patokan) dan tujuan.

Agar kebudayaan nasional dapat berfungsi seperti ditekankan di atas, diperlukan sistem demokratisasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses demokratisasi ini diharapkan akan tercipta perluasan dan penyempurnaan kelembagaan sosial yang tangguh, agar mampu menghadapi perubahan-perubahan dan perluasan lingkungan interaksi sosial. Perluasan interaksi sosial adalah sangat erat kaitannya dengan rekayasa norma dan nilai-nilai budaya tradisional maupun modern untuk menopang perluasan bentuk-bentuk hubungan sosial baru yang kemudian dapat dilembagakan. Lembaga-lembaga ini diharapkan mampu mengaktualisasikan aspirasi yang berkembang. Seperti dalam bidang kehidupan ekonomi, nilai-nilai baru diharapkan tidak hanya akan memperluas jaringan kelembagaan ekonomi melintasi batas lingkungan geografis, dan sosial-budaya, tetapi juga akan merangsang persaingan, disiplin, peningkatan produktivitas kerja yang berorientasi ke pasar, serta penguasaan peralatan dan teknologi yang memadai.

Proses demokratisasi dengan demikian akan mengembangkan perangkat sistem nilai budaya dan norma-norma sosial dan melembagakannya dalam berbagai lapangan kehidupan yang baru, untuk mendukung alih ilmu dan teknologi modern. Secara demikian, demokratisasi sebagai sistem akan memberikan kebebasan kepada manusianya memilih nilai-nilai yang menjadi motivasi,

pendorong, pembentuk sikap, dan sekaligus tujuan dari tindakannya. Oleh karena nilai-nilai ini terkait erat dalam unsur-unsur (*traits*) budaya, maka dalam mengadopsi suatu unsur budaya orang tidak akan dapat melepaskan nilai-nilai yang melekat pada unsur budaya itu. Seperti pada unsur budaya teknologi modern, nilai-nilai seperti rasionalitas, ketelitian, ketekunan, disiplin dan efisiensi harus turut serta diambil alih. Atau sebaliknya, dengan mengembangkan sederetan nilai-nilai tadi dari khasanah budaya sendiri, orang dengan mudah dapat mengadopsi unsur-unsur budaya teknologi modern. Begitu juga kita tidak akan mungkin mengadopsi sistem manajemen perusahaan Barat apabila nilai-nilai seperti keterbukaan, objektivitas, dan *fairness*, (ketulusan dan keadilan) tidak mampu kita adopsi.

Dapat dimaklumi bahwa alih ilmu dan teknologi itu bukan suatu masalah teknis, melainkan suatu proses enkulturalisasi (pembudayaan). Dengan analogi yang sederhana, bagaimana secara selektif "mencangkokkan" juga nilai-nilai budaya baru yang mendukungnya ke dalam batang tubuh budaya kita. Nilai-nilai baru itu diharapkan akan dapat tumbuh dengan akar budaya kita sendiri. Dengan demikian buah hasilnya adalah "khas" kita sendiri. Oleh karena nilai-nilai budaya baru itu dipilih secara selektif agar dia dapat berfungsi sebagai faktor inovatif (pembaru) dan bukan sebagai pembusuk yang dominatif dalam budaya kita, maka enkulturalisasi ini merupakan upaya rekayasa sosial.

Rekayasa sosial dalam pembangunan ekonomi adalah sama pentingnya dengan pertimbangan teknik dan keuangan. Rekayasa yang tepat secara ekonomi akan memberikan keuntungan dua kali lipat dibanding pembangunan ekonomi melalui rekayasa

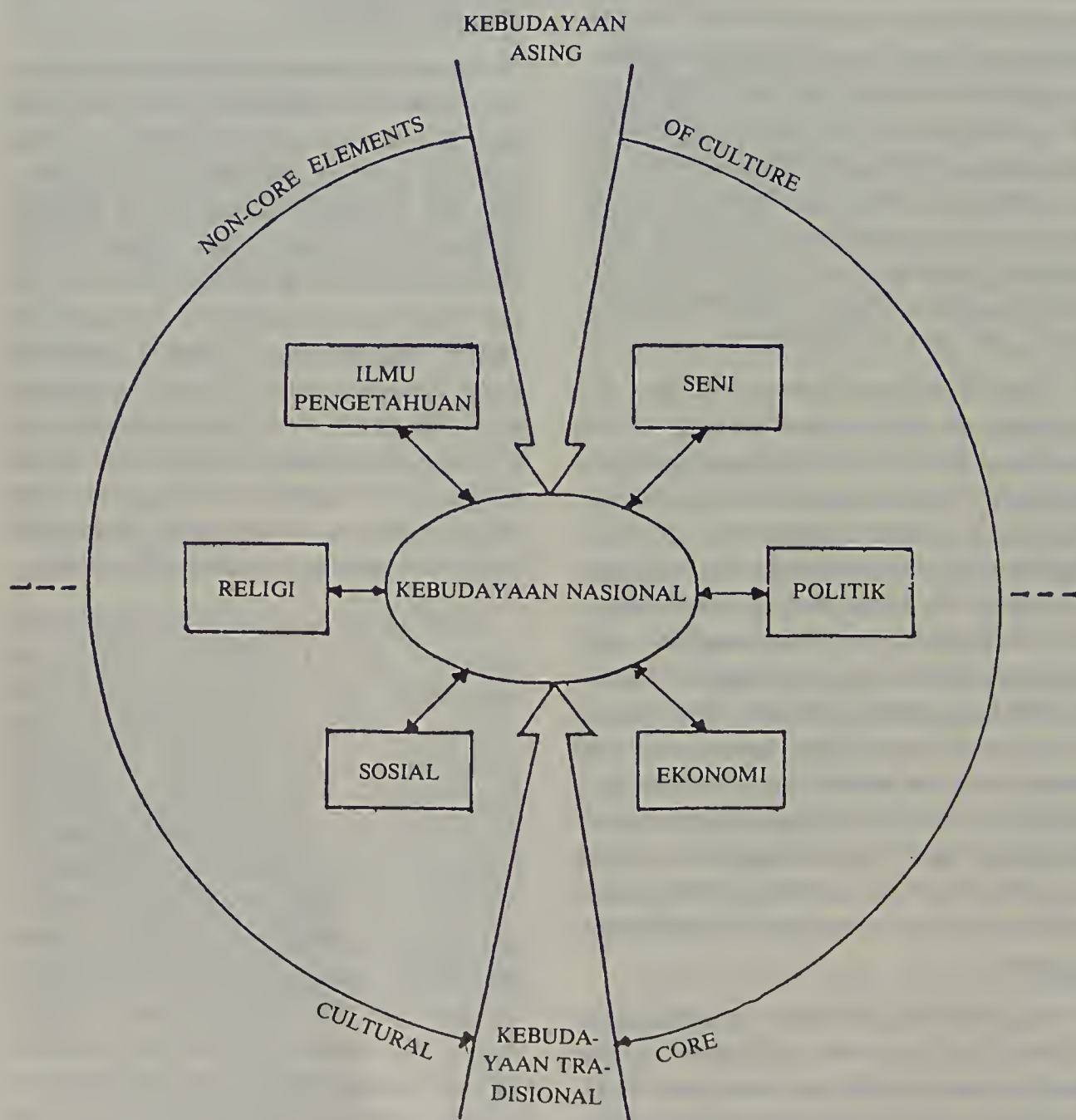
yang tidak tepat guna. Kegagalan berbagai proyek pembangunan berskala besar seperti proyek irigasi di Etiopia, proyek peternakan sapi di Papua Nugini, dan proyek pengawetan tembakau di Tanzania, adalah contoh rekayasa sosial yang secara budaya tidak tepat. Sebab itu jelas bahwa demokratisasi dalam kehidupan budaya, harus mendorong kita untuk melaksanakan rekayasa sosial yang tepat budaya.

Seperti dijelaskan di muka, demokratisasi dalam kehidupan budaya akan menemukan dirinya dalam situasi dilematis antara otonomi dan kontrol. Otonomi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga untuk pengembangan programnya, akan dikontrol oleh nilai-nilai dasar yang sekaligus juga merupakan cita-cita atau tujuan hidup bangsa itu. Dalam masyarakat Indonesia nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya merupakan nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat tetapi juga merupakan rujukan dan tujuan bangsa. Oleh karena itu, diungkapkan dalam kalimat yang formal bahwa pembangunan itu merupakan pengamalan Pancasila.

Skema pada halaman berikut dapat menjelaskan posisi keberadaan kelembagaan masyarakat dan kaitannya dengan dua sumber nilai dan *traits* kebudayaan, yaitu kebudayaan tradisional dari masyarakat agraris Indonesia dan kebudayaan asing dari masyarakat industri maju. Pembentukan kebudayaan nasional merupakan rekayasa kedua budaya tersebut. Dalam Polemik Kebudayaan tahun 1930an dikemukakan bahwa kebudayaan nasional akan berfungsi sebagai pemberi identitas bangsa, wahana komunikasi, dan penguat solidaritas. Ini berarti dalam proses pembentukan kebudayaan nasional, nilai-nilai kehidupan tradisional bangsa Indonesia harus dominan atau lebih unggul daripada nilai-nilai kebudayaan

asing. Dengan demikian, pembentukan atau pertumbuhan lembaga dalam keenam lapangan kehidupan (yang diadopsi dari Edward Spranger) yaitu religi, bahasa, seni, politik, ekonomi, dan sosial, secara dominan akan diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia.

Mungkin pertanyaan yang relevan di sini ialah apakah kebebasan dalam rangka demokratisasi kehidupan budaya, perorangan atau lembaga, dalam keenam lapangan hidup itu akan mengadopsi nilai-nilai atau traits budaya asing secara selektif atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-



MODEL MEKANISME DEMOKRATISASI
KEBUDAYAAN

tentu "menelannya" bulat-bulat.

Diskusi pra Kongres Kebudayaan Nasional di Jakarta pada 8-10 Maret 1990 telah mengidentifikasi sebanyak 24 masalah kebudayaan asing. Di antaranya terdapat 10 masalah yang merupakan tantangan dalam pembentukan kebudayaan nasional yaitu: (1) masalah komersialisasi kebudayaan; (2) masalah konsumerisme dan materialisme; (3) masalah ketahanan budaya dan konflik nilai; (5) masalah pendidikan dan penerusan nilai; (6) masalah adaptasi hukum dalam pengembangan pariwisata; (7) masalah seks dan kesehatan; (8) masalah sekularisasi kehidupan beragama; (9) masalah pengembangan potensi masyarakat dalam upaya mengambil manfaat optimal dari pariwisata dan interaksi antar bangsa; dan (10) masalah pengembangan kemampuan selektif terhadap pengaruh kebudayaan asing.

Di samping itu, telah diidentifikasi pula potensi positif kebudayaan asing untuk pengembangan kebudayaan nasional seperti: (1) Pengayaan dalam kehidupan seni musik, lukis, busana, sastra, drama, dll.; (2) mendorong dan memberi pola pada sistem pendidikan; (3) mengidentifikasi nilai-nilai universal untuk memberi bobot progresivitas terhadap kebudayaan tradisional; (4) memperluas wawasan pikiran dan pengembangan hubungan antar bangsa; dan (5) mendorong sikap dan perilaku kemandirian yang sudah berakar pada kebudayaan lokal.

Kemampuan kita menjawab tantangan dan sekaligus memanfaatkan unsur-unsur positif kebudayaan asing di atas sangat ditentukan oleh seberapa jauh penghayatan dan penguasaan terhadap norma dan nilai-nilai fundamental bangsa kita sendiri. Nilai-nilai fundamental ini dalam antropologi disebut inti budaya (*cultural core*). *Cultural*

core ini berperan tidak saja sebagai rujukan dan kontrol, melainkan juga sebagai objek pengayaan karena sifatnya yang terbuka dan dinamis terhadap pengaruh kebudayaan luar (asing) yang merupakan "non-core elements of culture". Pancasila sebagai nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah dinyatakan sebagai identitas yang terbuka. Keterbukaan di sini mengacu kepada pengayaan dalam pengamalan, sehingga nilai-nilai itu tidak hanya dapat disesuaikan secara fungsional dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi dari waktu ke waktu, tetapi juga secara demikian nilai-nilai itu akan menjadi lebih pragmatis dan aktual dalam kehidupan. Dengan demikian nilai-nilai itu terhindar dari proses isolatif dan pengerdilan (*imbreeding*).

Pada hakikatnya inilah yang diharapkan dari proses demokratisasi. Suatu kebebasan dalam keterbukaan untuk melakukan restrukturisasi dan re-interpretasi nilai-nilai dan unsur-unsur budaya dalam pengayaan (rekayasa) terhadap nilai-nilai asing secara selektif. Dan kemudian melembagakannya dalam kehidupan modern.

Di samping itu juga dari arus bawah, tidak semua unsur budaya tradisional yang berasal dari berbagai budaya etnis dan lokal secara otomatis merupakan kebudayaan nasional. Hanya puncak-puncak kebudayaan etnis dan lokal yang dapat dijadikan "modal" kebudayaan nasional. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 UUD '45 yang menyatakan: "... Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa ...". Diskusi pra Kongres Kebudayaan Nasional bulan Maret 1990 tersebut telah merumuskan puncak-puncak kebudayaan daerah dan indikatornya.

"Puncak-puncak kebudayaan di daerah adalah sari-sari dari kebudayaan suku bangsa dan lokal setempat yang berkualitas tinggi, dinamik dan menggambarkan identitas penduduknya menjadi modal dasar pembangunan Kebudayaan Nasional Indonesia."

Adapun indikator puncak-puncak kebudayaan di daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengandung nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mencerminkan kualitas, martabat, dan peradaban bangsa.
3. Merupakan kebanggaan nasional.
4. Terbuka untuk pengayaan, penyempurnaan, dan peningkatan kualitas sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat.
5. Komunikatif, karena dapat dihayati oleh pendukung kebudayaan daerah lainnya.
6. Menuju tumbuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Sebagai ungkapan identitas keindonesiaan.

Secara demikian nilai-nilai dan unsur-unsur dari kebudayaan tradisional memerlukan berbagai proses pematangan (reinterpretasi, reaktualisasi dan rekonstruksi) dan pengayaan agar memenuhi ketujuh kategori di atas untuk dapat tampil sebagai puncak kebudayaan daerah. Puncak-puncak kebudayaan daerah ini merupakan modal kebudayaan nasional.

Demokratisasi dalam kehidupan budaya tradisional sangat diperlukan guna mendorong dan memacu masing-masing daerah atau kelompok etnis memberikan saham (modal) bagi pengembangan kebudayaan nasional. Proses demokratisasi ini juga akan menimbulkan suasana gairah dan kompetitif yang terbuka dan saling mengisi. Suasana ini akan mendorong perubahan sosial-budaya secara menyeluruh.

Setidaknya ada dua proses demokratisasi dan seleksi (*control*) dalam pembentukan kebudayaan nasional. Pertama ialah pada proses adopsi terhadap nilai-nilai dan unsur-unsur kebudayaan asing, sedangkan kedua pada proses penampilan unsur-unsur kebudayaan tradisional. Kedua proses demokratisasi dan seleksi ini seharusnya telah terjadi sebelum nilai dan unsur-unsur budaya tersebut dilembagakan dalam keenam lapangan hidup. Tetapi karena prosesnya adalah sangat kompleks dan tidak berjalan *linear* maka dapat juga terjadi dalam berbagai bentuk modifikasi dan perubahan pada tingkat implikasinya di lapangan.

Maka itu, demokratisasi sebagai sistem kehidupan budaya dengan substansinya kebebasan dan otonomi sekaligus terkontrol oleh nilai-nilai rujukan yang fundamental dan teruji dalam pengamalan. Pada gilirannya, proses demokratisasi dalam kehidupan budaya dapat mendorong transformasi sosial lebih cepat. Akan tetapi, perubahan-perubahan sosial-budaya pada hakikatnya tidak dapat dilakukan secara revolusioner, sebagaimana yang dikehendaki, umpamanya oleh pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi justru tidak jarang berjalan tanpa menghiraukan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Barangkali pembangunan seperti ini dari segi ekonomi masih tetap menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Tetapi, dari segi sosial dampaknya adalah sangat fatal. Pembangunan ekonomi demikian hanya akan melahirkan ketimpangan dan kesenjangan sosial, yang pada akhirnya mengancam solidaritas dan kesatuan nasional.

Barangkali benar pendapat Heilbroner (1966), ahli ekonomi kenamaan, bahwa pembangunan di Dunia Ketiga bukanlah terutama pembangunan ekonomi melainkan

proses pembangunan politik dan sosial budaya.

Untuk mempercepat proses pembangunan nasional, demokratisasi dalam kehidupan budaya terasa mutlak diperlukan. Maka itu telah saatnya, kita memiliki suatu konsep dan kebijakan kebudayaan nasional yang

terintegrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial lainnya. Secara demikian, pembangunan tidak akan kehilangan dimensi yang penting dalam meningkatkan kualitas dan martabat bangsa, yaitu dimensi budaya. Begitu pula diharapkan tugas kembar yang bersejarah itu akan dapat dilaksanakan lebih sempurna dalam era Pembangunan Jangka Panjang Kedua.

Masyarakat Kecil dalam Ekonomi Global: Perspektif Energi, Sosiobudaya dan Gaya Hidup Abad XXI

Ali M.A. RACHMAN

CIRI utama masyarakat kecil dalam perekonomian global abad XXI idealnya ialah mampu mengubah bentuk energi yang tersedia, menjadi bentuk energi baru. Kemampuan itu adalah untuk menyambungkan gaya hidup masing-masing masyarakat kecil dari beragam tipe sosiobudaya di seantero Indonesia ke dalam tipe gaya hidup dunia. Upaya mencapai kemampuan demikian mutlak perlu, agar ketergantungan Indonesia di tengah ekonomi global sejajar dengan bangsa lain, sesuai dengan kepribadian Indonesia sendiri.

Yang mendasari pemikiran di atas adalah energi, sosiobudaya dan gaya hidup di sepanjang sejarah manusia tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini merupakan refleksi dari hukum termodinamika: *tak ada energi yang hilang dan tak ada pula yang dapat dimusnahkan, tetapi ia dapat berubah bentuk, dan jumlah seluruhnya senantiasa tetap*. Hukum termodinamika inilah yang dapat menjadi dasar bahwa konsumsi energi per kapita menyatukan komponen energi, sosiobudaya dan gaya hidup manusia sepanjang sejarah.

Konsumsi energi sepanjang sejarah manusia pada umumnya mengikuti bentuk grafik "U". Grafik "U" ini melambangkan grafik konsumsi energi dari beragam tahap evolusi sosiobudaya sepanjang sejarah manusia sejak pra pertanian 10.000 tahun yang lalu hingga zaman industri abad XX. Dengan grafik "U" tersebut ilmuwan sosial umumnya bisa menyatukan dasar pikir lintas disiplin ilmu di mana energi menjadi tolok ukur sosiobudaya dan gaya hidup manusia sepanjang sejarah.

Makna grafik "U" itu adalah kedua kakinya dijadikan panduan telaah evolusi sosiobudaya dengan kaidah: pada awal evolusi sosiobudaya, konsumsi energi cukup tinggi, demikian juga pada evolusi sosiobudaya lanjutan, sedangkan dalam tahap sosiobudaya transisi konsumsi ini berada paling rendah. Konsumsi energi yang tinggi identik dengan sosiobudaya terlukis pada masing-masing kaki kurva "U" itu. Sebaliknya, sosiobudaya transisi dapat diperhatikan letaknya pada dasar kaku kurva "U" tersebut. Gejala seperti ini bisa kita perhatikan dalam kondisi awal negara agraris ketika penduduk dengan

perladangan berpindah dianggap boros menggunakan energi, tetapi kenyataannya sistem pertanian modern pun telah tinggi sekali menggunakan energi sebagai inputnya. Dengan kata lain, kedua teknik bertani baik primitif maupun modern cenderung menggunakan energi yang banyak.

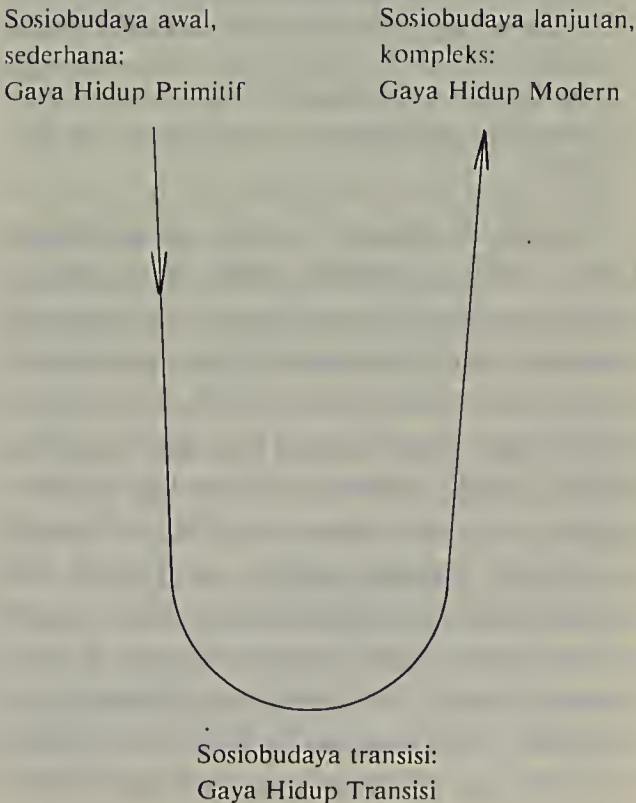
Gaya hidup berkepribadian bangsa Indonesia didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika sosiobudaya seantero Indonesia. Hal ini patut menjadi pegangan dalam periode 25 tahun pembangunan jangka panjang tahap II, mengingat gejolak konsumsi energi dunia dapat mengalahkan kepribadian itu apabila kurang waspada menggariskan kebijakan pembangunan mendatang. Gaya hidup semacam itu dapat berfungsi: menata energi yang tersedia dengan baik, mempercepat arus energi dari luar negeri dan dapat membuat keseimbangan antara arus energi dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sebagai contoh, dalam ketiga hal ini Indonesia akan dapat tetap mempertahankan swasembada pangan, dapat pula menarik wisatawan mancanegara, tetapi juga dapat mengendalikan diri dalam keterbukaan arus energi dari berbagai pertukaran antara konsumsi asal dari luar dan asal dari dalam negeri sendiri.

Benarkah grafik "U" adalah lambang konsumsi energi sebagai refleksi bentuk termodinamika dalam evolusi sosiobudaya? Bagaimana hubungan antara energi dan sosiobudaya? Keterkaitan apa pula antara energi dan gaya hidup? Dalam hal apa kita dapat menentukan energi dan ekonomi global yang tak dapat dipisahkan satu sama lain masuk ke aneka ragam sosiobudaya di Indonesia? Bagaimana masyarakat kecil pada umumnya dapat bersama-sama keberadaannya dalam sistem ekonomi global itu? Berikut ini disajikan penjelasan jawaban pertanyaan tersebut.

Grafik "U" dan Sosiobudaya

Energi menjadi sorotan ilmuwan sosial mulai sekitar tahun 1943, ketika Leslie A. White, antropolog Amerika Serikat, menuliskan artikelnya pertama kali dalam *American Anthropologist* No. 3, Vol. 45 halaman 335-356 dengan judul "Energy and Evolution of Culture" yang kemudian direvisi dan terulang terbit dalam *Scientific American* tahun 1949, halaman 363-393. Makalah White ini berisikan pokok bahasan bahwa segala sesuatu yang ada di Planet adalah bentuk konversi energi. Keyakinan yang mendasar ini ditegaskan dalam kaitannya dengan konsumsi energi per kapita yang cenderung meningkat apabila sosiobudaya semakin canggih.

PERSPEKTIF KONSUMSI ENERGI PER KAPITA
DALAM EVOLUSI SOSIOBUDAYA DAN
GAYA HIDUP



Pemikiran konsumsi energi per kapita yang meningkat seiring dengan semakin canggihnya sosiobudaya, mengimbas luas kepada ilmuwan sosial yang cenderung mencari jawaban mengenai ukuran perubahan dalam masyarakat, misalnya demi terapan bagi pembangunan. Untuk maksud tersebut jawaban dicari dengan mengumpulkan data konsumsi energi per kapita berbagai sosiobudaya, sejak ia masih dalam kesederhanaan hingga pada taraf tercanggih. Yang sangat terkenal dalam membandingkan konsumsi energi per kapita itu, misalnya Earl Cook yang dalam tahun 1971 mempublikasikan catatan konsumsi energi per kapita beragam bentuk dan tahapan sosiobudaya dalam *Scientific American* halaman 83-91 berikut ini:

"*Primitive men* sekitar sejuta tahun yang lalu di Afrika menggunakan energi otot saja sebesar 2 ribu Kcal, *hunting men* asal Eropa sekitar 100 ribu tahun yang lalu mengkonsumsi energi senilai 5 ribu Kcal, *primitive agricultural men* sekitar 5 ribu tahun sebelum Masehi mengkonsumsi energi sebesar 12 ribu Kcal, *advance agricultural men* di Eropa tahun 1400 mengkonsumsi energi 26 ribu Kcal, *industrial men* di Inggris tahun 1875 mengkonsumsi energi sebesar 77 ribu Kcal dan *technological men* di Amerika Serikat tahun 1970 mengkonsumsi energi sebesar 230 ribu Kcal".

Angka konsumsi energi yang ditulis Cook (1971) tersebut bila ditempatkan dalam satu grafik menunjukkan seolah-olah konsumsi energi menanjak lurus seperti harapan teori White (1943, 1949). Di lain pihak, Arthur Terry Rambo juga asal Amerika Serikat, salah seorang antropolog perintis penelitian Ekologi Manusia di Asia Tenggara, banyak mempersoalkan energi pula. Di antara artikelnya yang tertumpu pada energi misalnya berjudul "No Free Lunch: A Re-examination of the Energetic Efficiency of Swidden Agriculture" (Rambo 1984: 154-163) dan "Energy and Cultural Evolu-

tion" (Rambo 1990, segera terbit). Kedua bahasan ini mempunyai arti penting dalam sosiobudaya, yaitu tantangan bagi ilmuwan agar berupaya lebih banyak menempatkan sosiobudaya tradisional khususnya pertanian (Swidden), dalam kontinum sosiobudaya lanjutan menuju modern (pertanian intensif). Berdasarkan perhitungan Rambo (1984) sistem perladangan berpindah adalah efisien sebagaimana efisiennya pertanian intensif menetap yang menghemat energi otot, tetapi sama-sama tidak efisien dalam total penggunaan energi input, karena imbalan input energi dan output energi dari kedua sistem pertanian itu tergolong besar sehingga upaya mendapat suatu output tidak pula ringan. Segi lain dari artikel ini (Rambo 1990) mengajak kita melihat perspektif global sosiobudaya di mana energi yang digambarkan teori White (1943, 1949) dan para pengikutnya dipersoalkan perbaikannya.

Data empiris terasa sekali kurang untuk mencari keterkaitan sosiobudaya dan konsumsi energi per kapita. Sadar akan hal ini A.T. Rambo dalam tahun 1978/1979 menampilkan serangkaian data yang pernah diperolehnya dari berbagai tugas lapangan, terutama pada masyarakat Band (Orang Semang di Malaysia), masyarakat Tribe (Orang Hmong di Thailand), masyarakat Chiefdom (Orang Muong, Vietnam Utara), Archaic State (Petani delta sungai di Vietnam). Angka-angka konsumsi energi beragam golongan sosiobudaya ukuran Elman Service (1958; 1962; 1966; 1971; 1975) yaitu Bank, Tribe, Chiefdom, Archaic State seperti diungkapkan Rambo dalam kuliahnya adalah:

Semang 5 ribu Kcal
Hmong 40 ribu Kcal
Muong 3,5 ribu Kcal
Petani Vietnam 2,5 ribu Kcal
(Ali M.A. Rachman 1980: 20)

Data di atas menunjukkan gejala penurunan konsumsi energi dari sosiobudaya yang relatif sederhana kepada sosiobudaya yang relatif kompleks. Konsumsi energi 5 ribu Kcal oleh Semang dapat dikembalikan pada kondisi sesungguhnya, ketika mereka berladang yang ditaksir setidaknya 5 ribu Kcal, pada mulanya adalah 100 ribu Kcal. *Trend* data di atas adalah kebalikan dari data Cook (1971) yaitu konsumsi energi cenderung menaik dengan semakin canggihnya sosiobudaya.

Adalah menarik apabila data Rambo dikombinasikan dengan data Nation State Cook (1971), yaitu ada gejala penurunan konsumsi energi per kapita pada sosiobudaya petani dan kemudian konsumsi energi per kapita itu naik bila sosiobudaya menjadi canggih. Seolah-olah konsumsi energi per kapita antara masyarakat relatif sederhana seakan-akan sama dengan masyarakat kompleks, yaitu mengikut kaidah konsumsi energi seperti yang ditunjukkan pada ujung kaki kiri dan kaki kanan grafik "U".

Gaya Hidup

Pada waktu belajar dari Rambo dalam tahun 1978-1980, saya tertarik menguji dugaan keberadaan kurva "U" sebagai refleksi sosiobudaya dalam bentuk empiris pada satu masyarakat kecil bentuk *tribe* di Malaysia yang setaraf dengan masyarakat terasing di Indonesia. Studi empiris ini mencari jawaban bagaimana konsumsi energi di dalam masyarakat seutuhnya apabila dirinci menurut strukturnya. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi energi yang semakin besar dengan semakin kompleks struktur masyarakat cenderung bukan berasal dari konsumsi per kapita tetapi didasarkan konsumsi energi

per sistem sosial. Dalam hal ini energi itu dipergunakan untuk memelihara sistem sosial. Dapat kita pahami pula bahwa semakin kompleks struktur sistem sosial maka ada kecenderungan konsumsi energi per sistem sosial itu semakin meningkat (CF. Ali M.A. Rachman 1990, siap terbit dari Michigan State University Press dalam judul *Social Integration and Energy Utilization* dari seri buku *Ecology and Cultural Evolution in the Tropics*).

Energi berperan dalam memelihara struktur sosial dapat dipahami dari kenyataan, bahwa pada saat individu kekurangan energi maka pemerintah dapat berperan mensubsidi penduduk. Dan dalam situasi lain pemerintah dapat menarik pajak dari penduduk mampu, lalu menggunakan hasil pajak itu untuk kesejahteraan umum. Kenyataan tersebut didasarkan pada berbagai kejadian sosial, seperti yang dialami petani Indonesia dalam program intensifikasi pangan, pertolongan bencana alam, deregulasi kebijakan ekonomi negara dan sebagainya.

Gaya hidup yang dimaksudkan tulisan ini tertuju pada pengertian bagaimana menata sumber energi dan bagaimana pula cara menggunakannya bagi kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia yang aneka ragam sosiobudayanya didasarkan kaidah konsumsi energi kurva "U". Kebutuhan energi setiap sosiobudaya di kedua kaki kurva "U" itu dapat mencerminkan kepribadian Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia yang patut dipelihara dengan menata "budget energi", yaitu memandirikan penduduk dalam konsumsi energi tersedia dari ekosistem sendiri, di samping kemungkinan menukar bentuk energi dengan luar negeri dalam interaksi dinamis ekonomi global: mi-

salnya pengiriman tenaga kerja, ekspor non migas, pariwisata dan sebagainya.

Penekanan tulisan ini adalah bagaimana sebaiknya bentuk gaya hidup masyarakat kecil dalam ekonomi global agar pertukaran energi antar negara bisa terjadi dan arusnya pun perlu mendapat perhatian bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa 25 tahun tahap II. Penataan energi dalam ekosistem tradisional bukan tak perlu mendapat sorotan, tetapi hal itu sudah seharusnya menjadi modal pokok di samping harus diperhitungkan kemungkinan derasnya arus energi Indonesia lepas ke luar negeri. Apabila penekanan gaya hidup pada pembangunan Indonesia tahap II nanti didasarkan pada seluruh segi sumber energi yang ada, itu berarti setidaknya-tidaknya ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian dalam 25 tahun pembangunan tahap II antara 1993-2018. Ketiga hal yang dimaksudkan adalah: (1) masyarakat kecil dengan segala bentuk sosiobudaya tradisional sudah perlu berkemampuan memasuki lingkungan sosial modern dalam segala bentuk pertukaran energi; (2) struktur masyarakat kecil cenderung semakin membesar dan kepentingan memelihara sistem sosialnya menjadi lebih kompleks sehingga banyak peranan baru yang kemungkinan muncul; (3) kemungkinan masyarakat kecil mengalami transformasi dari tradisi seperti halnya masyarakat terasing, petani dan peladang menjadi seolah-olah semu modern bisa terjadi karena bertukar gaya hidup.

Gaya Hidup Modern

Masyarakat kecil seukuran Band dan Tribe sebagaimana halnya suku bangsa kita yang masih tergolong mulai bertani, petani, nelayan dan peladang telah terbuka terha-

dap pertukaran energi. Misalnya, keterkaitan pasar hasil pertanian dan hasil hutan dengan para pedagang asal kota. Dalam interaksi demikian ini, meniru kebiasaan asal kota seperti cara berpakaian, makanan yang diawetkan dari industri kota dan sebagainya menjadi satu ciri masuknya gaya hidup modern. Sering kita tercenung bila memperhatikan keluarga dalam masyarakat Band dan Tribe masa ini mengendarai sepeda motor hasil penjualan kayu gaharu atau hasil hutan lainnya. Justru yang memprihatinkan bahwa sepeda motor itu tak dipahami sepenuhnya oleh keluarga Tribe ini. Jangan juga heran bila lemari es diisi dengan pakaian. Semua contoh ini adalah tiruan gaya hidup modern di luar pengetahuan yang sepatutnya terlebih dahulu perlu dimiliki masyarakat.

Masyarakat kecil awal abad XXI bukanlah semata-mata golongan Tribe, Band, petani dan nelayan serta peladang asal desa, melainkan mereka yang lambat laun telah berkembang karena kota-kota perdagangan yang dilingkari desa-desa tersebut. Gejala seperti ini bisa kita saksikan mulai sekarang di mana transportasi telah jauh masuk desa terpencil. Generasi muda dengan mudah menyaksikan pertunjukan di bioskop dan berbagai keramaian malam di kota, hanya dengan menumpang kendaraan umum dan dapat kembali lagi ke desanya segera setelah kegiatannya selesai.

Masa rekreasi dan bersantai merupakan gaya hidup yang mutlak ada pada setiap sosiobudaya. Di dalam masyarakat dengan tradisi kuat berkonotasi primitif sekalipun, rekreasi itu ada. Rekreasi hanya bervariasi dalam bentuk dan cara melaksanakannya. Misalnya di sebagian petani, ada kebiasaan kaum wanita ngobrol sambil mencari kutu atau sambil mencuci di pancuran menyebarkan berita, dan sebagainya. Hal-hal tradisio-

nal yang positif sebaiknya terus berkembang dan jangan sampai teredam. Perkembangan tradisi ini sepatutnya searah dengan berkembangnya alat-alat komunikasi massa, seperti antena parabola yang dalam banyak hal membuat gegar budaya tradisional itu. Apabila masyarakat kecil mandiri, antena parabola tidak lagi membuat gegar budaya tetapi dapat menjadi sumber informasi yang baik untuk menyejajarkan diri dalam globalisasi dunia.

Dalam rancangan pembangunan 25 tahun tahap II mendatang sewajarnya pendidikan gaya hidup modern perlu ditanamkan kepada masyarakat, dengan tekanan agar mampu mawas diri berdasarkan sosio-budaya yang pernah diwariskan kepada setiap individu di rumah tangga masing-masing sebagai lembaga pendidik. Saluran lembaga pendidikan ini terus meningkat hingga ke tingkat nasional seperti yang ada sekarang, hendaknya semakin pandai menyeimbangkan mana yang sesuai dan mana yang tidak dari gaya hidup modern itu.

Perspektif ekonomi global tak dapat dihindari dalam masa 25 tahun mendatang, terutama yang berhubungan dengan konsumsi energi pada produk modern. Permintaan produk modern itu akan dapat diseimbangkan, apabila pendidikan konsumen senantiasa teratur dilancarkan oleh lembaga pendidikan. Dengan cara ini semua bentuk masyarakat kecil di kota maupun desa yang butuh informasi dan kemampuan berproduksi dapat menyeimbangkan kebutuhannya. Filosofi hidup hemat dan cermat hendaklah tertanam lebih kukuh lagi sebagaimana diwariskan generasi pendahulu dalam sosiobudaya tradisional dan perlu dinalarkan pada sosiobudaya modern yang serba terbuka.

Daur ulang sebagai penerapan hukum

termodinamika patut dijadikan kegiatan masyarakat kecil dalam subsistensi dan hal ini bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat kecil, khususnya masyarakat kecil di perkotaan. Sehubungan dengan itu upaya memajukan koperasi berkaitan dengan daur ulang bisa memberikan peranan berarti bagi subsistensi. Gejala ini dapat kita perhatikan sudah mulai terjadi sejak akhir abad XX misalnya di Jakarta (CF. Sri Kusdyantinah S. 1990, draft tesis S2).

Struktur Sosial

Struktur sosial masyarakat kecil tahun 2018 dapat diperkirakan berdasarkan kondisi penduduk hari ini. Setidak-tidaknya ikatan sosial individu dan kelompoknya bergerak menjurus pada orientasi kepentingan. Gejala semacam ini timbul, misalnya, sejak akhir abad XX pada kalangan petani di Jawa yang padat penduduknya dengan pemilikan dan penyakapan lahan usaha tani yang semakin kompleks. Upaya memahami struktur sosial selama pembangunan Tahap II 1993-2018 dapat diperhatikan berdasarkan sosiobudaya dari dua lingkungan. Pertama, Lingkungan Lokal (LL) masyarakat kecil itu. Kedua, Lingkungan Sosial Luar (LSL)-nya. Terhadap kedua lingkungan itulah masyarakat kecil antara tahun 1993-2018 memerlukan kajian demi mencari kebijakan menata energi yang relevan.

Lingkungan Lokal masyarakat kecil terbagi atas segi fisik dan segi sosial. Dari segi fisik semua sumber energi dalam ekosistem masyarakat itu tak dapat dihindarkan lagi interaksinya dengan bermacam perlakuan pembangunan tahap I, 25 tahun yang lalu. Dalam masa itu kebijakan energi baik mengenai petani, peladang, maupun nelayan yang meliputi intensifikasi tanaman ter-

nak, dan agroforestry; masalah pemukiman kembali peladang berpindah, transmigrasi, urbanisasi, kehutanan dan perbatasan antar negara menjadi telaahan kaji ulang yang penting, agar sumber energi dalam LL itu berdaya guna bagi masyarakat kecil dan nasional. Misalnya merapatkan pengusaha dan penduduk lebih dekat dibandingkan sebelumnya, mendirikan pusat-pusat penelitian yang mengkaji kepentingan masyarakat kecil dan nasional dalam pertanian, mendirikan pusat penelitian internasional supaya terjadi pertukaran tenaga ahli Indonesia dan dunia dalam berbagai bidang sehubungan dengan sumber energi bagi kepentingan nasional dan dunia, sehingga tumbuh penataan sumber energi nasional dan dunia di mana masyarakat kecil tidak terkesampingkan menerima manfaatnya.

Dari segi sosial, potensi tradisi perlu dipahami guna membangkitkan swadaya pada pengelolaan sumber energi tersedia dan pemerataan yang sesungguhnya bagi masyarakat kecil dalam LL mereka sendiri. Struktur sosial internal masyarakat kecil ini akan berkembang meluas lebih daripada sekedar memelihara sistem sosial tradisi sendiri tetapi juga berguna menghadapi ekonomi global.

Komponen Lingkungan Sosial Luar masyarakat kecil ini banyak sekali dan yang terdekat dengan mereka adalah pemerintah yang melindungi seluruh warga negara. Peranan pemerintah adalah mencari jalan bagi kesejahteraan masyarakat kecil ini dengan cara khas, yaitu memandirikan masyarakat kecil itu dalam konsumsi dan produksi energi melalui gaya hidup hemat dan cermat yang menjadi pangkal perilaku sehari-hari. Unsur LSL yang patut mendapat perhatian pula bagi kesejahteraan masyarakat kecil adalah agar kebijakan nasional jangan sam-

pai secara sadar maupun tidak mengesampingkan keikutsertaan masyarakat kecil, karena masyarakat kecil adalah potensi besar bagi pembangunan.

Lepas Landas

Pada hemat saya lepas landas yang kita idamkan bagi pembangunan di negeri kita hendaklah diartikan sebagai transformasi. Artinya perubahan naik status dalam sosio-budaya, misalnya dari sosiobudaya *band* ke sosiobudaya *tribe*, ke sosiobudaya *chiefdom*, ke petani intensif dan menjadi warga masyarakat kota industri, dari yang sering-an-ringannya hingga masyarakat industri berat. Dalam hal ini struktur sosial dan gaya hidup berubah dari semula.

Lepas landas bagi bangsa Indonesia dalam periode pembangunan tahap II masih sedang mengupayakan sosiobudaya hari ini yang menyeluruh. Sosiobudaya di masa ini masih bervariasi dalam statusnya. Dalam hal ini lepas landas berarti satu satuan masyarakat utuh (*community as a whole*) dalam status konsumsi energi yang rendah berubah tingkat kepada status konsumsi energi tinggi dalam satuan masyarakat utuh dan menyeluruh yang baru. Misalnya, masyarakat Anak Dalam di pedalaman propinsi Jambi dapat digolongkan lepas landas, apabila mereka telah beralih kepada konsumsi energi setaraf petani tradisi menetap. Artinya, Anak Dalam telah dapat hidup dalam sistem sosial baru yang melibatkan *seluruh segi kehidupan penting yang juga telah menjadi darah daging mereka*. Dengan kata lain, masyarakat Anak Dalam sebagai salah satu bentuk masyarakat kecil dapat menjalankan seluruh fungsi kehidupan dalam masyarakatnya apabila tersedia *budget* energi yang

sesuai dengan tuntutan sosiobudaya, agar masyarakat ini dapat memelihara sistem sosial mereka sendiri dan sekaligus pula dapat memelihara sistem nasional keseluruhan (holistik).

Kurva "U" sebagaimana telah diutarakan, mengandung arti bahwa konsumsi energi pada sosiobudaya awal dan lanjutan selama sejarah hidup manusia hampir tidak banyak berbeda. Dalam hal ini kurva "U" dapat kita pahami sebagai berikut:

1. Apabila konsumsi energi per kapita adalah sama bagi dua atau lebih sosiobudaya yang berbeda kompleksitasnya, maka gaya hidup merekalah yang berbeda.
2. Kompleksitas suatu sosiobudaya terjadi melalui proses evolusi penggunaan energi, karena struktur masyarakat tersebut menuntut status dan peranan baru yang lebih banyak mengkonsumsi energi guna memelihara sistem sosial secara utuh.
3. Struktur masyarakat transisi pada dasar kurva "U" lebih kompleks daripada struktur masyarakat pada awal evolusi yang ditunjukkan pada kaki kurva "U" itu. Penurunan konsumsi energi per kapita di sini dapat diartikan bahwa energi itu dipergunakan untuk memelihara sistem sosial, sementara belum dapat menarik energi dari sumberdaya baru.
4. Apabila kemampuan teknologi semakin canggih, sehingga sumberdaya energi baru dapat dikuasai, barulah konsumsi energi per kapita meningkat jumlahnya.
5. Implikasi dari kurva "U" ini adalah kebijakan untuk berbagai masyarakat kecil hendaklah didasarkan pada *budget energi* guna memelihara sistem sosial mereka. Setidak-tidaknya bagi masyarakat kecil setaraf tribe, seperti masyarakat terasing, *budget energi* itu tidak kurang daripada

besaran energi yang pernah mereka dapatkan sebelum terjadi transformasi. Bagi masyarakat lebih kompleks yang setaraf lebih tinggi di atas tribe, diperlukan kelipatan dari besarnya anggota dan kompleksnya struktur masyarakat.

Bagi masyarakat kecil hari ini baik di kota maupun di desa masa antara tahun 1993-2018 adalah masa uji coba lepas landas. Dalam hal ini lepas landas sekaligus masuk ekonomi global yang penuh tuntutan kemandirian. Artinya dapatkah masyarakat kecil hari ini menjalani transformasi, siap memberikan andilnya dalam ekonomi global itu dengan tidak melepaskan kepribadian gaya hidup spesifik sosiobudaya asal LL mereka?

Kesimpulan

Masyarakat kecil Indonesia dalam periode tahun 1993-2018 dekat jaraknya dengan ekonomi dunia. Pada saat ini hingga masa 25 tahun berikutnya masyarakat kecil itu sedang menjalani uji coba apakah mereka dapat ikut saling tergantung dengan ekonomi global itu atau tidak. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan hendaklah lebih berhati-hati dalam hal ini, karena sumber energi bagi pembangunan sudah terhimpun di dalam masyarakat kecil itu. Apabila keliru dalam melaksanakan kebijakan pembangunan periode itu dapat berarti hilanglah peluang baik untuk menggunakan potensi swadaya yang besar sekali dari masyarakat kecil bagi pembangunan semesta.

Yang patut dicatat dalam rancangan pembangunan tahap II masa 1993-2018 adalah gaya hidup masyarakat kecil agar tetap pada kepribadian bangsa Indonesia. Hidup hemat dan cermat menghitung sumber

energi serta pandai menggunakan daur ulang sebagai salah satu bentuk hidup hemat yang dianjurkan dan perlu diteliti dalam pusat pengkajian. Misalnya perlu ada pusat pengkajian pertanian tradisional dan pertanian modern dalam satu wadah, untuk meneliti

baik-buruknya kemungkinan mengkombinasikan keduanya dan, menata sumber energi sebaik mungkin, seperti upaya menemukan formula besaran *budget* energi yang cocok dan kerjasama yang harmonis dalam bentuk koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Rachman, Ali M.A. "Energy Utilization and Social Structure: An Analysis of the Temuan Orang Asli of Peninsular Malaysia." Master Thesis, University of Malaya, Kuala Lumpur, 1980.
- Rachman, Ali M.A. *Social Integration and Energy Utilization* (akan terbit).
- Cook, E. "Flow of Energy in an Industrial Society." *Scientific American* 3 (224, 1971), 135-144.
- Rambo, A.T. "No Free Lunch: A Reexamination of the Energetic Efficiency of Swidden Agriculture" dalam *An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in Southeast Asia*, Ed. A.T. Rambo dan Percy E. Sajise.
- Rambo A.T. *Energy and Cultural Evolution* (akan terbit).
- Service, E.R. *Profile Sin Ethnology*. New York: Harper & Row, 1958.
- Service, E.R. *Primitive Social Organization: An Evolutionary Perspective*. New York: Random House, 1962.
- Service, E.R. *The Hunters*. New Jersey: Prentice Hall Inc., 1966.
- Service, E.R. *Cultural Evolutionism: Theory in Practice*. New York: Holt Rinehart & Winston, 1971.
- Service, E.R. *Origin of State and Civilization: The Process of Cultural Evolution*. New York: W.W. Norton, 1975.
- Kusdyantinah, Sri S. "Masyarakat Kecil Kumuh dan Daur Ulang: Kasus Metropolis Jakarta." Draft Thesis S2, 1990.

Pendidikan Rakyat dalam Organisasi-organisasi Non-Pemerintah: Pendidikan untuk Mobilisasi Sosial?

Salomon MAGENDZO

Salomon Magendzo mengontraskan sistem pendidikan yang disponsori pemerintah Chili dengan "pendidikan rakyat", suatu gerakan pendidikan berbasiskan masyarakat yang bercita-cita mengembangkan kemampuan orang-orang miskin dan mengikutsertakan mereka dalam transformasi masyarakat. Untuk tujuan ini PIIE (*the Interdisciplinary Program for Research in Education* atau Program Riset Interdisipliner dalam Bidang Pendidikan) organisasi non-pemerintah yang berafiliasi pada Gereja Katolik Chili, berdaya upaya menciptakan perubahan sosial dilandasi riset atas masalah-masalah pendidikan dan usaha promosi pembangunan pendidikan. Dalam tulisan ini Magendzo memaparkan beberapa proyek pendidikan rakyat yang dikembangkan oleh PIIE menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi kelompok-kelompok dan membantu mereka berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan pendidikan secara komprehensif.

DI Republik Chili pemerintah mendukung peranan politis dan strategis yang sentral dalam pembangunan sosial dan memegang kekuasaan untuk menentukan kesejahteraan umum. Sebagai akibat dari kebijakan yang sedemikian ini adalah berlakunya sistem pendidikan yang ha-

nya mempunyai hasil minimal bagi orang-orang miskin agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi. Padahal, di negara ini penduduk miskin sekurang-kurangnya merupakan 40% dari bangsa Chili.¹

Sejak permulaan sistem pendidikan senantiasa mempunyai fungsi pokok membina rakyat untuk kegiatan yang produktif. Akan

Alih bahasa oleh Sunarto nDaru Mursito dari karangan Salomon MAGENDZO, "Popular Education in Nongovernmental Organizations: Education for Social Mobilization?" setelah diterjemahkan dari bahasa Spanyol oleh Cristina Cardalda dalam *Harvard Educational Review* vol. 60, No. 1, 1990.

¹Lihat misalnya, Briones, Egana, Magendzo, dan Jara (1984).

tetapi karena ia memiliki akar-akarnya dalam nilai-nilai kelas menengah, maka sistem politik telah mengarahkan pendidikan menjadi sarana yang utama untuk pengembangan ideologi mobilitas sosial, dan dalam prosesnya telah menjejali sekolah-sekolah dengan ideologi nilai-nilai kelas menengah ini.

Mobilitas sosial dapat didefinisikan sebagai proses yang dilalui orang-orang atau kelompok-kelompok untuk menaiki tangga sosial menuju kelas-kelas yang lebih tinggi. Umpamanya, seseorang pada tingkat magang bisa mencita-citakan, melalui pendidikan, menjadi seorang manajer perusahaan. Ideologi ini telah benar-benar demikian dire-sapi oleh masyarakat Chili sehingga tuntutan-tuntutan dan aspirasi-aspirasi dirasakan secara luas, tanpa memperhatikan apakah peluang atau kesempatan mobilitas sosial itu mungkin ada.²

Dengan melaksanakan satu kurikulum yang sama di sekolah-sekolah, sistem pendidikan menciptakan ilusi persamaan kesempatan dan menjadi alat yang efisien untuk menghapus keanekaragaman. Meskipun dari luar masyarakat Chili mungkin tampak homogen, dalam kenyataannya ada perbedaan di dalam dan di antara kelompok-kelompok sosial. Rakyat yang bermigrasi dari desa ke kota, misalnya, berbeda dalam perilaku, kepentingan, kebudayaan, dan tradisi dari rakyat yang sudah berada di lingkungan perkotaan. Perbedaan ini tidak diperhitungkan dalam sistem pendidikan, yang memberlakukan jenis persekolahan seragam bagi seluruh rakyat, tanpa mengakui kebutuhan dan tuntutan kelompok-kelompok khusus.

Sistem pendidikan Chili yang disentralisasi menetapkan kebudayaan pihak yang

dominan ke atas orang-orang muda. Selanjutnya, media massa menghasilkan akibat-akibat yang opresif, karena dalam media massa kebudayaan dipahami melulu sebagai sarana manipulasi dan promosi konsumsi. Peranan media massa telah merusak aktivisme sosial jenis mana pun. Oleh karena itu, pendidikan untuk kepentingan aktivisme sosial memerlukan penggalakan humanisasi dan individualisasi hubungan-hubungan sosial.³

Dalam rangka mobilisasi sosial pendidikan telah dipahami oleh pihak-pihak yang melaksanakannya sebagai sinonim dari pendidikan rakyat.⁴ Ini berurusan dengan usaha memampukan para warga negara untuk memainkan peranan yang menentukan dalam pembangunan masyarakat demokratis yang adil. Seperti halnya didefinisikan sejak tahun 1973 oleh kalangan organisasi non-pemerintah (NGO) yang terlibat dalam program pendidikan rakyat, maka tujuan pokok dari jenis pendidikan ini adalah "pembangunan kembali struktur sosial". Pembangunan kembali ini terjadi di luar bidang kegiatan pemerintah dan di luar batas-batas praktek politik yang mapan. Ia mencoba menyusun kaitan-kaitan di antara individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat demi

³Bengoa (1988).

⁴Peristilahan "pendidikan untuk aktivisme sosial" dan "pendidikan untuk mobilisasi sosial" mengacu pada partisipasi aktif rakyat miskin di Chili dalam pembangunan kebudayaan dan politik negeri mereka. Istilah "pendidikan rakyat" juga digunakan oleh para pendidik masyarakat untuk mengartikan pendidikan yang mengembangkan partisipasi aktif rakyat berpendapatan rendah dalam pembangunan pendidikan, kebudayaan, dan politik Chili. Program "pendidikan rakyat" adalah program yang dikembangkan di daerah-daerah miskin Chili.

²Labarca (1987).

mengatasi fragmentasi sosial dan kurangnya keterpaduan.⁵

Tujuan pendidikan rakyat itu didasarkan pada gagasan membangun masyarakat yang partisipatoris dan demokratis. Dalam hal ini pendidikan rakyat dilawankan dengan "pendidikan untuk semua", jenis pendidikan yang oleh elite nasional diberlakukan untuk semua kelompok. Sebagai pengganti, pendidikan rakyat ini membutuhkan metode pendidikan yang secara radikal meragukan praktek-praktek otoriter dan penyaluran pengetahuan secara mekanis yang merupakan ciri khas pedagogi tradisional. Dia mengutamakan dialog, belajar dalam kelompok, dan menilai pengalaman para partisipan sebagai dasar untuk pelajaran dan pengetahuan yang lebih lanjut. Pengajarnya pun yang berlaku sebagai fasilitator dalam proses pendidikan kolektif, adalah seseorang yang mampu mempertanyakan secara kritis persepsi yang berbeda-beda tentang kenyataan dan tradisi, dan mampu menyumbangkan perumusan pengetahuan baru menyangkut masalah masyarakat miskin dan pelaksanaan kebijakan yang diinginkan oleh kaum miskin.

Tujuan mobilitas sosial dan mobilisasi sosial secara jelas dipertentangkan satu sama lain. Tujuan mobilitas sosial bagi perorangan adalah untuk beralih dari kelas sosial yang satu menuju kelas sosial yang lain. Dalam proses ini orang kadang-kadang kehilangan perasaan akan identitasnya, seperti halnya perasaan termasuk suatu kelompok atau kelas tertentu. Sedangkan, tujuan dari mobilisasi sosial adalah untuk memperkuat nilai-nilai kelompok dan meningkatkan rasa identitas sebagaimana hal-hal ini berkaitan dengan dinamika perorangan dalam suatu kelompok.

Secara historis kelompok-kelompok berbasis masyarakat di Chili telah mempromosikan program untuk reorganisasi dan pembangunan sosial melalui upaya mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi, usaha-usaha mereka terbatas dan telah dimarginalkan karena bersifat lokal dan kurang didukung pemerintah, meskipun demikian usaha-usaha tersebut bernilai.

Tulisan ini memaparkan hasil kerja organisasi-organisasi non-pemerintah yang telah menyumbang untuk mobilisasi sosial, khususnya berfokus pada kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh PIIE (*Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educacion* atau Program Riset Interdisipliner dalam Bidang Pendidikan), suatu organisasi yang mempromosikan proses-proses partisipatoris dengan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, menguatkan organisasi-organisasi masyarakat, dan pembangunan kembali struktur sosial Chili.⁶

Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educacion (PIIE)

PIIE adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan dalam tahun 1971 sebagai suatu unit akademis dari Universitas Katolik di Santiago, Chili. Pada tahun 1977 sebagai akibat perbedaan politik, program-programnya dibatalkan oleh universitas. Akan tetapi para anggotanya memutuskan melanjutkan kerja mereka sebagai suatu kelompok, dan mereka berafiliasi pada Akademi Humanisme Kristiani, suatu badan ciptaan Gereja Katolik untuk menghimpun kelompok-kelompok yang menghadapi kesulitan karena berselisih paham dengan pemerintah.

⁵Bengoa (1988).

⁶Wawancara dengan Zuniga (1986).

Sejak tahun 1977 PIIE mengembangkan proyek pendidikan mengacu kebutuhan kelompok-kelompok dan melanjutkan risetnya pada sistem pendidikan dan persekolahan yang standar. Sepanjang tahun-tahun ini PIIE telah meluaskan kegiatannya melampaui wilayah metropolitan memasuki propinsi-propinsi, khususnya memasuki daerah yang banyak mengalami kemerosotan ekonomi, sosial, dan budaya.

Tujuan PIIE adalah mengusahakan perubahan sosial dengan mengadakan riset pada problematik pendidikan dan mempromosikan pembangunan pendidikan. Untuk tujuan ini ia melakukan dukungan pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam perubahan sosial, dalam kegiatan seperti riset dan eksperimen. PIIE mengutamakan tiga bidang pokok pembangunan pendidikan: (1) sistem atau sub-sistem pendidikan; (2) pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah atau program pendidikan non-formal; (3) para partisipan dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pendidikan.

Tujuan PIIE itu dicapai dengan cara: (1) pencarian paham atau pengetahuan dasar untuk kepentingan merumuskan kebijakan pendidikan; (2) pengembangan inovasi dan alternatif untuk pembangunan sosial dalam pelaksanaan pendidikan; dan (3) dukungan untuk pengembangan tenaga pendidikan berbasis masyarakat dengan memudahkan partisipasi dalam pembangunan sosial dan pendidikan. Ketiga upaya ini semuanya harus ada demi menunjang organisasi-organisasi dan tenaga-tenaga pendidikan berbasis masyarakat.

Selain itu, PIIE berdaya upaya mencari gagasan atau metode baru yang lebih disesuaikan dengan kenyataan dan kepentingan kelompok miskin. Proyek-proyek yang dida-

sarkan pada komitmen ini diungkapkan berikut ini.

Program Pendidikan Serikat Pekerja Petani

Program ini merupakan hasil kerjasama antara PIIE dan suatu konfederasi serikat pekerja, Serikat Petani dan Serikat Buruh. Tujuan program adalah membantu pengembangan pemimpin, dan untuk meningkatkan partisipasi para anggota kelompok dalam satuan-satuan pertanian dalam rangka menguatkan organisasi dan membuat mereka menjadi lebih terpadu. Dalam tahap pelaksanaan, proyek menggunakan pendekatan kelompok dan pendekatan partisipatoris dan secara khusus merancang materi-materi pendidikan. Proyek mengutamakan dan menggalakkan penciptaan serta pengembangan tim-tim di dalam kesatuan yang secara progresif bertanggung jawab mengendalikan program-program pendidikan.

Pusat-pusat Pendidikan

Proyek ini bertujuan mengadakan pusat pendidikan dalam sebuah masyarakat marginal di desa Puente Alto. Dengan dukungan PIIE masyarakat ini mengutarakan pemikiran mereka tentang pendidikan. Anggota-anggota kelompok mulai mempertimbangkan kebutuhan mereka dan secara kolektif berpartisipasi dalam pelaksanaan rangkaian tindakan. Sedemikian jauh PIIE telah bekerja sama dengan pemuda-pemudi yang sedang mengembangkan kegiatan rekreasi dengan anak-anak. PIIE juga telah bekerjasama dengan para wanita yang menangani suatu bengkel produksi, sebuah organisasi ekonomi berbasis masyarakat yang menye-

lenggarakan latihan dalam memproduksi barang seperti layar atau pakaian dan mengajarkan unsur-unsur pokok administrasi serta pemasaran. PIIE juga telah mengadakan masa pendidikan bagi para pemimpin masyarakat, yang akan diuraikan kemudian. Tujuan proyek ini adalah mempersiapkan sumber-sumber daya pendidikan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.

Dukungan Pendidikan dan Metodologi Bagi Tim-tim Teknis Pedesaan

Usaha ini merupakan suatu proyek kerjasama yang dimulai pada tahun 1985 antara PIIE dan Masyarakat Profesi Pertanian. Masyarakat Pertanian mengorganisasikan berbagai tim teknis yang bekerja dengan organisasi-organisasi petani. Kepada organisasi ini ia memberi nasihat keuangan dan bantuan teknis.

Proyek ini dikerjakan di Chili Selatan dan Tengah. Dengan menekankan segi edukasional bantuan teknis, PIIE membantu tenaga profesional dan teknisi pertanian dalam penggunaan teknik pendidikan rakyat. Seminar-seminar dan kelompok-kelompok pendukung di lapangan merupakan bagian penting dari proyek, seperti halnya kerja bersama yang dibentuk untuk pembuatan materi-materi pendidikan.

Dukungan Bagi Petani-petani Muda

Sebagai suatu proyek kerjasama di antara Dewan Pendidikan orang-orang dewasa Amerika Latin, Masyarakat Pendukung Pengembangan Petani, "Pehuenche," dan PIIE, proyek ini dilaksanakan oleh tim-tim petani muda di daerah Talca dan Melipilla, dekat kota Santiago. Tujuannya adalah me-

ngangkat identitas para petani muda melalui masa penyiapan teknis dan sosial yang didasarkan pada pengalaman mereka sendiri. Kegiatan pendidikan membantu petani-petani muda itu menilai dan mempertanyakan kenyataan sosial mereka sendiri dan memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang perlu diambil.

Proyek untuk Pengakuan dan Pengembangan Pendidikan Rakyat pada Kaum Profesional

Bermodelkan proyek PIIE yang sukses pada kaum profesional dan para teknisi pertanian, program ini ditujukan bagi orang-orang profesi yang merupakan anggota lembaga, perserikatan, atau organisasi kebudayaan yang bekerja di dalam kelompok-kelompok orang miskin. Falsafah program didasarkan pada keyakinan bahwa orang perlu mendasarkan kegiatan pendidikan mereka sendiri atas rasa penghargaan dan pengakuan pada pengetahuan orang lain, pada hubungan antarpribadi yang demokratis, dan pada pengembangan kesadaran kritis. Program berlangsung selama suatu tahun akademis.

Suatu program serupa, yang bernama Pendidikan Rakyat untuk Profesi Kesehatan, baru-baru ini juga ditujukan pada kaum profesional yang bekerja dalam sektor pemeliharaan kesehatan. Di Chili para anggota tim-tim perawatan kesehatan telah bekerja di klinik-klinik rakyat di luar pelayanan kesehatan pemerintah. Tim-tim ini mencoba mengaitkan kebutuhan dasar rakyat dengan permasalahan kesehatan yang ada pada sektor-sektor terkebelakang. Meskipun berpengetahuan luas dalam bidang keahlian mereka, namun tenaga-tenaga profesional perawatan kesehatan tidak diajarkan untuk

memahami baik kondisi sosial maupun keadaan aneh orang-orang yang hidup dalam lingkungan marginal, dan mereka pun tidak mempunyai latar-belakang pendidikan yang mengarahkan pendidikan menuju tindakan. Pada kenyataannya, kaum profesional perawat kesehatan yang bekerja di lingkungan marginal mengakui bahwa pendidikan universitas telah menyiapkan mereka untuk memecahkan permasalahan masyarakat elite Chili daripada masyarakat miskinnya. Sekalipun demikian, melalui program itu para profesional perawatan kesehatan belajar mengenai kebudayaan rakyat dan metode pendidikan yang dapat membantu mereka mengintegrasikan praktek profesi mereka dengan kegiatan perawatan primer yang memupuk perkembangan sosial dan menguntungkan masyarakat terbelakang.

Program Tempat-tempat Belajar

Program ini dimulai oleh PIIE pada tahun 1977 untuk menolong anak-anak di lingkungan-lingkungan berpendapatan rendah yang mengalami kesulitan pendidikan di sekolah sebagai akibat tidak meratanya kesempatan pendidikan, suatu permasalahan yang gawat di Chili. Program didasarkan pada asumsi bahwa kelompok-kelompok mempunyai sumber-sumber daya pendidikan untuk melaksanakan tugas untuk proses perkembangan dan kemajuan kolektif. Selama sepuluh tahun program berlangsung, maka dalam tahun 1988 sepuluh ribu anak mendapatkan manfaat dari pelayanannya.

Program Bengkel Kepemimpinan

Program ini dimulai pada tahun 1981 sebagai proyek bersama PIIE dan *Centro de*

Investigacion y Desarrollo de la Educacion (Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan) untuk membina para pemimpin organisasi-organisasi masyarakat. Program ini dipikirkan dalam konteks berkuasanya rezim otoriter di Chili sejak tahun 1973, dan tujuannya adalah mendukung, memperkuat, dan menggalang potensi organisasional kelompok-kelompok melalui metode pendidikan rakyat. Suatu penilaian dari tim yang disertai tugas, mengungkapkan serangkaian masalah sehubungan dengan kemunculan, pembinaan, dan pemfungsian organisasi-organisasi masyarakat ini. Program mengadakan bengkel-bengkel untuk menunjang pembinaan pemimpin kelompok dan menggalakkan pendidikan berbasis kelompok. Strategi ini ditujukan pada mereka yang telah menjadi pemimpin di dalam organisasi-organisasi khusus dan yang berkepentingan pula untuk mewujudkan rencana-rencana mereka dalam jangka panjang. Pendidikan dilaksanakan selama lima bulan berdasarkan pengalaman mingguan mereka.

Dalam setiap tahap pendidikan pokok-pokok yang dibahas ditentukan oleh keprihatinan para partisan mengenai kelompok mereka. Dua masalah utama yang menjadi perhatian adalah: keadaan intern organisasi mereka masing-masing, dan hubungan organisasi dengan lingkungan sosial mereka.⁷

Mendasari dua programnya yang terakhir adalah gagasan memperkuat proses organisasi sosial sedemikian, sehingga orang-orang yang dimarginalkan mampu berpartisipasi dalam transformasi struktural masyarakat menuju masyarakat yang sepenuhnya menjamin hak-hak manusia dan warga negara.

⁷Vaccaro (1989).

Dua Pendekatan Pendidikan

Melalui kontak langsung dan berkesinambungan dengan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) telah mengembangkan program yang bermaksud memecahkan masalah-masalah khusus. Program ini melibatkan banyak interaksi kompleks dari pelaku-pelaku eksternal (wakil-wakil NGO) dengan kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang berkepentingan dengan pengembangan program. Kadang-kadang program diminta oleh anggota-anggota kelompok dan kadang-kadang program ditawarkan, tetapi paling sering program dihasilkan dari kontak-kontak antara NGO-NGO dan organisasi-organisasi yang mewakili kelompok. Secara bersama-sama NGO-NGO dan organisasi-organisasi menentukan program, ciri-ciri, dan tujuan-tujuannya.

Sekali tujuan telah dirumuskan, biasanya NGO lalu mencari dana dari lembaga-lembaga internasional. Lembaga-lembaga ini melakukan evaluasi yang luas tentang proyek yang akan disetujuinya. Setelah proyek disetujui, NGO biasanya mengatur dana-dana, dengan tingkat dana yang memenuhi lamanya kelangsungan program. Pada umumnya untuk mencapai tujuan proyek, sejumlah orang dari kelompok berkepentingan mengembangkan kemampuan untuk bekerja dan menerima bantuan teknis dari NGO.⁸

Para pendidik rakyat biasanya dibina dalam pendidikan persiapan, yang dikenal se-

⁸Mereka yang telah berpartisipasi dalam masa pembinaan pada umumnya dikenal sebagai "fasilitator", "pemantau", atau "pendidik rakyat". Dalam tulisan ini sebutan-sebutan tersebut dapat saling dipertukarkan.

bagai masa pembinaan dengan sponsornya PIIE. Di sini para profesional dan orang-orang dari kelompok yang berkepentingan bekerjasama menentukan kecakapan baku apa yang dibutuhkan kelompok khusus mereka, di samping bekerjasama mengembangkan kecakapan ini untuk dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan. Proyek-proyek merupakan instrumen yang memungkinkan para pendidik rakyat, dalam komunikasi yang erat dengan pelaku-pelaku dari luar, memperoleh kecakapan khusus mengadakan intervensi dan menghasilkan jenis kegiatan baru dalam kelompok mereka.⁹

Proses ini secara khusus mengikuti dua pendekatan yang sangat berbeda: pendidikan sebagai kegiatan fungsional dan pendidikan sebagai proses. Pendekatan yang pertama berpusat pada efisiensi teknis dan hasil yang dapat diukur. Dalam pendekatan ini biasanya terpenuhinya serangkaian tujuan dipandang lebih penting daripada akibat yang timbul dari proyek itu. Dengan kata lain, "pendidikan fungsional" lebih memperhatikan hasil (*outcome*) dari proyek daripada proses pendidikan yang terlaksana dalam proyek. Misalnya, satu proyek dirancang untuk memperlihatkan kepada sekelompok petani suatu jenis bibit yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat, tanpa mengusahakan kelompok petani itu mengerti kebutuhan dan kegunaan bibit tersebut bagi kelompok. Contoh yang lain adalah proyek menyiapkan para pendidik rakyat; sekali programnya selesai diorganisasikan, maka tidak diikuti tindak lanjut dan dukungan pada para pendidik itu.

Pendekatan kedua yang memandang pendidikan sebagai proses, bermaksud melampaui tujuan khusus sekali tujuan ini telah

⁹Vaccaro (1988).

tercapai, dan memikirkan kemungkinan lanjutan yang lebih luas dari proyek dan akibat-akibatnya pada organisasi komunitas. Pendekatan ini menekankan proses keikutsertaan dalam mengembangkan program. Ia mengusahakan keterlibatan aktif para partisipan dan penciptaan kelompok-kelompok komunitas. Pencapaian tujuan ini memerlukan seorang pendidik yang peka terhadap aspek-aspek yang seringkali dilalaikan pendekatan fungsionalis -- ringkasnya, aspek-aspek yang mampu menggalakkan mobilitasi sosial. Pendidik harus juga memperhatikan dan bertanggung jawab atas pembangunan kembali struktur sosial. Misalnya, dalam memperkenalkan jenis bibit baru kepada petani menurut pendekatan proses para pendidik akan mendiskusikan manfaat-manfaatnya bagi kelompok maupun arti pentingnya pengenalan teknologi baru untuk sektor-sektor pedesaan.

Dua pendekatan ini menampilkan cara pemikiran yang berlawanan tentang pendidikan. Pendekatan yang pertama menggunakan *dasar ketergantungan (dependency rationale)*, di dalam arti para partisipan mengikuti garis-garis pedoman proyek yang telah ditentukan. Ia menghasilkan pendidik-pendidik berbasis masyarakat yang tetap tinggal dalam batas-batas program khusus yang melatih mereka, artinya mereka meninggalkan komitmen mereka pada pendidikan sosial sekali mereka keluar dari bidang kegiatan proyek. Para pendidik ini pada umumnya mengikuti inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh orang lain daripada melaksanakan peranan yang lebih aktif dalam proses pendidikan.

Dalam pendekatan kedua yang mengikuti apa yang disebut *dasar mobilisasi sosial (social mobilization rationale)*, para partisipan tidak hanya berfokus pada kegiatan-

kegiatan proyek khusus mereka melainkan juga mengaitkannya dengan program-program yang lain. Mereka berpartisipasi dalam menyusun program dan memelihara komitmen mereka ketika bekerja dengan berbagai kelompok.

Dua pendekatan itu berbeda dalam ciri peranan pendidikan yang dilakukan partisipan, yaitu sekurang-kurangnya ada tiga perbedaan. Satu adalah peranan pendidik berdasarkan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pendidikan komprehensif. Dalam peranan ini para pendidik rakyat menciptakan suatu "ruang kognitif" dengan secara hati-hati mengidentifikasi tujuan-tujuan, merencanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai, dan mengembangkan partisipasi aktif para pelajar dalam proses pendidikan. Ruang kognitif ini dibatasi oleh kondisi yang memungkinkan pelajar mendapatkan pengetahuan dan menggunakannya dalam kehidupan *praxis* mereka. *Jenis kegiatan ini mempunyai akibat yang abadi.*

Peranan pendidikan kedua adalah menggunakan metode partisipatoris, tetapi tidak mempunyai hubungan riil dengan penciptaan ruang kognitif dalam arti yang lebih permanen. Misalnya, sekelompok orang dan seorang pendidik bekerjasama mengorganisasi suatu peristiwa budaya, tetapi mereka tidak mencoba mengorganisasi kelompok yang akan mengembangkan suatu pusat kebudayaan yang permanen; jelasnya jenis kegiatan ini hanya mempunyai akibat jangka pendek. Akhirnya, dalam peranan yang ketiga para pendidik rakyat melulu melakukan suatu kegiatan, tanpa berurusan dengan pendidikan yang sebenarnya. Contoh kegiatan demikian meliputi seperti mengumpulkan bahan pangan, membangun suatu pusat kebudayaan, menghidupkan kelompok, dan lain-lain.

Hubungan antara jenis peran kependidikan seorang pendidik rakyat dan dua pendekatan pendidikan yang telah dikemukakan adalah penting. Pendidik yang mengembangkan kegiatan pendidikan komprehensif berkemampuan mengerti peran-peran yang mendorong mobilisasi sosial di dalam kelompok. Para pendidik sedemikian ini memperhatikan dua hal baik proses belajarnya maupun kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Ide-ide mereka akan menempatkan mereka dalam kuadran kanan bawah Diagram 1. Sebaliknya, mereka yang melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan nilai pendidikannya akan menempatkan diri dalam kuadran kiri atas, di mana pendekatan ketergantungan dan peranan si aktivis bertemu. Gerakan sosial apa pun berurusan dengan beberapa sektor masyarakat, kalau menghendaki perubahan namun tanpa memandang perubahan ini sebagai bagian dari proses pendidikan, dapat ditempatkan dalam kuadran kiri bawah.

DIAGRAM 1

INTERAKSI ANTARA PENDEKATAN DAN JENIS KEGIATAN PENDIDIKAN



Adalah ciri suatu orientasi teknokratis mengarah pada kegiatan pendidikan yang mempunyai tujuan, rencana, dan bahkan metode partisipatoris yang khusus; tetapi pendekatan ketergantungan tampaknya

kuat. Hal ini terdapat dalam kuadran kanan atas.

Riset Atas Dampak Proyek-proyek Pendidikan

Riset merupakan kegiatan penting proyek-proyek PIIE untuk pendidikan rakyat, dan telah terwujud dalam berbagai bentuk dan pada tahap yang berbeda-beda. Pada umumnya ide untuk program-program tumbuh dari riset sebelumnya, dari kebutuhan kelompok-kelompok yang berpartisipasi, dan dari pengalaman tim-tim profesional. Selama fase perkembangan, para perancang proyek melakukan penaksiran kebutuhan-kebutuhan dan sistematisasi maupun evaluasi kegiatan-kegiatan, yang memungkinkan mereka melakukan perubahan berdasarkan informasi yang mereka peroleh.

Sekarang ini fokus PIIE adalah pada dampak sosial dari kegiatan pendidikan. Zuniga mengartikan hal ini sebagai akibat sosial yang dihasilkan oleh proyek khusus di dalam kelompok, di luar tujuannya semula.¹⁰ Dengan kata lain, hal-hal demikian ini ikut berperan: jenis organisasi yang diciptakan untuk menangani problem yang sudah ditentukan, hubungan antara organisasi ini dan lingkungan sosial, kemampuan merumuskan kepentingan-kepentingannya pada negara dan masyarakat, keterlibatan para pendidik dalam kegiatan kelompok lain selama proyek khusus, dan ciri politis proyek-proyek itu.

Memeriksa dampak proyek pendidikan rakyat yang disponsori oleh organisasi-organisasi non-pemerintah merupakan bidang riset yang penting. Sebuah studi¹¹

¹⁰Wawancara pribadi (1986).

¹¹Magendzo dan Medina (1988).

memperhatikan dampak tiga program pendidikan rakyat yang terkenal di Chili: *the Learning Workshops*, *Workshops for Community Leaders*, dan *We Joined! And Now?* Program yang terakhir ini dikembangkan pada tahun 1980 oleh CIDE (*Centro de Investigacion y Desarrollo de la Educacion*) atau Pusat Riset dan Pengembangan Pendidikan, dan merupakan "program pendidikan mengenai kehidupan seksualitas menyangkut pasangan-pasangan lingkungan berpendapatan rendah" yang merupakan anggota kesatuan paroki.¹² Sebagai pengalaman dalam pendidikan rakyat proyek membatasi diri menitikberatkan pada hubungan antara suami-isteri dan hubungan antara orangtua-anak.

Gagasan di balik studi ini adalah untuk menentukan bahwa organisasi non-pemerintah seperti PIIE dan CIDE tidak hanya menciptakan pendekatan pendidikan yang baru untuk memecahkan masalah-masalah khusus, melainkan juga mencapai tujuan-tujuan yang berikutnya dengan membina para pendidik di dalam kelompok-kelompok:

1. Pelibatan para pendidik berbasiskan kelompok di luar bidang program yang telah ditentukan;
2. Pemantapan kesinambungan penyiapan para pendidik baru, demikian sehingga pekerjaan mereka tidak berantakan atau hilang; dan

3. Penekanan peranan mendidik dari partisipan dalam kerangka kegiatan pendidikan rakyat.

Sejumlah 130 orang mengambil bagian dalam studi ini: 74 orang dari program *the Learning Workshop*, 24 orang dari program *the Leaders Workshop*, dan 32 orang dari program *We Joined! And Now?* Suatu instrumen survei dirancang yang meliputi 38 pertanyaan khusus, dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data berikut:

1. Jumlah para pendidik berbasiskan masyarakat yang terlibat dalam program atau kelompok sebelum dan sesudah masa penyiapan yang disponsori PIIE atau CIDE;
2. Jumlah dan jenis program atau kelompok di mana para pendidik berbasiskan masyarakat terlibat sebelum dan sesudah penyiapan mereka dalam proyek yang disponsori PIIE atau CIDE;
3. Tingkat otonomi para pendidik berbasiskan masyarakat yang dicapai setelah penyiapan;
4. Jenis peranan mendidik yang dimainkan para pendidik sebelum dan sesudah penyiapan mereka; dan
5. Nilai yang menggerakkan kegiatan para pendidik rakyat itu sebagai pendidik.

Pada umumnya studi ini mendapati bahwa organisasi non-pemerintah bekerja di kuadran kanan bawah dalam Diagram 1 (yaitu, mereka mempromosikan kegiatan yang lebih mendidik dan menggunakan alasan mobilisasi sosial) dan mempunyai peranan mendidik yang sungguh-sungguh dalam kelompok. Hasil riset menunjukkan bahwa upaya pendidikan yang dibawakan oleh tiga proyek khusus itu tidak mengungkap keterlibatan para partisipan dalam kegiatan-kegiatan kelompok. Data menun-

¹²Program ini meskipun bukan bagian PIIE dipilih karena CIDE dan PIIE dapat dipandang NGO-NGO yang paling representatif dalam bidang pendidikan di Chili. Program (*We Joined! And Now?*) adalah satu dari program yang paling luas menyiapkan para pendidik rakyat, dan keanggotaannya akan memungkinkan kita memperluas analisis tentang dampak mendidik dari NGO-NGO dalam kerangka kegiatan pendidikan rakyat.

jukkan bahwa sebagian besar dari yang diwawancarai (60%) sudah aktif dalam program dan kelompok masyarakat sebelum mereka ikut serta dalam kegiatan-kegiatan penyiapan. Hasil ini sesuai dengan temuan dari studi kasus sebelumnya di mana masing-masing partisipan sudah terlibat dalam kelompok atau organisasi masyarakat sebelum mengikuti proyek yang disponsori oleh PIIE atau CIDE.¹³ Komitmen kerja dalam proyek sosial tampaknya bukan merupakan hasil dari keikutsertaan orang-orang ini dalam program pendidikan, melainkan lebih berasal dari pengalaman pribadi dan penghayatan hidup dalam kelompok.

Meskipun demikian, jumlah dan keanekaragaman program dan kelompok di mana mereka yang diwawancarai telah terlibat, tampaknya dipengaruhi oleh masa pendidikan dan keikutsertaan dalam program yang telah disebutkan di atas. Sebelum diikutsertakan dalam masa pendidikan ini, 86 dari 130 orang yang diwawancarai telah aktif dalam 160 kelompok. Setelah menjalani pendidikan, mereka meningkatkan partisipasinya dalam 190 kelompok. Di samping itu, sebagian terbesar program dan kelompok yang mereka pilih sebelum masa pendidikan ini bersifat keagamaan (42%). Setelah masa pendidikan, 31% program yang diikuti para pendidik rakyat ini berhubungan dengan pengembangan pribadi. Juga kelompok politik bertambah dari 4% menjadi 7% dari seluruh kelompok. Akan tetapi, para pendidik rakyat dalam program *We Joined! And Now?* yang lebih erat berkaitan dengan Gereja, hanya menunjukkan perubahan kecil dalam jenis program.

Semua hasil survei dinyatakan sebagai positif, sejauh memperlihatkan tingkat par-

tisipasi yang lebih tinggi dari mereka yang diwawancarai dalam kegiatan kelompok yang berbeda. Tetapi jenis temuan ini ditunjukkan kepada mereka sendiri, mereka membaik-baikkan jawaban mereka. Pada umumnya mereka berkata bahwa keanggotaan dalam sejumlah kelompok yang lebih besar dan beraneka ragam telah mempunyai akibat yang berlawanan pada diri mereka. Mereka merasa telah tumbuh sebagai manusia dan telah memperkaya hidup mereka dengan mengambil bagian dalam sejumlah program yang lebih besar, tetapi mereka juga mengalami banyak kepenatan fisik sehingga biasanya menyebabkan lebih rendahnya tingkat efisiensi. Orang-orang yang diwawancarai ini menunjukkan kekecewaan mereka atas sejumlah kecil orang yang ingin menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan kelompok, namun pada gilirannya menyebabkan mereka mencoba memperhatikan lebih banyak bidang sehingga mungkin lupa mempelajari beberapa masalah secara lebih mendalam.

Pentinglah disebutkan bahwa setelah masa persiapan, 27 dari seluruh 130 pendidik rakyat yang diwawancarai (21%) melanjutkan bekerja hanya dengan program yang telah mendidik mereka. Duapuluh dua orang dari keseluruhannya itu (17%) juga berpartisipasi dalam program lain. Sedangkan sisanya, 38 orang (29%) tidak turut serta dalam kegiatan apa pun sesudahnya, dan 43 orang (33%) ikut serta dalam kegiatan dengan kelompok lain daripada dengan kelompok di mana mereka telah berpartisipasi. Pada umumnya aktifnya berpartisipasi bersifat sebentar-sebentar, di saat-saat ketika para pendidik rakyat aktif dalam program pendidikan dan pada saat lain tatkala tidak ada aktivitas demikian.

Pada saat studi ini dilakukan -- yaitu se-

¹³Magendzo (1987).

panjang tahun 1987 -- tujuan menciptakan sumber daya pendidikan yang permanen pada tingkat kelompok tidak tercapai. Sumber daya pendidikan yang bersifat permanen dapat dimengerti sebagai organisasi para pendidik rakyat yang mengorganisasikan program berlainan dalam kelompok-kelompok dengan maksud mengintegrasikan dan merencanakan usaha perorangan lebih efisien pada saat tim profesional meninggalkan program. Alasan untuk kurangnya koordinasi demikian adalah bermacam-macam: (1) kurangnya imbalan uang yang memaksa para pendidik mencari pekerjaan alternatif; (2) ide kerja sukarela yang biasanya melekat pada pekerjaan kelompok; (3) kelelahan orang karena para pendidik rakyat harus melaksanakan terlalu banyak hal sekaligus; dan (4) kenyataan bahwa proyek yang dibiayai oleh pihak luar cenderung menentukan tujuan melampaui tujuan yang muncul di dalam kelompok, yang memang lebih bermakna untuk mobilisasi sosial.

Meskipun demikian, peranan yang dibawakan oleh mereka yang diwawancarai itu berarti. Yaitu, 74% dari mereka yang diwawancarai berpartisipasi dalam kelompok dan program setelah training, pertama-tama merasa diri mereka sebagai pendidik, bukan sebagai aktivis atau organisator kelompok. Hal ini lebih nyata lagi kalau kita memperhatikan program khusus, di mana, 90% dari mereka yang diwawancarai berpartisipasi dalam *the Leadership Workshop* dan 87% dari mereka yang berpartisipasi dalam *the Learning Workshops* pertama-tama merasa diri sebagai pendidik.

Temuan riset juga menunjukkan bahwa para partisipan telah mencapai tingkat sumber daya yang tinggi untuk beberapa kelompok di mana mereka berpartisipasi dalam menyusun acara penyiapan; sekitar 89%

melaporkan bahwa mereka telah mendorong partisipasi orang-orang lain; dan 80% telah berpartisipasi dalam merencanakan tahap-tahap proyek yang lain; serta kira-kira 27% dari mereka yang diwawancarai itu melaporkan bahwa mereka secara independen telah membentuk kelompok. Hasil ini karenanya memperlihatkan bahwa masa pendidikan dan keterlibatan dengan program yang berlainan mempunyai pengaruh positif pada tingkat kemandirian para partisipan dan menggalakkan mobilisasi sosial.

Mengenai konsepsi pendidikan masyarakat dari para pendidik rakyat, menunjukkan bahwa mereka yang diwawancarai cenderung memaparkan usaha mereka sebagai tugas yang menuntut waktu dan tenaga mereka. Sekitar 80% dari yang diwawancarai mengharapkan agar partisipasi mereka hendaknya dihargai oleh negara. Kuesioner tidak meminta keterangan tentang apa yang mereka maksudkan dengan "penghargaan oleh negara" ini, tetapi tampaknya mengacu pada pengakuan akan peranan mereka sebagai suatu tugas. Di samping itu, 71% dari mereka yang diwawancarai memahami keikutsertaan mereka dalam program pendidikan pada dasarnya bersifat suka rela. Mereka tidak memandangnya "hanya seperti tugas yang lain", dan karena itu tidak melihatnya sebagai alternatif untuk menunjang nafkah. Dalam hal ini seharusnya ditanyakan apakah NGO-NGO telah mempengaruhi persepsi tersebut. Barangkali pemberian gaji bagi para pendidik berdasarkan masyarakat dapat merupakan alternatif di daerah berpendapatan rendah. Bahkan meskipun konsep tentang pekerjaan sedang berubah karena keadaan ekonomi di Chili, perubahan ini tidak meliputi pendidik berdasarkan masyarakat, yang pekerjaannya masih dimengerti sebagai lebih erat berhubungan

an dengan berkhotbah daripada bekerja.¹⁴

Dalam bagian kedua wawancara, mereka yang diwawancarai secara luas mendebat jawaban mereka semula tentang mengajar sebagai tugas yang potensial. Mereka mengemukakan alasan berikut untuk menerangkan mengapa demikian tinggi persentase orang yang diwawancarai mendefinisikan usaha mereka sebagai komitmen sukarela:

1. Jawaban diberikan tanpa banyak menganalisis pokok persoalan atau implikasinya;
2. Karena ciri "komitmen" itu pekerjaan benar-benar tidak dapat menuntut imbalan;
3. Hilangnya ciri kesukarelaan dalam mengajar akan merongrong ide pendidikan rakyat dan melalui proses seleksi akan membuang sejumlah orang yang berharga; dan
4. Ciri Kristiani dalam kegiatan para pendidik masyarakat itu membuat kegiatan itu bernilai suatu panggilan.

Meskipun demikian, dari mereka yang diwawancarai dalam survei pertama menyatakan bahwa pekerjaan pendidik seharusnya bersifat sukarela, 60% mengubah pendapatnya sesudah itu. Setelah mendalami persoalannya, mereka menunjukkan bahwa seha-

rusnya ada tindakan positif untuk memperbaiki (menggaji) kegiatan pendidikan rakyat.

Akhirnya didasarkan pada pendapat-pendapat yang baru kita paparkan dan mempertimbangkan kemampuan para pendidik melaksanakan program mereka maupun jenis kegiatan pendidikan yang mereka kembangkan, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka yang diwawancarai bisa diletakkan di kuadran kanan bawah Diagram 1, di mana terjadi pertemuan antara pendekatan mobilisasi sosial dan kegiatan pendidikan yang lebih besar. Akan tetapi, menimbang apa yang terjadi dengan para pendidik ini pada saat ikatan mereka dengan proyek berakhir, sebagai gantinya maka mereka harus diletakkan pada kuadran kanan atas di mana pendekatan ketergantungan dan kegiatan pendidikan yang lebih besar bertemu.

Hasil-hasil penyelidikan ini memperlihatkan bahwa organisasi non-pemerintah (seperti PIIE) seharusnya menyesuaikan sumbangan konkrit mereka dengan makin memobilisasi masyarakat lebih lanjut melalui pendidikan. Tak seorang pun bisa menyangkal pentingnya NGO-NGO dalam kehidupan bernegara. Hal ini pertama-tama terbukti oleh pendirian dan perkembangan sektor kelembagaan yang menganalisis pengalaman sosial. Sudut pandang ini memberikan perangkat kriteria alternatif untuk mengevaluasi program dan keputusan pemerintah. Kedua, NGO-NGO telah menguatkan kehidupan warga negara melalui pengembangan dan penggunaan sistem kerja yang partisipatoris.

Bahwa mereka yang terlibat dalam tiga program ini tidak memadukan kekuatan untuk mengembangkan badan koordinasi para pendidik rakyat dalam masyarakat, berarti

¹⁴Rakyat di daerah berpendapatan rendah telah tergeser dari pasaran kerja selama dasawarsa yang lalu dan mengalami pengurangan drastis dalam pendapatan mereka. Tantangan subsistensi telah mereka jawab secara kreatif, yang menyebabkan suatu fenomena baru: organisasi ekonomi berbasiskan kelompok. Organisasi ini meliputi bengkel kerja produksi, kelompok pembela konsumen, persatuan penyewa, dan kelompok kesehatan. Organisasi ini dikelola seperti bisnis (Klenner & Vega, 1986) dan telah mengalami tingkat keuntungan maupun kapitalisasi. Dalam hal ini ada pertumbuhan dan pembiakan modal, yang terjadi karena terjadinya produksi barang dan jasa.

organisasi seperti PIIE dan CIDE, yang mengharapkan mobilisasi sosial, haruslah tetap melakukan proses evaluasi-diri yang sungguh-sungguh. Evaluasi ini hendaknya menjelaskan mengapa perkembangan perasaan harga diri para pendidik dan peningkatan perencanaan sosial mereka tidak menghasilkan kerjasama yang diharapkan di antara proyek yang berlainan di kelompok-kelompok, sehingga membatasi kemungkinan per-

tumbuhan dan pelibatan rakyat dalam jumlah yang lebih besar. Untunglah, lembaga-lembaga non-birokratis seperti lembaga yang dikaji ini mampu mengadakan kritik-diri maupun mengambil bagian dalam keinginan meningkatkan praktek dan prosedur riset. Praktek pendampingan merupakan contoh bagaimana peningkatan itu dapat terjadi dan bagaimana sumber-sumber daya pendidikan sedang mulai dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bengoa, J. "La educación para los movimientos sociales" [Education for social movements]. *Proposiciones*, 15 (1988): 12-41.
- Briones, G. Egana, L., Magendzo, A., & Jara, A. *Desigualdad educativa en Chile* [Educational inequality in Chile]. Santiago: Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, 1984.
- Klenner, A., & Vega, H. El apoyo a la generación de ingresos en la economía de la pobreza [Support for generating income in the economy of poverty]. In *Del macetero al potrero; o de la micro al macro. El aporte de la sociedad civil a las políticas sociales* [From the gardener to the herdsman; or from micro to macro. Civil society's contributions to social policies]. New York: Columbia University, 1986.
- Labarca, G. "Educación formal y movimientos sociales: Las personas de las organizaciones sociales sobre el sistema escolar" [Formal education and social movements: People from social organizations speak about the school system]. *Proposiciones*, 15 (December, 1987).
- Magendzo, S. *Transferencia y apropiación en proyectos de educación popular: Identidad del educador popular, seis relatos de vida* [Transference and appropriation in popular education projects: Identity of the community-based educator, six life stories]. Santiago: PIIE Studies, 1987.
- Magendzo, S., & Medina, A. *Transferencia y apropiación de la capacitación y permanencia en programas de educación popular de organismos no gubernamentales* [Transference and appropriation in the preparation process and sense of permanence in popular education programs sponsored by NGOs]. Santiago: PIIE Studies, September 1988.
- Vaccaro, L. *El proceso de transferencia y apropiación en proyectos comunitarios: Marco de referencia para su análisis* [Transference and appropriation processes in community-based projects. A framework for analysis]. Internal Document, PIIE, Santiago, 1988.
- Vaccaro, L. *Transferencia y participación en intervenciones educativas comunitarias. Marco de referencia para un análisis* [Transference and participation in popular education interventions: A framework for analysis]. Internal Document, PIIE, Santiago, January 1989.

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

I. MASALAH KTT ASEAN KE-4

IV. KERJASAMA NON-PEMERINTAH

II. KERJASAMA EKONOMI

- A. Kerjasama Pemuda ASEAN
- B. Kerjasama Lingkungan Hidup

- A. Kerjasama Pariwisata dan Perdagangan
 - Forum Pariwisata ASEAN

- V. MASALAH KEAMANAN
 - Kerjasama Keamanan

- B. Kerjasama Perdagangan ASEAN
 - Perdagangan Preferensi

VI. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- C. Kerjasama Industri Mineral dan Energi
 - Kerjasama Perminyakan ASEAN

- Hubungan ASEAN-Jerman

III. KERJASAMA NON-EKONOMI

- Pertemuan Kelompok Kerja RTFV ke-6

VII. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- Pertemuan Anggota SNC dengan Ketua Bersama PICC

I. MASALAH KTT ASEAN KE-4

Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 3 Januari 1991 bahwa: (1) untuk menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan baru yang mewarnai situasi politik dan ekonomi dunia, penyelenggaraan KTT ASEAN ke-4 tahun 1991 diharapkan dapat menetapkan strategi dan arahan baru bagi kerjasama ASEAN; (2) ASEAN dituntut untuk meningkatkan kemauan politik dalam meningkatkan kerjasama ekonominya; (3) pada dekade 1990-an ASEAN perlu menetapkan berbagai langkah baru terutama untuk menghadapi: (a) perubahan yang terjadi di berbagai kawasan dunia seperti pembentukan Pasar Tunggal Eropa 1992; (b) gejala regionalisme di kawasan Amerika; (c) proses liberasi ekonomi negara-negara Eropa Timur dan dinamika kawasan Pasifik; (d) kemungkinan gagalnya Putaran Uruguay yang akan mempunyai dampak luas pada perdagangan global maupun perdagangan antar negara ASEAN dengan negara-negara di dunia; (4) ASEAN perlu memikirkan kerangka kerjasama baru untuk menghadapi era pasca Kamboja; (5) kerjasama perdagangan antara ASEAN dengan mitra dialognya, terutama untuk memperbaiki akses barang-barang ASEAN ke pasaran negara-negara mitra dialog, dan kerjasama investasi termasuk alih teknologi, masih perlu ditingkatkan; (6) pada akhir tahun 1990 prospek penyelesaian masalah Kamboja secara damai dan menyeluruh tampak semakin mendekati tahap yang menentukan; (7) tahun 1990 ditandai dengan perkembangan-perkembangan yang seringkali penuh kontras dan kontradiktif serta sekaligus merupakan tahun peralihan dan penuh ketidakpastian. Di satu pihak terdapat banyak harapan dan peluang baru namun di lain pihak sarat dengan tantangan maupun permasalahan baru; (8) letusan krisis Teluk akibat serbuan Irak ke Kuwait 2 Agustus 1990 yang diikuti dengan aneksasi Kuwait oleh Baghdad merupakan ujian pertama atas konstalasi politik dunia pasca perang dingin; (9) dunia internasional merasa gembira dengan perkembangan yang terjadi menyangkut semangat kerjasama Dewan Keamanan PBB tahun 1990, karena kelima anggota Tetap Dewan telah mampu menyelaraskan langkah mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia; (10) keselarasan itu hendaknya jangan sampai menjurus ke arah pengaturan masalah dunia yang didikte oleh ke-5 anggota tetap DK PBB, meskipun hal ini belum terjadi tetapi perlu diwaspadai dan jangan sampai merugikan negara-negara kecil atau menengah (*Suara Karya*, 4-1-1991).

II. KERJASAMA EKONOMI

A. KERJASAMA PARIWISATA DAN PERDAGANGAN

- *Forum Pariwisata ASEAN*

Ketua Panitia Pelaksana *ASEAN Tourism Forum* (ATF) ke-10 1991 Tuti Sunario mengatakan kepada Kompas tanggal 17 Desember 1990 bahwa: (1) ATF ke-10 yang akan berlangsung di Bandung tanggal 12-16 Januari 1990 merupakan ajang pembuka untuk memperlihatkan kepada dunia internasional tentang kekuatan kerjasama ASEAN; (2) melalui ATF ASEAN ingin menunjukkan kekayaan, keanekaragaman dan produk-produk yang komplementer dari para anggotanya serta membuat kawasan ini mencuat sebagai tujuan wisata utama para wisatawan dunia; (3) dalam ATF ke-10 ini akan dilangsungkan pertemuan para Menteri Pariwisata negara anggota ASEAN dan diselenggarakan *Travel Trade Exchange* (TRAVEX) yang merupakan komponen kunci penyelenggaraan ATF 1991; (4) TRAVEX merupakan arena pertemuan para penjual produk dan jasa pariwisata seperti hotel, biro perjalanan, perusahaan penerbangan dan persewaan mobil (*Kompas*, 19-12-1990).

Sekretaris Panitia Nasional ATF 1991, Drs. Udin Saefudin mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 30 Desember 1990 bahwa: (1) ATF 1991 akan dihadiri enam menteri pariwisata ASEAN, para ahli pariwisata, pengusaha hotel, biro perjalanan, wartawan dan penulis pariwisata dan wisatawan dari 24 negara; (2) diharapkan ATF 1991 akan diliput oleh 90 orang wartawan dan 60 orang di antaranya dari luar negeri; (3) persiapan kegiatan ATF dapat diselesaikan dengan baik termasuk transportasi udara, darat dari Jakarta ke Bandung dan hotel bagi para peserta serta rencana kunjungan ke obyek wisata dan kegiatan kesenian yang akan disajikan (*Angkatan Bersenjata*, 3-1-1991).

Kepala Humas Diparda Jabar, Rahayu Wikanda, mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 5 Januari 1991 bahwa: (1) Diparda Jabar akan menyelenggarakan Pekan Pariwisata Jawa Barat pada tanggal 10-17 Januari di Plaza Baneuy Perma untuk menyambut ATF 1991 di Bandung; (2) penyelenggaraan Pekan Pariwisata ini sangat tepat karena wisatawan dari mancanegara akan membanjir; (3) kehadiran wisatawan mancanegara merupakan kesempatan yang berharga bagi peserta Pekan Pariwisata, terutama untuk mempromosikan

sikan barang-barang produksi dalam negeri yang saat ini mampu bersaing di pasaran internasional (*Angkatan Bersenjata*, 8-1-1991).

Ketua Dewan Pariwisata Malaysia, Syed Mohamed Aidid mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 8 Januari 1991 bahwa: (1) enam negara anggota ASEAN akan bekerjasama meningkatkan pariwisata di wilayah Asia Tenggara dengan melakukan promosi bersama untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing yang berkunjung lebih lama di wilayahnya; (2) Muangthai memulai program itu ketika kapal pesiar negaranya "Puteri Andanan" melakukan pelayaran pertama di Pulau Pinang bulan Desember 1990; (3) menjalin kerjasama seperti itu sangat penting karena jumlah wisatawan di setiap negara anggota ASEAN tidak sama; (4) telah tiba waktunya bagi semua negara anggota ASEAN bekerjasama, di samping juga mempersiapkan diri menyambut Tahun Kunjungan ASEAN 1992; (5) dengan memperpanjang rute pelayaran secara langsung akan meningkatkan jumlah wisatawan (*Antara*, 9-1-1991).

Ketika membuka Panel Diskusi Kepariwisata Keluarga Besar Golkar di Bandung tanggal 7 Januari 1991, Ketua DPD Golkar Jabar, H. Agus Muhyidin mengatakan bahwa: (1) pembangunan kepariwisataan Indonesia saat ini dinilai memiliki momentum sangat penting dan strategis dengan adanya ATF 1991 di Bandung dan Tahun Kunjungan Indonesia 1991; (2) momentum yang baik itu perlu inovasi kreatif dan terpadu dari seluruh warga negara untuk mendorong suksesnya kepariwisataan di tanah air; (3) kepariwisataan mempunyai nilai tambah, baik dalam aspek sosial budaya, sosial ekonomi maupun sosial politik, karenanya sangat tepat jika selaku warga negara yang berwatak pejuang serta setiap kader Orpol dan Ormas khususnya Golkar mengambil prakarsa kreatif untuk menyukseskan ATF dan VIY 1991; (4) pembangunan sektor kepariwisataan yang tengah digalakkan memerlukan dukungan dan keterpaduan dari sektor-sektor lainnya sehingga konsistensinya tetap terpelihara dan terjamin, terutama untuk memelihara dan membina kepribadian bangsa serta mutu kelestarian sumber daya dan lingkungan hidup; (5) pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat harus tetap mengarah pada upaya untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa serta menanamkan jiwa semangat dan nilai-nilai luhur bangsa guna lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional; (6) momentum yang baik ini hendaknya mengubah setiap warga negara untuk memanfaatkan potensi budaya dan sumber daya alam yang kita miliki (*Antara*, 10-1-1991).

Ketika melakukan inspeksi pada apel kesiapan dan pengaman ATF 1991 di Silang Monas Barat Jakarta, tanggal 9 Januari 1991, Menparpostel Soesilo Soedarmanto mengatakan bahwa: (1) usaha kepariwisataan nasional yang dicanangkan tahun 1991 ini sebagai tahun kunjungan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi keberhasilannya memerlukan kegotongroyongan dari seluruh unsur, baik kalangan Sipil, ABRI dan Polri maupun kalangan usaha kepariwisataan dan dukungan seluruh lapisan masyarakat; (2) bila dilihat dari kesiapan pengamanan dan ketertiban, maka pelaksanaan kegiatan Tahun Kunjungan Indonesia 1991 akan berjalan sukses dan penuh kemantapan; (3) kepariwisataan nasional telah dicanangkan untuk menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat, terutama untuk lebih memperbesar dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang sekaligus peningkatan penyerapan tenaga kerja serta perluasan usaha; (4) kesiapan dari unsur-unsur pengamanan ATF merupakan salah satu kegiatan penting dalam tahun kunjungan Indonesia 1991; (5) ATF merupakan suatu forum yang dihadiri oleh tokoh-tokoh kepariwisataan internasional, karenanya keberhasilannya akan membawa arti penting bagi Indonesia. Keberhasilan ATF akan memperbesar kepercayaan yang lebih besar dari luar negeri atas kemampuan Indonesia untuk menyelenggarakan konperensi tingkat internasional; (7) ATF 1991 merupakan ajang latihan bagi Indonesia untuk menghadapi konperensi-konperensi yang lebih besar pada bulan April 1991 yakni PATA Mart di Jakarta, PATA World Charter dan Konperensi PATA di Bali serta konperensi para Menteri Telekom negara-negara OKI di Bandung (*Angkatan Bersenjata*, 11-1-1991).

Siaran pers *ASEAN Tourism Information Centre* mengatakan bahwa: (1) perusahaan penerbangan negara anggota ASEAN mendukung sepenuhnya kesuksesan penyelenggaraan promosi Tahun Kunjungan ASEAN 1992 (VAY 1992); (2) dukungan ini merupakan persetujuan atas usulan yang diajukan *ASEAN Sub-Committee on Tourism* (SOCT atau Sub-Komite Kepariwisata ASEAN); (3) armada penerbangan ASEAN diharapkan turut serta secara aktif mengadakan penerbangan cuma-cuma bagi para wartawan asing yang diundang dari Jepang, Jerman dan Australia untuk berkunjung ke ASEAN; (4) perusahaan penerbangan ASEAN diharapkan menonjolkan dan menyajikan tarif serta paket liburan dari masing-masing negara secara khusus; (5) perusahaan penerbangan ASEAN sepakat untuk mempertimbangkan pemberian bantuan pengangkutan barang tambahan VAY 1992 kepada ASEAN SCOT dan

menyajikan artikel-artikel khusus pada majalah tentang daerah tujuan wisata di ASEAN selama penerbangan; (6) ASEAN sepakat untuk menyelenggarakan sedikitnya satu peristiwa ASEAN yang sangat penting dan dua peristiwa nasional lainnya guna menjadikan tahun 1992 sebagai tahun yang penuh dengan pesta tanpa henti yang menghibur para pengunjung. Kegiatan ini akan menampilkan keanekaragaman budaya sosial dan etnis dari kawasan Asia Tenggara sekaligus memperlihatkan semangat kerjasama dan solidaritas regional (*Pelita*, 12-1-1991).

Ketika menerima enam Menteri Kepariwisata ASEAN di Istana Merdeka tanggal 12 Januari 1991, Presiden Soeharto mengatakan bahwa bangsa-bangsa di kawasan ASEAN harus bersiap-siap menghilangkan dampak negatif pariwisata yang timbul akibat membanjirnya wisatawan mancanegara ke kawasan ini sehubungan dengan dicanangkannya Tahun Kunjungan ASEAN 1992 (*Kompas*, 13-1-1991).

Seusai diterima Presiden Soeharto di Istana Merdeka, Menparpostel Soesilo Soedarman mengatakan kepada pers bahwa: (1) ATF merupakan forum pertemuan tahunan antara sesama pembuat kebijaksanaan kepariwisataan ASEAN untuk merumuskan kebijakan bersama yang mengacu pada perkembangan ASEAN di masa mendatang; (2) Indonesia mengusulkan perlunya membahas masalah-masalah strategis yang dapat mendorong serta berkaitan erat dengan peningkatan dan perkembangan pariwisata di masa mendatang seperti: (a) kemudahan di bidang angkutan udara dan laut antara negara-negara ASEAN; (b) kemudahan kunjungan wisatawan ASEAN; (c) latihan dan pembinaan sumber daya manusia (*Kompas*, 13-1-1991).

ATF 1991 berlangsung di Bandung tanggal 12-16 Januari 1991, dihadiri oleh 254 *buyers* dari berbagai negara dan 237 *sellers* dari semua negara anggota ASEAN serta para pemimpin badan pariwisata dari semua negara anggota ASEAN. Menparpostel Soesilo Soedarman mengatakan pada pembukaan itu bahwa: (1) dunia menjadi semakin mengecil dan negara-negara anggota ASEAN memainkan peranan untuk membuat dunia menjadi tempat yang berbahagia; (2) walaupun kadang-kadang antara sesama negara tidak sepakat, namun manusia tetap saja mengalir ke negara yang satu dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pariwisata merupakan jembatan yang kuat bagi pergaulan manusia; (3) ATF akan membicarakan usaha dan merencanakan agar semakin banyak manusia saling mengunjungi; (4) Indonesia mengucapkan selamat kepada Ma-

laysia yang telah berhasil menyelesaikan Tahun Kunjungan Malaysia 1990 dengan sukses; (5) pada tahun 1990 Indonesia telah dikunjungi oleh lebih dari 2 juta wisatawan mancanegara yang menghasilkan sekitar US\$1,8 milyar (*Suara Pembaruan*, 13-1-1991); (6) komponen pariwisata ASEAN agar meningkatkan kerjasama demi kemajuan bersama; (7) ASEAN yang lebih damai, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki peluang yang lebih baik dibandingkan dengan berbagai bagian dunia yang diliputi gejolak dan kesulitan ekonomi (*Suara Karya*, 14-1-1991).

Mantan Menlu RI, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dalam Pertemuan ATF tanggal 12 Januari 1991 bahwa: (1) Konperensi Kepariwisata ASEAN (ATF) merupakan salah satu bukti eratnya hubungan antar negara-negara anggota ASEAN di berbagai bidang; (2) sejak berdirinya, ASEAN telah mengalami kemajuan yang menggembirakan, khususnya sejak tahun 1979; (3) setelah Deklarasi Bangkok 1967, ASEAN langsung memulai kegiatannya dengan saling mengadakan hubungan persahabatan; (4) walaupun berada di tengah konflik internasional ASEAN tetap berdiri teguh; (5) ASEAN telah mengeluarkan Deklarasi ZOPFAN yang menunjukkan tekad untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara bebas dari campur tangan asing; (6) berakhirnya permusuhan di Indocina pada 1975 telah memberi harapan kepada Asia Tenggara untuk menjadi kawasan yang tenang dan damai; (7) ASEAN telah menghasilkan dua dokumen penting yaitu *The Declaration of ASEAN Concord* dan *The ASEAN Treaty of Peace, Amity and Cooperation* (Perjanjian Perdamaian, Persahabatan dan Kerjasama); (8) invasi Vietnam ke Kamboja 1978 telah membangkitkan reaksi ASEAN untuk mengatasi konflik tersebut dengan menentang penggunaan kekerasan sesuai dengan Piagam PBB dan Dasa Sila Bandung; (9) masalah Kamboja menjadi faktor penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan ASEAN serta merupakan pertimbangan politik internasional yang perlu mendapat perhatian; (10) kerjasama ASEAN harus ditingkatkan di segala bidang untuk menciptakan kebiasaan bekerjasama dan memperkuat persatuan di antara negara-negara anggota dan rakyatnya; (11) sejak beberapa tahun lalu orientasi ckspor ASEAN mengalami banyak kemajuan dan membuat kelompok ASEAN menjadi salah satu kawasan yang tumbuh pesat di dunia; (12) peningkatan pendapatan di negara-negara Asia termasuk ASEAN pada tahun 1970-an telah memberi harapan besar bagi usaha perjalanan dan pariwisata selama sepuluh tahun terakhir ini; (13) prospek ekonomi ASEAN di masa

mendatang tampak dibayangi oleh: (a) kenaikan harga minyak akibat krisis Teluk dan gagalnya Putaran Uruguay; (b) kerjasama ekonomi seperti Pasar Tunggal Eropa 1992 dan perluasan kerjasama perdagangan AS dengan Kanada serta negara-negara Amerika Utara. Keadaan ini tidak mengkhawatirkan karena kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat yang juga telah bekerjasama dengan Jepang dan negara-negara maju Asia lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong; (14) pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh Eropa Barat dan Amerika Utara yang disebabkan oleh kebijaksanaan ekonomi dan resesi dapat berakibat pada orientasi negara-negara industri di Asia akan beralih ke Asia Tenggara yang semakin menarik bagi mereka; (15) stabilitas politik di Timur Tengah, Asia Selatan dan ketidakpastian di Uni Soviet dan Eropa Timur membuat Asia Tenggara semakin menarik bagi para investor dan pengusaha asing; (16) peristiwa Tien An Men memberi peluang bagi ASEAN untuk mengungguli Cina guna menarik investasi dan usaha perjalanan, namun Cina suatu saat akan tetap menjadi saingan yang kuat bila negara ini kembali memainkan peranan sepenuhnya; (17) usaha pariwisata, khususnya di Asia Tenggara, tidak mudah terpengaruh oleh keadaan politik dan ekonomi yang kurang menentu; (18) pendapatan dari usaha perjalanan dan pariwisata dapat menggantikan ekspor barang-barang manufaktur sebagai penghasil devisa di negara-negara ASEAN; (19) untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu itu, yang harus dilakukan ASEAN adalah mendapatkan kesempatan semaksimal mungkin akan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan serta memadukan antara pasar dan pelayanan (*Angkatan Bersenjata*, 15-1-1991).

Dalam pertemuan tanggal 13 Januari 1991, yang dihadiri oleh Direktur Keuangan pada Kementerian Keuangan Brunei Darussalam, Dato Paduka Haji Yaakub bin Abu Bakar, Wakil Menteri Pariwisata Filipina, Narzalina Z. Lim, Menteri Kebudayaan, Seni dan Pariwisata Malaysia, Dato Sabbaruddin Chik, Menteri Negara Perdagangan dan Industri Singapura, Mah Bow Tan, Gubernur Badan Pariwisata Muangthai, Dharmoon Praoahubmoh serta Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Indonesia, dicapai komunike bersama yang menegaskan ASEAN; (1) memerlukan visi dan strategi baru untuk mengembangkan industri pariwisatanya guna menghadapi perubahan-perubahan politik dan ekonomi global yang sedang berlangsung; (2) sepakat untuk terus meningkatkan promosinya sebagai tujuan wisata setelah *Visit ASEAN Year 1992* usai; (3) sepakat

untuk melestarikan warisan budaya dan lingkungan sebagai bagian integral pembangunan pariwisata; (4) sepakat untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata intra ASEAN terutama di kalangan pemuda guna memperkokoh saling pengertian dan saling menghargai di antara sesama anggota ASEAN; (5) mengakui bahwa peran pariwisata semakin meningkat dalam pembangunan negara-negara anggota, dan kunjungan wisata intra ASEAN memberikan sumbangan yang besar bagi industri pariwisata di kawasan ini; (6) menunjuk Sub-Komite Pariwisata ASEAN untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai di Bandung (*Suara Karya*, 16-1-1991).

Direktur Eksekutif Pusat Informasi Wisata ASEAN (*ASEAN Tourism Information Centre - ATIC*) Abdullah Jonid mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 16 Januari 1991 bahwa: (1) sedikitnya 25 juta wisatawan asing diharapkan berkunjung ke kawasan ASEAN pada *Visit ASEAN Year 1992*; (2) target ini dapat dicapai meskipun jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ASEAN pada 1989 baru tercatat 16,7 juta orang; (3) ASEAN akan menggalakkan promosi bersama dengan negara-negara anggota untuk menjadikan kawasan ini sebagai satu daerah tujuan wisata; (4) pertumbuhan pariwisata ASEAN dari tahun ke tahun terus meningkat dan sasaran utama promosinya adalah Jerman, Australia dan Jepang; (5) ASEAN akan berupaya menjaring wisatawan di kawasan sendiri; (6) masyarakat anggota ASEAN sendiri harus menyadari pentingnya kebersamaan dan perlunya meningkatkan *intra travel tour* dengan membuat paket-paket tour ke negara anggota; (7) untuk mencapai target tersebut ATIC akan mengumpulkan dana promosi dari tiap-tiap negara anggota US\$500.000; (8) Jepang dan MEE telah memberikan sumbangan untuk membantu pembuatan bahan promosi berupa brosur, poster, *calender of event* guna menyebar luaskan informasi ASEAN sebagai daerah tujuan wisata; (9) Jepang mendukung dana untuk menggalakkan VAY 1992 di negaranya; (10) MEE memberikan dana US\$2,6 juta untuk mempromosikan ASEAN di Inggris, Perancis, Denmark, Norwegia, Swedia dan Finlandia; (11) dengan promosi yang gencar itu, pada tahun 1992 ASEAN akan dikunjungi oleh 25 juta wisatawan dengan pemasukan sekitar US\$24,6 milyar dan lama tinggal 7-8 hari; (12) selain menggelar berbagai atraksi, ASEAN berupaya menyebar wisatawan dengan membuat paket-paket yang meliputi negara-negara anggota dan memberikan korting tiket pesawat 20-25%, sehingga dengan biaya

lebih murah wisatawan asing dapat mengunjungi negara-negara ASEAN (*Bisnis Indonesia*, 17-1-1991).

B. KERJASAMA PERDAGANGAN ASEAN

- *Perdagangan Preferensi*

Dewan Pengembangan Perdagangan Singapura dalam siaran persnya tanggal 3 Januari 1991 mengatakan bahwa: (1) ASEAN menambah lagi 459 barang yang mendapatkan pengurangan bea masuk jika diperdagangkan antara sesama negara anggotanya dan semuanya itu dimasukkan dalam daftar APTA (*ASEAN Preferential Trade Agreement*); (2) konsesi yang akan diberikan sampai masa berlakunya masa pengurangan bea 1992 berjumlah 1.529 jenis barang, hal itu sesuai dengan kesepakatan Perdagangan Preferensi ASEAN (APTA); (3) barang tambahan itu termasuk peralatan rumah tangga, mesin perkantoran, mesin listrik dan non-listrik lainnya, minyak nabati, produk-produk kimia, tekstil dan garmen serta produk kertas; (4) langkah ini merupakan bagian dari paket lima tahun APTA yang pertama kali dilaksanakan tahun 1987; (5) program perdagangan preferensi ASEAN yang dimulai sejak tahun 1978 bertujuan untuk meningkatkan perdagangan intra ASEAN, dan dalam tiga tahun terakhir telah mencapai 2.514 barang yang sudah dimasukkan ke dalam APTA; (6) sejak tahun 1987 barang yang mendapatkan pengurangan bea masuk telah meningkat menjadi 9.622 jenis dan pada tahun 1991 barang yang memperoleh pengurangan bea masuk akan dinaikkan lagi menjadi 4.095 jenis (*Angkatan Bersenjata*, 3-1-1991).

C. KERJASAMA INDUSTRI MINERAL DAN ENERGI

- *Kerjasama Perminyakan ASEAN*

Pertemuan Perusahaan Minyak Negara-negara ASEAN berlangsung di Manila tanggal 3-4 Januari 1991 diikuti oleh wakil-wakil perusahaan minyak negara seperti, Petronas dari Malaysia, Pertamina dari Indonesia, *Petroleum Authority of Thailand* dari Muangthai, *Singapore Petroleum Co.* dari Singapura dan Unit Minyak pada Kementerian Keuangan Brunei serta PNOC, untuk membahas mekanisme pembagian minyak dan menetapkan berapa banyak Indonesia, Malaysia dan Brunei dapat berbagi minyak dengan Singapura, Muangthai dan Filipina jika terjadi perang Teluk.

Wakil Presiden Perusahaan Minyak Nasional Filipina (*Philippine National Oil Co.*), Orlando Galang mengatakan kepada pers di Manila tanggal 3 Januari 1991 bahwa: (1) pertemuan akan menentukan seberapa banyak produser minyak dapat menyediakan minyak kepada negara anggota ASEAN lainnya yang tidak mempunyai penghasilan di sektor ini; (2) ASEAN akan bersiap-siap dan jika perlu akan melakukan pembagian minyak sehingga tidak kebingungan; (3) jika perang Teluk terjadi, ASEAN akan melakukan sistem pembagian minyak darurat sesuai dengan mekanisme yang disepakati sejak akhir 1970-an; (4) para pejabat perminyakan akan menuntaskan penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan mekanisme pembagian minyak dan akan menentukan seberapa banyak minyak yang tersedia dengan skenario tertentu; (5) mereka akan mempertimbangkan apakah produser minyak perlu meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan; (6) meskipun perang Teluk terjadi produksi minyak di Timur Tengah belum tentu terhenti, namun masalahnya adalah bagaimana mendapatkan minyak dari luar negara Teluk; (7) selama ini Filipina mengimpor sekitar 80% kebutuhan minyaknya dari Timur Tengah dan diperkirakan akan menggunakan mekanisme pembagian minyak jika terjadi perang Teluk; (8) hingga kini negaranya telah menimbun minyak yang setara untuk kebutuhan 60-70 hari; (9) konsumsi minyak harian rata-rata di Filipina 240.000 barrel, Singapura 100.000 barrel, dan Muangthai 450.000 barrel (*Pelita*, 4-1-1991).

Hasil pertemuan antara lain: (1) menegaskan kembali komitmen mereka jika perang Teluk terjadi; (2) setiap negara anggota di kawasan ASEAN yang kekurangan persediaan minyak lebih dari 20% dapat mencari bantuan berdasarkan APSA; (3) hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada para Menteri Ekonomi ASEAN untuk disahkan (*Antara*, 5-1-1991).

III. KERJASAMA NON-EKONOMI

- PERTEMUAN KELOMPOK KERJA RTFV ASEAN KE-6

Pertemuan Kelompok Kerja Radio, Televisi, Film dan Video (RTFV) ASEAN ke-6 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1990 untuk membahas peran serta dan rasa kebersamaan ASEAN. Pertemuan dihadiri oleh utusan dari Badan Penyiaran Singapura (SBC), Radio dan Televisi Brunei, Biro Humas Kementerian Penerangan Muangthai, Biro Penerangan Ke-

menterian Luar Negeri Filipina dan Radio Televisi Malaysia (RTM).

Sekretaris Urusan Parlemen pada Kementerian Penerangan Malaysia, Fauzi Abdul Rahman, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) proyek-proyek yang dilaksanakan ASEAN agar diselaraskan dengan upaya menuju penciptaan rasa kebersamaan di antara penduduk negara anggota ASEAN; (2) jika berbicara mengenai ASEAN berarti membicarakan penduduk sekitar 300 juta jiwa, maka rakyat ASEAN yang seharusnya menghormati dan menghargai ASEAN terlebih dahulu; (3) jika seluruh sumber daya manusia dan alam yang ada di antara negara anggota ASEAN digabungkan dan stabilitas politik terjamin, maka ASEAN akan menjadi kawasan makmur; (4) harus diadakan usaha untuk menanamkan rasa kebersamaan dan peran serta yang wajar di antara rakyat ASEAN; (5) dengan Tahun Kunjungan ASEAN 1992 seluruh rakyat ASEAN dapat memainkan peranan positif untuk menciptakan kebersamaan yang sungguh-sungguh; (6) komunikasi melalui radio, televisi dan film telah membuat negara-negara anggota ASEAN semakin erat (*Antara*, 28-11-1990).

IV. KERJASAMA NON-PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA PEMUDA ASEAN

Pertemuan segitiga delegasi pemuda-Indonesia, Malaysia dan Singapura berlangsung di Batam tanggal 14-15 Desember 1990, yang dihadiri oleh Menpora RI, Akbar Tanjung, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Annuar Musa dan Menteri Kesehatan merangkap Ketua Dewan Nasional Pemuda Singapura, Yeo Cheow Tong, serta para pejabat senior kepemudaan untuk: (1) menyelesaikan beberapa kertas kerja yang menyangkut masalah kepemudaan baik di tiga negara maupun ASEAN; (2) menentukan Hari Pemuda ASEAN dan pembentukan sistem informasi kepemudaan ASEAN; (3) mempersiapkan program pemuda guna mendukung kegiatan "Visit ASEAN Year 1992"; (4) bertukar pandangan mengenai masalah kepemudaan guna menyambut pertemuan pemuda ASEAN yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 1991, di Singapura. Pertemuan itu juga akan membahas rencana untuk meningkatkan pengajaran bahasa Inggris maupun pengetahuan tentang masalah internasional.

Pada akhir pertemuan mereka sepakat: (1) untuk mengusulkan tanggal 8 Agustus yang merupakan tanggal berdirinya ASEAN sebagai "Hari Pemuda ASEAN yang akan mulai dicanangkan pada tahun 1992 dan bertepatan dengan Tahun Kunjungan Wisata ASEAN. Penetapan tanggal ini selain untuk mendukung program pariwisata ASEAN juga untuk memperingati 25 tahun kerjasama ASEAN; (2) akan menjajaki kemungkinan menyelenggarakan pertemuan Tingkat Menteri Pemuda se ASEAN secara berkala; (3) pertemuan trilateral ini akan memprogramkan pertemuan bilateral dengan Brunei Darussalam, Filipina, Muangthai, serta antara Malaysia dan Singapura; (4) untuk mengaktifkan Komite Kerjasama Pemuda ASEAN (CAYC) dan akan membentuk sistem informasi pemuda ASEAN; (5) untuk bertemu kembali di Singapura tanggal 26-28 Februari 1991 dalam forum ke-8 Sub-Komite ASEAN Urusan Pemuda. Mereka juga mendesak agar hasil-hasil pertemuan ini diikuti dengan program-program nyata (*Antara*, 17-1-1990).

Seusai pertemuan, Menteri Kesehatan merangkap Ketua Dewan Nasional Pemuda Singapura, Yeo Cheow Tong, mengatakan kepada pers bahwa: (1) Menpora Akbar Tanjung telah mengambil kebijakan yang tepat dengan memilih Batam sebagai tempat konperensi segitiga; (2) segitiga pertumbuhan (*triangle growth*) yang meliputi Riau, Johor dan Singapura agar dinamakan "Segitiga Pemuda"; (3) para menteri agar memusatkan perhatian pada pembinaan generasi muda pada saat terjadi peredaan ketegangan antara blok Barat dan Timur; (4) di masa mendatang peluang perdagangan akan meningkat meskipun akan diikuti dengan persaingan-persaingan; (5) negara-negara yang bekerjasama akan menempati posisi yang baik dan memperoleh kemajuan untuk menghadapi persaingan itu.

Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Annuar Musa mengatakan bahwa: (1) pertemuan telah menghasilkan program-program nyata; (2) negara anggota ASEAN agar bertukar informasi tentang pembinaan generasi muda dan mengadakan pertukaran tenaga ahli untuk meningkatkan kualitas generasi muda ASEAN; (3) partisipasi para ahli akan memberikan dorongan yang besar bagi pengembangan generasi muda; (4) pertemuan ini tidak akan ada artinya jika tidak menghasilkan program-program yang nyata (*Jakarta Post*, 17-12-1990).

Seusai pertemuan antara Menpora, Ir. Akbar Tan-

jung dan mantan Menpora Malaysia yang kini menjadi Menhankam Malaysia, Datuk Nadjib bin Tun Abdul Razak, di Jakarta, Kepala Humas Menpora Drs. B. Aritonang mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 8 Januari 1991 bahwa: (1) sistem informasi pemuda ASEAN yang telah lama tidak aktif akan diaktifkan kembali; (2) pengaktifan ini dimaksudkan untuk menunjang informasi di kalangan pemuda ASEAN. Dalam pembicaraan di Batam pertengahan Desember 1990 selain mendukung rencana tersebut, Menpora Malaysia Anwar Musa juga bersedia untuk merumuskan perlunya peringatan Hari Pemuda ASEAN (*ASEAN Youth Day*) dan merintis Visit ASEAN; (3) Menhankam Malaysia minta kepada Menpora agar hubungan persahabatan ini terus dilanjutkan dan tidak terputus hanya karena perbedaan jabatan serta meminta agar kerjasama yang dirintis selama ini secepatnya dikonkritkan karena tujuannya ke Indonesia saat ini adalah untuk merealisasi kerjasama yang telah dirintis selama ini (*Pelita*, 9-1-1991).

B. KERJASAMA LINGKUNGAN HIDUP

Seminar masalah Lingkungan Hidup ASEAN akan berlangsung di Banda Aceh tanggal 14 Januari 1991 dengan tema "Membina Lingkungan Hidup Dalam Upaya Meningkatkan Martabat Manusia. Seminar akan dihadiri oleh 250 ulama dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, 45 orang di antaranya dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Muangthai, untuk membahas 15 kertas kerja yang terdiri atas makalah kunci, undangan dan sumbangan.

Sekretaris Panitia Pelaksana Seminar dari Indonesia, Zainal Arifin Siregar, mengatakan kepada pers di Banda Aceh tanggal 12 Desember 1990 bahwa: (1) Walikota Padang, Sjahrul Udjud SH, dan Walikota Bogor, HM Suratman, akan membicarakan pengalamannya membina keserasian lingkungan hidup, sedangkan Walikota Banda Aceh, Drs. Baharuddin Yahya, akan membahas Cita-cita dan Rencana Membina Banda Aceh Menjadi Kota Beriman; (2) utusan Singapura akan membahas Cara Membina Singapura Menjadi Kota Terbersih di Asia Tenggara; (3) pertemuan akan dibuka oleh Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Indonesia, Prof. Dr. Emil Salim dan ditutup oleh Menparpostel, Soesilo Soedarman (*Angkatan Bersenjata*, 14-12-1990).

V. MASALAH KEAMANAN

- KERJASAMA KEAMANAN

Ketika menerima kunjungan kehormatan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Renato S. De Vila, di Jalan Cendana Jakarta tanggal 5-1-1991, Presiden Soeharto mengatakan bahwa: (1) masalah yang harus diatasi pemerintah Filipina bukan hanya aspek politik dan keamanan, tetapi juga aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya; (2) negara-negara ASEAN diharapkan terus meningkatkan ketahanan nasionalnya masing-masing, karena hal ini akan mampu menciptakan ketahanan regional; (3) ketahanan nasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh negara anggota ASEAN (*Suara Karya*, 7-1-1991).

VI. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- HUBUNGAN ASEAN-JERMAN

Duta Besar Republik Federal Jerman, Theodor Wallau, mengatakan pada acara penandatanganan naskah Pengaturan Pelaksanaan Dana Studi dan Keahlian bagi negara-negara ASEAN di Jakarta tanggal 10 Januari 1991 bahwa: (1) Jerman memberikan bantuan US\$1 juta kepada negara anggota ASEAN yang merupakan kelanjutan dan perluasan bantuan yang sebelumnya bersifat bilateral; (2) tujuan pemberian dana itu untuk meningkatkan kerjasama di antara negara anggota ASEAN; (3) dana ini dimanfaatkan untuk pembiayaan program pertukaran pengetahuan di berbagai bidang seperti perlindungan tanaman, pengelolaan hutan berkesinambungan, balai latihan kerja dan alih teknologi; (4) kerjasama antara Barat dan Timur serta bantuan dari Utara ke Selatan masing-masing tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi; (5) melalui program ini Jerman berupaya memenuhi sasaran dari rencana Buenos Aires untuk meningkatkan dan mengimplementasikan "Kerjasama Teknik Sesama Negara-negara Berkembang" (TODC) yang telah diterima oleh 138 negara pada tahun 1978; (6) TODC adalah program yang dirancang untuk membantu dan mendukung negara-negara berkembang guna memperkuat proses perkembangannya melalui pertukaran sumber daya dan personil di antara mereka; (7) program Jerman-ASEAN ini mencerminkan partisipasi pemerintah Jerman untuk membantu ekonomi dan

sosial negara berkembang; (8) Jerman ingin menunjang kerjasama regional sehingga memungkinkan negara-negara berkembang berintegrasi di dalam perekonomian dunia; (9) meskipun ada perubahan-perubahan di Jerman dan Eropa, Jerman akan terus memenuhi tanggung jawabnya pada negara-negara berkembang (*Antara*, 10-1-1991).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASEAN Rusli Noor mengatakan bahwa: (1) bantuan Jerman itu sangat efektif untuk mengembangkan proyek percontohan seperti program peningkatan sumber daya dan personil di antara negara berkembang yang selama ini disalurkan melalui TODC; (2) cara ini dipandang lebih menghemat biaya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri secara kolektif di antara mereka; (3) Malaysia sebagai negara penghasil karet cukup potensial untuk dijadikan proyek percontohan bagi pengelolaan hutan berkesinambungan; (4) penerapan dan alih teknologi dilaksanakan melalui program pelatihan dan seminar-seminar; (5) proyek-proyek baru yang berhubungan dengan program yang menjadi kesepakatan bersama di antara negara anggota ASEAN akan diusulkan melalui komite yang ada dan selanjutnya diajukan ke negara pemberi bantuan seperti Jerman (*Antara*, 10-1-1991).

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- PERTEMUAN ANGGOTA SNC DENGAN KETUA BERSAMA PICC

Pertemuan anggota SNC dengan Ketua Bersama PICC, berlangsung di Paris tanggal 21-23 Desember 1990, untuk membahas rencana proses perdamaian Kamboja.

Menteri Luar Negeri Perancis, Roland Dumas, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) faksi-faksi Kamboja yang bertikai hendaknya menghentikan perselisihan dan menyadari bahwa pemecahan dengan cara militer tidak menyelesaikan masalah; (2) masyarakat internasional tidak akan memperhatikan masalah Kamboja, jika pihak-pihak di Kamboja tidak mempunyai kemauan politik untuk mencapai penyelesaian mereka; (3) pihak-pihak di Kamboja agar menunjukkan rasa tanggung jawab pada pertemuan SNC; (4) akibat perbedaan pendapat di kalangan faksi-faksi yang

bertikai, SNC telah tiga bulan ini belum mengadakan pertemuan (*Antara*, 22-12-1990).

PM Kamboja, Hun Sen, mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) bangsa Kamboja melalui SNC akan memutuskan di antara mereka sendiri tentang kekuasaan apa saja yang akan didelegasikan kepada PBB; (2) bangsa Kamboja akan mengambil langkah untuk mencegah setiap pemberontakan rezim genocide Pol Pot; (3) peranan PBB dalam penyelesaian masalah Kamboja harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Piagam PBB; (4) Kamboja tidak harus ditempatkan di bawah pengawasan negara lain atau organisasi internasional; (5) hanya rakyat Kamboja yang berhak menentukan masa depannya dengan pemilu sebagai kunci solusi politik; (6) tiga prinsip dasar untuk penyelesaian Kamboja adalah: (a) menghargai kemerdekaan dan kedaulatan Kamboja; (b) penghormatan terhadap Piagam PBB; (c) jaminan bahwa rezim genocide Pol Pot tidak akan kembali berkuasa; (7) penerapan gencatan senjata di seluruh wilayah Kamboja, pemilu yang bebas, serta pengakhiran bantuan militer asing (*Kompas*, 22-12-1990).

Pertemuan SNC ini berakhir tanpa persetujuan rencana perdamaian yang diprakarsai PBB. Namun mereka menyatakan bahwa rezim Kamboja dukungan Vietnam dan ketiga kelompok perlawanan setuju untuk segera berkumpul kembali guna membahas cetak biru yang diprakarsai PBB (*Suara Pembaruan*, 23-12-1990).

Para anggota SNC menerima kerangka perdamaian yang diajukan Indonesia dan Perancis sebagai dasar penyelesaian konflik Kamboja. Rancangan penyelesaian menyeluruh (*Comprehensive Political Settlement* - CPS) itu disusun pada tanggal 26 November 1990 oleh Co-Chairman PCC, Indonesia dan Perancis bersama lima anggota tetap DK PBB, terdiri atas tiga rancangan persetujuan utama sebagai dasar penyelesaian konflik yakni: (1) suatu rancangan persetujuan utama yang mencakup unsur-unsur utama dari suatu penyelesaian menyeluruh yang terdiri atas 32 provinsi dengan lima *annex* masing-masing menyangkut mandat yang diusulkan untuk UNTAC (otoritas sementara PBB untuk Kamboja); (2) suatu rancangan persetujuan menyangkut kedaulatan, kemerdekaan, integritas dan keutuhan wilayah, netralitas dan persatuan nasional Kamboja; (3) suatu rancangan deklarasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi Kamboja (*Antara*, 27-12-1990).

Timbangan Buku

Dekat di Mata Tapi Jauh di Hati

Australia dan Indonesia adalah dua tetangga yang aneh. Meski secara geografis berdekatan, namun mereka merasa asing satu sama lain. Buku yang terdiri atas 16 bab ini membahas tentang hubungan kedua negara dari masa ke masa, pengaruh kekuatan-kekuatan besar terhadap kawasan Asia Tenggara, dan juga hubungan kedua negara ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik dan strategi.

Strange Neighbours: The Australia-Indonesia Relationship oleh Desmond Ball & Helen Wilson. North Sydney: Allen and Unwin Australia Pty. Ltd., 1991, 268 hal.

BUKU tentang "Tetangga-tetangga yang Asing" ini merupakan buku yang patut dibaca oleh para mahasiswa, akademisi, politisi, pengambil keputusan ataupun masyarakat luas. Buku ini merupakan rangkuman beberapa makalah yang diajukan pada Seminar Australia-Indonesia ke-5 yang diadakan di Kampus Universitas Nasional Australia, Canberra, 26-27 Mei 1989. Ada enam isu penting yang dibahas dalam seminar ke-5 tersebut. Pertama, pengaruh kekuatan-kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Isyu ini dibahas oleh Tony Kevin, staf Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Chapter 3). Dari pihak Indonesia, Djisman S. Simandjuntak membahas implikasi perubahan terakhir ekonomi dunia terhadap kawasan Asia Tenggara (Chapter 4). Kedua, perkembangan-perkembangan dan

tantangan-tantangan di Papua Nugini khususnya dan Pasifik Selatan pada umumnya yang masing-masing dibahas oleh Jusuf Wanandi dari CSIS (Chapter 5) dan David Hegarty dari ANU (Chapter 6). Ketiga, perkembangan-perkembangan dan tantangan-tantangan di Kamboja, dibahas oleh Gary Klintworth (Chapter 7) dan Sabam Siagian (Chapter 8). Keempat, perkembangan-perkembangan dan tantangan-tantangan di Filipina secara khusus dibahas oleh Reynaldo C. Iletto. Kelima, dimensi-dimensi budaya, politik dan strategi dalam hubungan Indonesia-Australia, masing-masing oleh Goenawan Mohamad, Andrew MacIntyre dan Hasnan Habib. Keenam, isyu-isu tentang perdagangan dan investasi bilateral, masing-masing dibahas oleh Mari Pangestu dan Hal Hill.

Diskusi ini dibuka oleh Senator Gareth Evans, Menlu Australia, yang memberikan latar belakang sejarah hubungan kedua negara, peranan dirinya dalam membina hubungan kedua negara lewat pembentukan Australia-Indonesia Institute, dan juga ha-

rapannya agar seminar tidak hanya membahas perbedaan-perbedaan antara kedua negara melainkan juga persamaan kepentingan serta kerjasama yang erat antara Indonesia-Australia di fora internasional (Chapter 1). Dalam kata pembukaannya Menlu Evans mengatakan, "Tiada dua tetangga di mana pun di dunia ini yang begitu berbeda, dalam hal sejarah, budaya, penduduk, serta tradisi-tradisi politik dan sosial, seperti Australia dan Indonesia" (hal. 1). Perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol tersebut tidak jarang menjadi kendala yang cukup kuat terhadap hubungan kedua negara. Seminar di ANU tersebut, seperti juga seminar-seminar sebelumnya yang diadakan di ANU di Universitas Griffith ataupun di CSIS, pada intinya ingin mencari titik temu dan saling pengertian bukan saja di antara dua pemerintahan tapi juga di antara masyarakat dan elite politik Indonesia dan Australia.

Sementara itu, Harry Tjan Silalahi dari CSIS juga membahas arah positif hubungan RI-Australia dalam dua tahun terakhir, 1986-1988 (Chapter 2). Diskusi ini ditutup oleh kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Jusuf Wanandi (Chapter 15) dan bekas Dubes Australia di Indonesia, Bill Morrison (Chapter 16).

Di dalam Chapter 3, Tony Kevin secara mendetail membahas perubahan-perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Di sini ia mengatakan bahwa peran Jepang, Cina dan India sebagai kekuatan-kekuatan regional akan semakin besar di masa mendatang. Dari sudut ekonomi, Muangthai telah membuka jalan untuk menyatukan negara-negara Asia Tenggara di luar ASEAN, seperti Myanmar, Laos dan Kamboja ke dalam sistem ekonomi pasar. Meski saat ini upaya Muangthai tersebut masih untuk kepentingan dirinya, namun di-

harapkan akan tercipta suatu kerjasama ekonomi yang baik di Asia Tenggara. Di sini juga terbuka jalan yang makin lebar bagi Australia dan Indonesia untuk semakin erat bekerjasama demi pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Djisman S. Simandjuntak di dalam Chapter 4 menekankan perlunya diperluas kerjasama ekonomi regional di Asia Tenggara. Djisman secara luas juga menganalisa terjadinya proses penyesuaian struktural dalam tata ekonomi regional.

Di dalam Chapter 5 dan 6, Jusuf Wanandi dan David Hegarty secara mendetail menganalisa perkembangan terakhir di kawasan Pasifik Selatan. Hegarty secara gamblang mengatakan adanya persaingan kepentingan antara Indonesia dan Australia di kawasan Pasifik Selatan. Hal ini tampak menonjol dalam kasus perkembangan di Fiji sejak kudeta militer 1987 yang dipimpin oleh Kolonel Rabuka, di mana Indonesia tak mendapatkan masalah dalam membina hubungan dengan rezim baru di Fiji, sedangkan Australia tak bisa menggunakan pengaruh kekuatan ekonominya untuk mengubah apa yang terjadi di Fiji. Tampaknya, Indonesia memang ingin memainkan peranan yang besar di kawasan tersebut, seperti tampak dari pendekatan-pendekatannya terhadap Fiji, PNG dan beberapa negara yang berumpun Melanesia. Namun demikian perlu diutarakan bahwa bagaimanapun Indonesia tidak bisa menggantikan peranan besar yang dimainkan Australia di kawasan tersebut karena Indonesia tak memiliki kekuatan ekonomi yang memadai untuk bermain di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu, di mata Indonesia, PNG tetap negara terpenting di kawasan Pasifik Selatan.

Jusuf Wanandi juga menggambarkan bagaimana perkembangan hubungan segitiga Indonesia-Australia-PNG. Bill Morrison

tak menerima pendapat Wanandi tentang adanya hubungan segitiga tersebut, karena seolah-olah PNG masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh Australia. Apa yang dikatakan Wanandi sebenarnya masuk akal. Sebagai contoh, walau hubungan RI-PNG semakin erat, sebenarnya masih ada kecurigaan PNG terhadap Indonesia sehingga PNG masih perlu payung pertahanan dari Australia. Hal ini tampak secara mencolok dari adanya perjanjian pertahanan antara PNG-Australia yang merupakan bagian dari "Join Declaration of Principles Guiding Relations Between PNG and Australia" pada Desember 1987. Padahal, setahun sebelumnya PNG dan Indonesia telah menandatangani "Treaty of Mutual Respect, Friendship and Co-operation". Saat ini Australia tampaknya juga khawatir akan perkembangan kerjasama pertahanan antara RI-PNG di masa datang, khususnya sejak kunjungan Panglima ABRI Jenderal Try Sutrisno ke Port Moresby tahun lalu. Australia amat khawatir bahwa pengaruhnya di PNG akan berkurang dengan adanya upaya-upaya dari Indonesia. Sebenarnya Australia tak perlu khawatir terhadap upaya positif Indonesia di Pasifik Selatan, khususnya di PNG, karena bagaimanapun hal ini akan menunjang stabilitas di kawasan tersebut.

Wanandi, tampaknya, akan tetap dikenang di PNG sebagai salah seorang arsitek bagi hubungan baik Jakarta-Port Moresby, karena dialah yang mengimplementasikan keinginan bekas Menlu Mochtar Kusumaatmadja untuk mengadakan dialog tetap antara PNG-Indonesia. Adalah Jusuf Wanandi pula yang menganjurkan, lewat Dialog Indonesia-Australia ke-3 di Universitas Griffith, Dialog Indonesia-PNG Pertama di Port Moresby, dan juga artikelnya di *Far Eastern*

Economic Review di tahun 1984, agar PNG menjadi anggota ASEAN dan agar ASEAN mengundang PNG menjadi anggota resmi (lihat Edward P. Wolfers, *Beyond the Border: Indonesia and Papua New Guinea, South-east Asia and the South Pacific*, Waigani and Suva, The University of Papua New Guinea Press and The Institute of Pacific Studies, University of South Pacific, 1988, hal. 94 dan 122; *Far Eastern Economic Review*, 16 August 1984, hal. 34). Namun setelah PNG memohon untuk menjadi anggota ASEAN, ternyata akhirnya ditolak oleh ASEAN dengan alasan PNG bukan negara Asia Tenggara dan telah menjadi anggota Forum Pasifik Selatan. Hal ini tampaknya membuat PNG kehilangan muka, walau negeri ini akhirnya menandatangani *Treaty of Amity and Co-operation in Southeast Asia* pada 1989.

Chapter 7 dan 8 membahas perkembangan politik di Kamboja. Baik Sabam Siagian maupun Gary Klinworth amat optimis bahwa penyelesaian politik menyeluruh atas Kamboja akan dicapai pada akhir 1989 atau tak lama setelah itu. Ternyata sampai saat inipun belum terdapat penyelesaian atas masalah tersebut. Satu hal yang menarik, Sabam secara implisit mengungkapkan adanya persaingan antara Indonesia dan Australia dalam penyelesaian masalah Kamboja. Bagi Sabam, Indonesia-lah yang bisa lebih mampu berperan dan bukan Australia. Australia sendiri, sebenarnya, telah memiliki "Buku Merah" (karena bersampul merah) bagi penyelesaian politik Kamboja yang dikeluarkan Menlu Evan tahun lalu.

Chapter 9 tentang perkembangan di Filipina amat menarik ditulis oleh Rey Ileto. Bagian yang menarik tentunya tentang masa depan pangkalan militer AS di Filipina yang akan berakhir September 1991 ini. Masalah

pangkalan ini memperkaitkan antara kepentingan ekonomi, politik dan strategi baik AS maupun Filipina. Tampaknya negara-negara ASEAN masih menginginkan agar pangkalan AS tersebut masih dipertahankan karena negara-negara ini perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik, ekonomi dan strategi di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi peranan Jepang, Cina dan India sebagai kekuatan regional yang akan berperan di kawasan tersebut. Perkembangan terakhir yang terdengar, Presiden Cory Aquino setuju untuk memperpanjang izin pangkalan militer AS tersebut selama lima tahun, tentunya dengan imbalan milyaran dollar AS.

Sebenarnya ada usulan positif dari bekas Menlu Mochtar Kusumaatmadja agar negara-negara di Asia Tenggara bisa bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Indonesia sejak dulu sangat anti pada pangkalan militer asing. Prof. Mochtar tampaknya juga melihat bahwa dengan ikut sertanya Indonesia dalam kerjasama pertahanan di Asia Tenggara, khususnya antara Indonesia-Malaysia dan Singapura, akan mengurangi ketakutan regional akan kebijakan Indonesia di masa datang, seperti yang terjadi pada masa konfrontasi. Kerjasama pertahanan tiga negara ini akan pula bisa menggantikan *Five Powers Defence Arrangement* antara Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura (Michael Richardson, "Shifts in the Power Balance," *Asia-Pacific Defence Reporter 1991 Annual Reference Edition*, hal. 37). Namun demikian, kerjasama pertahanan bilateral antar negara-negara ASEAN tampaknya masih tetap yang terbaik, karena kalau diperluas akan mengubah citra ASEAN dari organisasi regional untuk kerjasama ekonomi dan budaya, ke pakta pertahanan.

Chapter-chapter lainnya melulu tentang hubungan Indonesia-Australia. Seperti kita ketahui, hubungan Australia-Indonesia dalam kurun waktu hampir setengah abad ini telah mengalami pasang naik dan pasang surut. Beberapa pembawa makalah, seperti penyunting Desmond Ball, Menlu Gareth Evans, Goenawan Mohamad, Andrew MacIntyre serta Hasnan Habib membahas masalah ini di dalam seminar tersebut. Pasang naik hubungan kedua negara amat mencolok pada masa revolusi Kemerdekaan Indonesia di mana para buruh radikal Australia membantu perjuangan para eks-Digulis di Australia dalam menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu secara kebetulan Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ben Chifley dari Partai Buruh yang belakangan juga membantu perjuangan Indonesia khususnya lewat ikut sertanya Australia di dalam komisi tiga negara. Kisah perjuangan para eks-Digulis ini pernah diulas oleh almarhum Mohamad Bondan dalam bukunya yang berjudul *Genderang Api Kemerdekaan di Luar Negeri*.

Bulan madu hubungan kedua negara ternyata amat singkat. Pergantian pemerintahan dari Chifley ke Menzies dari koalisi Partai Liberal-National di akhir tahun 1949, ternyata juga membawa perubahan yang drastis dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia. Australia saat itu membantu Belanda dalam mempertahankan Irian Barat, bahkan kedua negara bermaksud untuk menggabungkan Irian Barat dan Irian Timur (PNG sekarang) menjadi satu pemerintahan sendiri. Perubahan politik luar negeri Amerika Serikat dari netralitas pasif ke politik mediasi dalam masalah Irian Barat, akhirnya juga mengubah sikap Australia terhadap masalah Irian Barat ke arah yang positif.

Sebagai negara yang terletak paling selatan dan terpencil, Australia sejak lama memang takut akan ancaman dari utara. Di akhir abad 19 misalnya, Australia begitu takut ketika Jerman mengambil paruh utara bagian timur pulau New Guinea. Hal ini menyebabkan Australia mendesak Inggris untuk juga mengambil paruh selatan dari bagian timur pulau tersebut, sedangkan Belanda telah menduduki seluruh bagian barat New Guinea yang kini menjadi Irian Jaya. Sejarah ketakutan Australia ini, dari sudut strategis, secara singkat dan padat dibahas oleh Hasnan Habib. Dasar dari politik luar negeri Australia masih berpijak pada letak geografisnya dan upayanya untuk mempertahankan warisan Inggris. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Australia amat tergantung pada payung pertahanan Amerika Serikat dan bukan lagi dari Inggris. Siapapun yang memerintah di Australia, pemerintah Buruh ataupun koalisi Liberal-Nasional, hubungan pertahanan dengan Amerika akan tetap dipertahankan.

Pasang surut hubungan kedua negara berlangsung sampai pertengahan 1960an, khususnya saat Indonesia menjalankan politik konfrontasi terhadap pembentukan negara federasi Malaysia. Saat itu Australia membantu Inggris dalam mempertahankan wilayah Kalimantan Utara. Walau tidak sampai menjurus ke pertempuran besar, tentara Australia sempat berhadapan dengan tentara atau sukarelawan Indonesia di Kalimantan Utara.

Hubungan kedua negara mengalami pasang naik lagi ketika Jenderal Soeharto naik ke panggung politik Indonesia setelah gagal PKI dalam peristiwa 30 September 1965. Adalah Australia, bersama Jepang dan Belanda, yang berperan dalam pembentukan IGGI untuk membantu pembangunan

ekonomi Indonesia.

Lagi-lagi, hubungan tersebut memburuk karena sebagian besar rakyat Australia sangat shock ketika integrasi Timor Timur dengan Indonesia, apalagi sejak terbunuhnya lima wartawan Australia di Balibo, Timor Timur. Dan hubungan tersebut memburuk kembali ketika David Jenkins menurunkan artikel tentang bisnis keluarga Cendana di *Sydney Morning Herald*, April 1986.

Selama ini kita hanya mengetahui bahwa perbedaan budaya yang mencolok antara orang Australia dan Indonesia adalah salah satu penyebab ketidakeratan hubungan kedua negara. Hal ini dibantah oleh Goenawan Mohamad dan Andrew MacIntyre. Goenawan, yang adalah pemimpin redaksi Tempo, mengungkapkan bahwa orang Indonesia, baik yang di pemerintahan maupun yang di luar, sejak berakhirnya revolusi kemerdekaan merasa dirinya unik. Karena uniknya sampai-sampai Soekarno ingin membentuk suatu demokrasi ala Indonesia yang lain daripada yang terdapat di negara-negara barat. Pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto juga tidak mengubah citra diri Indonesia yang unik ini. Hanya saja, demokrasi ala Indonesia itu berubah nama dari "Demokrasi Terpimpin" ke "Demokrasi Pancasila". Tapi pesannya adalah sama, Indonesia lain daripada "barat". Orang Barat tidak bisa menilai Indonesia atas standar yang berlaku di Barat (hal. 143). Inilah untuk pertama kalinya orang Indonesia berani mengungkapkan citra diri dan persepsi orang Indonesia dipandang dari kacamata orang Indonesia sendiri. Pendapat Goenawan tersebut sebenarnya telah lama terpendam di benak beberapa pengamat politik Indonesia, namun kurang berani untuk mengungkapkannya. Makalah Goenawan dinilai "Excellent" bukan saja oleh Jusuf

Wanandi dan Bill Morrison, tapi juga dari para pengamat Indonesia orang Indonesia maupun Australia.

Citra diri orang Indonesia ini mungkin perlu ditambahkan. Selama ini kita selalu merasa bahwa Indonesia berada di posisi yang penting, di antara dua benua dan dua samudera. Padahal, posisi silang tersebut tak begitu penting di mata negara super kuat seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, karena Indonesia hanya menghubungkan benua Asia dengan benua Australia yang terpencil di Selatan. Di Asia Tenggara sendiri, bukan Indonesia yang penting di mata AS, melainkan Filipina, karena Filipina adalah salah satu mata rantai kepentingan strategis AS di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, selain Jepang dan Australia.

Citra diri yang unik ini menyebabkan kadang-kadang Indonesia merasa lebih penting daripada Australia. Kalau Australia mau membina hubungan baik, maka harus mengikuti gaya Indonesia. Ini juga menyangkut pers Australia dan pemberitaannya tentang Indonesia. Itu sebabnya, menurut Andrew, kadang-kadang tak terjadi persesuaian antara pemerintah Indonesia dengan pers Australia di satu pihak dan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia di pihak yang lain (146-150). Pers Australia, sesuai ukuran demokrasi liberal, bebas memberitakan apa saja, termasuk yang untuk pemerintah Indonesia dianggap tabu. Tidak jarang pemerintah Indonesia mendesak Australia agar "menyesuaikan pers-nya" sesuai dengan standar Indonesia, yang tentunya tak bisa diterima oleh Australia. Sikap Australia yang tak mau didesak-desak ini amat menonjol pada masa pemerintahan Bob Hawke, khususnya antara tahun 1986-1987, setelah terjadinya "Peristiwa Jenkins". Itu sebabnya, Indone-

sia tak bisa membendung pemberitaan Radio Australia tentang Indonesia dalam bahasa Indonesia dan juga pemberitaan surat kabar Australia tentang situasi Indonesia.

Kerjasama ekonomi, yang dibahas dalam Chapter 13 dan 14, tampaknya merupakan suatu hal yang diharapkan semakin berkembang di masa datang. Selama ini perdagangan dan investasi di kedua negara tampaknya masih sangat terbatas. Namun demikian upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dalam memperjuangkan terbukanya pasar internasional tampaknya suatu hal yang patut dibanggakan. Pengetahuan masing-masing negara tentang kemampuan ekonomi satu sama lain juga masih terbatas. Tapi ada satu kecenderungan positif, yakni adanya kerjasama yang semakin meningkat antara ekonom ANU dan UI khususnya dan ANU dengan CSIS pada umumnya. Adalah suatu kenyataan bahwa selama ini ada pertukaran informasi, lewat jurnal ataupun seminar, antara para ekonom, ahli demografi dan ahli politik kedua negara.

Isi buku ini pada dasarnya ditulis oleh orang-orang yang menginginkan adanya perbaikan positif dalam hubungan RI-Australia. Mereka semua kadang-kadang bertanya, mengapa Indonesia dan Australia yang berdekatan ini kok asing satu sama lain. Isi buku ini mungkin akan lebih berwarna, kalau orang-orang yang selama ini suka memprotes Indonesia juga menyumbangkan makalahnya. Namun demikian, tidak jarang terjadi, kalau ada seminar semacam ini, ada pula seminar tandingan seperti yang kadang-kadang diorganisasi oleh *Inside Indonesia*.

Ikrar NUSA BHAKTI

Para Penulis

- **KARTASASMITA, Ginandjar,**
Institut Teknologi Bandung (1959-1960), Sarjana Kimia Teknik pada Tokyo University for Agriculture and Technology Chemical Engineering (1960-1965), dan Sarjana Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN (1970-1980). Mengikuti pelbagai pendidikan militer sejak tahun 1966; yang terakhir adalah Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (1974). Memegang pelbagai jabatan penting di lingkungan Sekretariat Negara (1968-1983). Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1983). Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (1985). Sejak tahun 1988 sebagai Menteri Pertambangan dan Energi.
- **MAGENDZO, Salomon,**
Peneliti Senior dari Program Riset Interdisipliner dalam Bidang Pendidikan (PIIE) di Santiago, Chili. Perhatiannya meliputi pendidikan rakyat, teori-teori yang mendasarinya, dan masalah pemuda putus sekolah. Hasil pemikirannya diterbitkan dalam buku *Transferencia y Apropiacion en Proyectos de Educacion Popular: Identidad del Educador Popular, Seis Relatos de Vida* (Transference and Appropriation in Popular Education Projects: Identity of the Community-Based Educator, Six Life Stories) dan (bersama dengan I. Egana) *Oportunidades Educativas y Laborales para los Egresados de Octavo Grado de Educacion Basica de los Sectores Populares* (Educational and Employment Opportunities for Eight Grade Graduates of Basic Education from Popular Sectors) 1988, laporan untuk FONDECYT.
- **PELLY, Usman,**
Sarjana IKIP Medan (1969), Master of Arts pada University of Illinois, Urbana, USA (1980), dan mendapat Ph.D. pada universitas yang sama tahun 1983. Sekarang menjadi Guru Besar di IKIP Medan, Fisipol USU, KPK Pasca Sarjana IPB-USU. Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup IKIP Medan; Kepala Lembaga Penelitian IKIP Medan (1975-1976). Pembantu Rektor I, IKIP Medan (1976 sampai sekarang).
- **PRANARKA, A.M.W.,**
Memperoleh gelar Sarjana Filsafat dari Athenaeo, Poona, India (1965); Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1969) dan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, dari universitas yang sama tahun 1984. Sekarang Anggota Dewan Direktur CSIS dan Ketua Departemen Politik, CSIS Jakarta dan Ketua Konsorsium Lembaga Pengkajian Kebudayaan Sarjanawiyata, Tamansiswa Yogyakarta.
- **RACHMAN, Ali M.A.,**
Sarjana Pertanian pada Institut Pertanian Bogor (1972), Master of Arts bidang Anthropologi pada University of Malaya, Malaysia (1980) dan mendapat gelar "Doctor of Philosophy" pada universitas yang sama tahun 1984. Dosen Fakultas Pasca Sarjana IPB dan Universitas Jambi. Aktif melakukan pelbagai penelitian terutama bidang *Anthropology and Human Ecology*, sejak tahun 1969.
- **RAHARDJO, Satjipto,**
Sarjana Hukum Universitas Indonesia (1960), Doktor bidang hukum pada Universitas Diponegoro (1979) dan sebagai "Visiting Scholar at the University of California, Berkeley, USA" (1972-1973). Guru Besar Hukum pada Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Gadjamada (Yogyakarta), Universitas Indonesia (Jakarta), Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (Jakarta), Ketua Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1986-1989), Ketua Pusat Studi Kepolisian, Universitas Diponegoro dan sebagai Anggota Dewan Riset Nasional.

Daftar Isi

ANALISIS CSIS TAHUN XIX/1990

No. 1/1990: Problematik Pembangunan Politik Sesudah 1993

- *Jusuf Wanandi*, Hubungan Timur-Barat dan Dampaknya pada Kawasan Asia-Pasifik
- *A.M.W. Pranarka*, Implementasi Pancasila
- *Sayidiman Suryohadiprojo*, Dinamika Pembangunan Politik Indonesia dan Integrasi Nasional
- *Soemitro*, Pembangunan Politik Sesudah Tahun 1993
- *Hardi*, Arti Partai Politik Bagi Pembangunan Nasional
- *M. Riza Sihbudi*, Problematik Parpol di Indonesia: Kasus PDI
- *Sudibyo, Yoyok Ariessusanto & F. Andrea*, Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN

No. 2/1990: Demokrasi dan Partisipasi

- *R.B. Suhartono*, Konglomerat dan Demokrasi Ekonomi
- *M. Hadi Soesastro*, Pembentukan Modal dan Pemerataan
- *Soedarsono Hardjosoekarto*, Perspektif Evolusi Gerakan Koperasi Jepang (Periode Meiji-Taisho: 1868-1926)
- *Denis Goulet*, Partisipasi dalam Pembangunan: Terobosan Baru
- *Wiratmo Soekito*, Kebudayaan Modern dalam Sistem Demokrasi Indonesia
- *I Tubagus Feridhanusetyawan*, Perubahan Struktur Pertanian Indonesia
- *Sudibyo, Yoyok Ariessusanto & F. Andrea*, Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN

No. 3/1990: Otonomi: Peluang Bertanggung Jawab

- *S. Pamudji*, Makna Daerah Tingkat II Sebagai Titik Berat Pelaksanaan Otonomi Daerah
- *Syachrinuddin Seman*, Pembangunan Wilayah: Bagian dari Pemberantas Kemiskinan
- *Iwan J. Azis*, Pembiayaan Pembangunan Daerah: Pemerataan antara IBT-IBB dan Antar Daerah
- *Nurdjaman Arsjad*, Hubungan Fiskal Antar Pemerintahan di Indonesia: Peranan dan Masalahnya
- *Medelina K. Hendytio*, Masalah Desentralisasi pada Masa Orde Baru

- *H. Kodhyat*, Pariwisata dalam Pengembangan Daerah
- *Djisman S. Simandjuntak*, Deregulasi, Demokrasi Ekonomi dan Koperasi
- *Sudibyo, Yoyok Ariessusanto & F. Andrea*, Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN

No. 4/1990: Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua: Perspektif Internasional

- *Juwono Sudarsono*, Perkembangan Politik dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua: Perspektif Internasional
- *Hadi Soesastro*, Peran Kawasan Pasifik dalam Ekonomi Politik Internasional
- *Suhadi Mangkusuwondo*, Kerjasama Ekonomi Pasifik dan Indonesia
- *Bantarto Bandoro*, Dialektika Paradigma Hubungan Internasional: Aliansi Atlantik dan Kawasan Pasifik
- *C.P.F. Luhulima*, Eropa 1992 dan Dampaknya Terhadap Kerjasama di Kawasan Pasifik
- *Rizal Sukma*, Arah Politik Luar Negeri RRC Pasca Tian An Men: Prakiraan Dekade 1990-an
- *Sudibyo, Yoyok Ariessusanto & F. Andrea*, Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN

No. 5/1990: Kondisi Pendidikan Dasar: Mau ke Mana?

- *B.S. Mardiatmadja*, Pendidikan Dasar Sebagai Landasan Pendidikan
- *St. Vembriarto*, Kondisi Pendidikan Dasar Menuju Lepas Landas
- *Dedi Supriadi*, Pendidikan di Daerah Terpencil: Masalah dan Penanganannya
- *Dali S. Naga*, Program Literasi Komputer di Dunia Pendidikan Kita
- *Jusufhadi Miarso*, Teknologi Pendidikan Kita Menyongsong Era Informasi
- *T. Raka Joni*, Kurikulum Pendidikan Dasar Menyongsong Abad Informasi: Sebuah Pemikiran Tentang Kurikulum Sekolah Dasar
- *Sudibyo, Yoyok Ariessusanto & F. Andrea*, Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN

No. 6/1990: Asia-Pasifik: Masalah & Tantangan

- *Rizal Sukma*, Cina dan Asia Tenggara Pasca Kamboja
- *Bantarto Bandoro*, Dinamisme Pasifik dan Kebijakan Alternatif Jepang
- *Edy Prasetyono*, Surutnya Signifikansi Masalah Kamboja dan Perubahan-perubahan di Asia Tenggara
- *Hadi Soesastro*, Peran dan Jawaban ASEAN dalam Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik
- *Wisnu Dewanto*, India: Kekuatan Militer Asia yang Sedang Tumbuh
- *Ivan T. Berend*, Mengapa 'Komunisme Lokal' Eropa Timur Telah Gagal?
- *Sudibyo, Yoyok Ariessusanto & F. Andrea*, Dokumen: Ringkasan Peristiwa ASEAN

Catatan:

tempel
perangko
di sini

Kepada:
Biro Pemasaran
Centre for Strategic and
International Studies

Jl. Tanah Abang III/23-27
Jakarta 10160
Telepon: 356532-5

Surat bacaan. Pengiriman naskah hendaknya disertai nama lengkap dan alamat penulis yang jelas. Untuk tulisan-tulisan yang dimuat akan disediakan honoraria yang pantas. Naskah-naskah yang tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis jika hal itu dikehendakinya. Surat menyurat yang berhubungan dengan hal tersebut harap ditujukan ke Redaksi ANALISIS CSIS.

Langganan

Harga pengganti ongkos cetak Rp 3.000,00 per eksemplar; langganan setahun (6 nomor, sudah termasuk ongkos kirim biasa) Rp 15.000,00. Surat menyurat yang berhubungan dengan langganan ditujukan ke Biro Pemasaran, CSIS.

Alamat

Jalan Tanah Abang III/23-27, Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534, 356535.